JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan
Volume: 4 Nomor:1 (Maret 2025)
E-ISSN 2964-9595
P-ISSN 2964-1322



Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Yustiyanto 88-95

#KaburAjaDulu: Analisis Fenomena Media Sosial sebagai Ekspresi Kekecewaan Masyarakat terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Keadilan di Indonesia
Asep Koswara, Lina Herlina 96-107

The Contributions of Feminist Theory in Advancing the Field of International Relations
Fikram Rettob 108-120

Kekerasan dalam Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah (Konsep Tiga Dimensi Kekerasan Johan Galtung)
Yuliana, Elia Damayanti 121-127

Resiliensi Perempuan Kepala Keluarga Pasca Karhutla (*Resilient Of Female-Headed Households After Forest And Land Fires*)
Elia Damayanti 128-137

Inovasi Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan
Vivi Sylvia Purborini, Ida Bagus Suryanatha 138-152

Efisiensi "Joint Africa-EU Strategy" untuk Mengatasi Pembajakan Kapal oleh Perompak Somalia di Perairan Afrika Timur
Azila Zahira 153-178

Volume	Nomor	Halaman	Tahun
4	1	88-178	2025

Penerbit:
POLSTAC REPOSITORI RISET
BERKARYA MEMBANGUN BANGSA
email: jurnal@polstac.or.id

ISSN 2964-1322
9 772964 132004
ISSN 2964-9595
9 772964 959007

Vol. 4, No. 1, Maret 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Reza Yustiyanto [(1)*]
Email : [(a*)]rezayustiyanto28@gmail.com

A B S T R A K

Tanggungjawab pembangunan desa bukan semata-mata pemerintah saja akan tetapi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pembangunan di desa sangat mempengaruhi bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta hambatan dari masyarakat untuk ikut dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan historis serta konseptual. Dari urian diatas penulis ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa? serta apa yang menjadi hambatan dalam partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat kita lihat dari 4 tahapan: pertama tahap Assesment, kedua tahap alternatif program atau kegiatan, ketiga pelaksanaan (implementasi), keempat adalah evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Kemudian terkait hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah Tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan masih sangat rendah, tingkat komunikasi dari pemerintah ke masyarakat kurang sehingga menyebabkan masyarakat kurang paham apa yang disampaikan, usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan, tingkat penghasilan dan lamanya tinggal didesa mempunyai hubungan dengan keaktifan atau tingkat partisipasi yang tinggi terkait dengan pembangunan di desa.

Kata kunci: Desa, Partisipasi, Pembangunan

A B S T R A C T

The responsibility for village development is not solely the government's, but the community's. Community participation in planning, implementation and evaluation of development in villages greatly influences the direction of government policy in development. The aim of this research is to find out how the community participates in village development and the barriers to community participation in village development. This research uses normative legal research methods with a statutory approach, historical approach and context. From the explanation above, the author wants to know how community participation is in the village development process? and what are the obstacles to community participation? We can see community participation in village development from 4 stages: the first stage is assessment, the second stage is alternative programs or activities, the third is implementation, the fourth is evaluation of the results achieved. Then the obstacles related to community participation in village development are that the level of education of the community in rural areas is still very low, the level of communication from the government to the community is lacking, causing the community to not understand what is being conveyed, age, type of work and level of leadership, income level and length of stay in the village are related to activeness or a high level of participation related to development in the village.

Keywords: *Village, Participation, Devolopment*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
23.02.2025	25.02.2025	22.03.2025	31.03.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan pemerintah mempunyai lebih banyak wewenang untuk melakukan proses perencanaan dan mekanisme yang dapat memastikan kesinambungan pembangunan pemerintah pusat. Pasal 78 ayat (1) UU No 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa pembangunan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas desa, kualitas kehidupan manusia dan pengurangan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan fasilitas dan infrastruktur, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan. Ayat (3)menekankan terkait pentingnya kebersamaan, kekerabatan dan kerjasama partisipasi dalam pembangunan desa untuk mencapai perdamaian sosial dan keadilan.

Keberhasilan dalam pembangunan desa atau kalurahan bukan hanya tanggungjawab pemerintah akan tetapi masyarakat pun ikut bertanggungjawab dalam keberhasilan pembangunan. Arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan perawatan hasil pembangunan desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan desa sebelum adanya aturan terkait partisipasi masyarakat, mengakibatkan kegagalan dalam program pengembangan pemangunan desa. Paradigma politik terkait peran negara dalam kehidupan utara adalah fokus utama dari kebijakan pembangunan desa yang gagal menggabungkan antara aspirasi masyarakat dengan kurangnya tekat yang mengakibatkan tidak adanya keberlanjutan pembangunan.

Menurut beberapa ahli partisipasi dapat didefinisikan sebagai tindakan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedangkan di dalam Kamus Sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau sebagai profesinya sendiri. Keterlibatan itu, dilakukan sebagai konsekuensi dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota komunitas lainnya (Aprilia Theresia, 2014:196). Menurut Isbandi, partisipasi merupakan proses mengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat, mengevaluasi perubahan dalam pengembangan dan pemilihan solusi alternatif dalam pembangunan (Isbandi Rukminto, 2007:26)

Masyarakat merupakan indikator vital dalam pembangunan karena bukan hanya pemerintah yang melakukan proses pembangunan akan tetapi harus melibatkan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan desa tidak terbatas pada investasi saja, tetapi yang lebih penting adalah melalui kebijakan pembangunan yang mendorong berkembangnya pembangunan desa yang dilakukan oleh masyarakat (Ginandjar Kartasasmita, 1977: 153). Lebih lanjut Ginandjar menyatakan bahwa masyarakat itu terletak pada komunitas manusia yang kekal dan abadi yang menempati wilayah tertentu, dan memiliki budaya serta terjalin dalam suatu hubungan diatara anggotanya.

Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi terkait kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat, tanpa kehadiran masyarakat program pengembangan dan proyek-proyek pemerintah tidak akan efektif bahkan cenderung akan gagal;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap proyek atau program pengembangan meningkat ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam proses perencanaan serta persiapan, karena mereka lebih siap untuk menangani proyek dan merasa terlibat;
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Masyarakat mempunyai wewenang untuk menyampaikan saran terkait jenis pengembangan yang akan dilakukan di daerah mereka sendiri (Conyers, 1994: 154).

Berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus pembangunan, oleh karena itu maka tingkat partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebab yang mengetahui kebutuhan pembangunan di daerah tersebut ya masyarakat setempat. Pada intinya adalah bagaimana kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk

memberikan bantuan guna meningkatkan, mempelancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan dalam pembangunan desa.

Perencanaan suatu program merupakan tugas yang menantang sebab program yang baik adalah keselarasan antara kebutuhan dan masalah dari kelompok sasaran program tersebut, semakin beragam dan komplek kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran maka akan semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program. Masyarakat mempunyai karakteristik sendiri-sendiri serta memiliki preferensi dan kebutuhan, kemudian kemampuan masyarakat dalam menganalisis situasi yang dihadapi juga beragam, kemampuan dalam mengambil keputusan juga tidak sama antar warga masyarakat (Aziz Muslim, 2009: 119).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan menurut Tjokromidjojo, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah mengenai arahan, strategi dan kebijakan pembangunan;
2. Partisipasi dalam mengasumsikan akuntabilitas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
3. Proses pemilihan dan pemanfaatan pengembangan secara berkeadilan dan keberlanjutan (Tjokomidjojo, 1998: 104).

Menurut Raharjo, anggaran yang tersedia untuk pembangunan terbatas, tetapi program pengembangan yang direncanakan luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung implementasi program yang ada di masyarakat. Dengan persiapan program pengembangan secara terarah dan harmonis dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan implementasi program pengembangan secara efektif dan efisien, yang berarti distribusi dan alokasi faktor produksi dapat dilakukan secara optimal (Rahardjo, 2006: 34-35).

Berdasarkan urian permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi terhadap pembangunan desa; 2). Apa saja yang menjadi masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; 3). Serta bagaimana cara mengatasi dari permasalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terkait dengan kaidah serta perundang-undangan dalam sistem peraturan hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian-kajian prinsip dasar hukum, aturan hukum serta bagaimana hukum itu diterapkan (Soerjono soekanto, dkk, 2006).

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah 1). Pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu seluruh peraturan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa baik itu Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa serta peraturan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini (Johni Ibrahim, 2007: 300). 2). Pendekatan analisis konsep hukum, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam merujuk prinsip-prinsip hukum yang ada (Mahmud Marzuki, 2024: 134).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa program ini selaras/sesuai dengan konteks sosial-budaya dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara efektif (Ulzikri 2020). Untuk memastikan bahwa inisiatif pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat setempat, oleh karena itu penting untuk melihat kebutuhan masyarakat. Pembangunan

dianggap berhasil ketika seluruh masyarakat dapat menikmati hasinya serta memastikan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan atau ditinggalkan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sangat penting mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta perawatan dan memberikan dukungan moral dan materiil. Dukungan materiil dapat dalam bentuk bantuan keuangan atau sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek pembangunan, sementara dukungan moral bisa dalam bentul penerimaan dan dorongan ide dan saran dari masyarakat kepada pemerintah sebagai pemodal. Mayarakat harus aktif berpartisipasi dalam implementasi pembangunan desa dam tidak boleh acuh tak acuh atau tidak tertarik dalam proses kemajuan desa. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus mencakup partisipasi masyarakat sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan maka penting untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat harus dilihat sebagai fokus utama pembangunan bukan hanya sebagai obyek, sehingga masyarakat diakui keberadaannya sebagai komponen penting dalam pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain. Ini mengisyaratkan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana dalam suatu pembangunan tetapi juga aktif terlibat dalam perencanaan dan kontrol perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan digerakkan oleh masyarakat. Menurut Ndraha partisipasi dibagai dalam 6 tahapan: a) Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial; b) Partisipasi dalam memberikan perhatian/penyerapan dan memberikan respon terhadap informasi, baik menerima maupun menolak; c) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan; d) Partisipasi dalam implementasi operasi pembangunan; e) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangan hasil pembangunan; f) Partisipasi dalam memulai pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana implementasi pengembangan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Ndraha Taliziduhu, 1987: 103).

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain tahun 1980 di Jamaica, menyimpulkan bahwa masyarakat akan tergerak dalam partisipasi jika: Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah diketahui atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat; Partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang terlibat; keuntungan yang diperoleh melalui partisipasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat; Selama proses partisipasi, dipastikan bahwa ada kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat cenderung berkurang ketika individu tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan atau tidak memiliki peran yang ditentukan dalam masyarakat (Ndraha Taliziduhu, 1987).

Partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan menurut Adi dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu: (Merry Onibala ,dkk, 2017: 7-10)

a. Tahap Assesment

Keterlibatan masyarakat secara aktif untuk melihat permasalahan lokal serta mengidentifikasi sumber daya alam lokal, sehingga program pembangunan yang disiapkan oleh pemerintah serta kebutuhan masyarakat dapat serasi. Pertisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat penting untuk kelancaran pengembangan pembangunan. Teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti pembangunan bukan hanya dimulai selama pertemuan perencanaan atau implementasinya, tetapi dalam hal ini masyarakat seharusnya mengidentifikasi masalah pada saat ini.

b. Tahap Alternatif Program atau Kegiatan

Setelah masyarakat terlibat dalam mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut, tahap selanjutnya adalah membantu pemerintah memikirkan masalah dan bagaimana pemerintah dan warga masyarakat dapat mengatasinya dan memikirkan beberapa program alternatif yang diimplementasikan dalam wilayah tersebut. Program yang diterapkan harus berasal dari upaya masyarakat, karena orang -orang yang mengetahui kebutuhan lokal adalah penduduk, dan dari proses mengekstraksi persyaratan penduduk, karena pemerintah

mengimplementasikan program darurat. Misalnya, di daerah jalanan yang menghubungkan antar desa.

c. Tahap pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Pada tahap ini pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Partisipasi masyarakat selama fase implementasi ini membutuhkan energi, uang, atau antusiasme. Aspek sosiologis penduduk memiliki dampak kuat pada keberhasilan pembangunan infrastruktur lokal. Pemerintah selalu bertanggung jawab atas partisipasi masyarakat yang sangat rendah yang disebabkan oleh upah yang terlalu sedikit. Ini masuk akal, tetapi mengharapkan masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam implementasi, karena manfaat pembangunan adalah komunitas itu sendiri.

d. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil)

Pada tahap ini masyarakat diharapkan menggunakan pemantauan laporan tentang program, waktu, dan pengembangan lokal. Kebanyakan orang tidak terlalu peduli dengan penilaian bahwa mereka hanya tertarik pada hasil yang dicapai oleh masyarakat. Dana yang digunakan pada tahap ini adalah tahap terpenting dari kotamadya dan pemerintah, karena mereka mengetahui apakah mereka sudah habis atau jika masih ada sisa makanan. Ini dimaksudkan untuk mencegah korupsi dalam implementasi program pembangunan.

Bentuk Partispasi masyarakat dalam pembangunan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang memiliki tujuan mengembangkan swasembada masyarakat yang dapat dipercaya, aspiratif, representatif, dan bertanggung jawab atas masyarakat. Selain itu adalah ketersediaan, mekanisme perencanaan yang sinergis tergantung kebutuhan masyarakat (Usman Matdoan, 2016: 2). Desa siaga juga merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, terutama pada aspek pengkondisian desa untuk melihat permasalahan yang ada, merencanakan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri, serta selalu siap dalam menghadapi berbagai masalah terutama kesehatan dan kegawat daruratan (Laksana Nuring, 2013: 1).

2. Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pelibatan pembangunan oleh pemerintah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti usia, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah komunikasi, kepemimpinan dan lamanya tinggal di desa. Penelitian yang dilakukan oleh Suroso terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelibatan masyarakat dalam pembangunan, di mana pendidikan, usia, komunikasi dan kepemimpinan menunjukkan adanya tingkat pelibatan masyarakat yang berbeda. Pendapatan dan lama tinggal di desa menunjukan tidak ada perbedaan dalam partisipasi pembangunan desa (Suroso Hadi, dkk, 2014: 7-15).

Permasalahan yang timbul akibat implementasi pembangunan desa yang melibatkan masyarakat dan pemerintah sangat banyak dan kompleks. Skripsi Dadang Vickram terkait faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: (Dadang Vikram, 2010: 49-50) (a) Pemerintah desa yang kurang aktif dalam pembinaan masyarakat; (b) Masyarakat tidak aktif dan acuh tak acuh terhadap pembangunan, meraka berasumsi bahwa pambangunan desa adalah tanggungjawab pemerintah; (c) Kurangnya transparasi dalam penggunaan dana proyek pembangunan; (d) Bangunan – bangunan yang dihasilkan tidak memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat. Bahkan ada pembangunan yang tidak terselesaikan; (e) Sering terjadi salah paham antar warga masyarakat pada saat musyawarah desa (musydes); (f) Sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung menyebabkan kecemburuan sosial antar warga masyarakat; (g) Rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sering tidak sesuai target yang diinginkan karena keterbatasan sumber pendanaan yang terbatas.

Dari faktor penghambat diatas dapat ditarik beberapa inti terkait faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibedakan

menjadi dua, yaitu: (Suroso hadi, 2014: 10-13).

a. **Faktor Internal**
   1) Usia, partisipasi masyarakat dan usia. Orang yang berusia lebih dari 40 tahun dianggap lebih tinggi tingkat partisipasinya dibandingkan kaum muda alasannya adalah kaum muda merasa enggan terhadap orang yang lebih tua dari dirinya.
   2) Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tingkat pengetahuan masyarakat mempengaruhi input yang diberikan selama pembahasan pembangunan, tingkat pengetahuan seseorang sangat dipengaruhi oleh pendidikan seseorang.
   3) Jenis pekerjaan masyarakat, pada jenis pekerjaan tertentu akan lebih tinggi tingkat partisipasi dalam pembangunan desa karena mereka akan meluangkan waktu untuk berpartisipasi. Sektor pekerjaan masyarakat yang akan meluangkan waktu adalah pada sektor pertanian, kemudian sektor pekerjaan yang tidak bisa meluangkan waktu adalah jenis pekerjaan industri.
   4) Tingkat penghasilan penduduk, semakin tinggi penghasilan maka partisipasi yang lebih tinggi dalam pembangunan asumsinya adalah mereka tidak lagi mencari tambahan penghasilan. Dalam hal berpartisipasi dalam bentuk materiil.
   5) periode tinggal di wilayah tersebut, semakin lama seseorang tinggal dalam suatu wilayah maka tingkat partisipasi dalam pembangunan desa akan lebih tinggi karena mereka merasa memiliki atau rasa memiliki terhadap lingkungan sangat tinggi. Sehingga mereka lebih aktif dalam pembangunan untuk kemajuan wilayahnya.

b. Faktor Eksternal
   1) Komunikasi, karena komunikasi intensif antar warga masyarakat maupun warga masyarakat dengan pemerintah, antara sistem masyarakat dan sosial sistem eksternal menunjukan bahwa ada komunikasi yang intensif sangat mempengaruhi pelibatan masyarakat dalam pembangunan.
   2) Kepemimpinan, seorang pemimpin harus mempengaruhi dan menghimbau bawahan, terbuka terhadap pandangan baru, menanggapi kebutuhan bawahannya, serta mendukung inovasi yang disampaikan. Selain itu proses pembelajaran dan dampak kegiatan yang terkait dengan tugas warga masyarakat. Kehadiran buku panduan sangat penting untuk mempengaruhi masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pengembangan desanya.

Asep Nurwanda berpendapat hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa terdiri dari 5 (lima) dimensi. Dimensi tersebut, yakni: (Asep Nurwanda, 2016: 34-35)

a. Partisipasi pikiran

   Aspek hambatan partisipasi pikiran dari tokoh masyarakat desa dalam pembangunan fisik dapat diketahui bahwa hambatan yang ada karena pelaksanaan rapat musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) terkadang masih harus mempertimbangkan pembangunan jalan yang menjadi skala prioritas.

b. Partisipasi tenaga

   Sebagian besar masyarakat tidak memberikan partisipasi dalam pembangunan fisik, karena masih banyak warga yang tidak hadir karena urusan mereka baik kesibukan maupun ikatan kerja lainnya sehingga masih banyak warga yang kurang berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga.

c. Partisipasi keahlian

   Dalam penunjukan tenaga ahli setempat dalam pembangunan fisik di desa, tidak ditemukan hambatan yang berarti pada aspek penunjukan tenaga ahli Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dalam pembangunan fisik di Daerah.

d. Partisipasi barang

Pemberian alat kerja manual dalam pembangunan fisik yang ada di Desa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam memberikan alat kerja manual lebih memilih membawa yang berkualitas kurang.

e. Partisipasi uang

Partisipasi berupa dana melalui ajuan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik dapat diketahui bahwa tidak ditemukan hambatan yang berarti, kalau masalah non teknis seperti menunggu.

KESIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dalam 4 tahap yaitu:

a. Tahap Assesment

Warga masyarakat dilibatkan secara aktif untuk melihat permasalahan yang terjadi diwilayah setempat serta mengidentifikasi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh wilayah tersebut, sehingga program pembangunan yang disiapkan oleh pemerintah maupun dari pandangan masyarakat dapat tepat sasaran. Peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran pembangunan desa.

b. Tahap Alternatif Program atau Kegiatan

Setelah Masyarakat ikut terlibat dalam pengidentifikasian masalah yang ada diwilayahnya tahap selanjutnya adalah dengan melibatkan warga masyarakat berpikir tentang cara mengatasi masalah serta memikirkan beberapa alternatif program yang direncanakan akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Program yang akan dilaksanakan harus dari aspirasi-aspirasi masyarakat setempat karena yang mengetahui kebutuhan wilayah tersebut adalah warga setempat, dari proses penggalian aspirasi warga maka pemerintah akan melaksanakan program yang mendesak.

c. Tahap pelaksanaan atau kegiatan

Pada tahap ini pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan program yang sebelumnya telah direncanakan agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan ini sangat dibutuhkan baik itu tenaga, uang maupun semangat. Aspek sosiologis warga sekitar sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur wilayah tersebut, pemerintah selalu disalahkan karena partisipasi masyarakat sangat rendah yang diakibatkan oleh upah yang terlalu sedikit.

d. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil)

Pada tahap ini masyarakat diharapkan ikut mengawasi laporan kegiatan dari mulai program, waktu maupun dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan diwilayah tersebut. Kebanyakan masyarakat tidak terlalu peduli dengan evaluasi yang mereka pedulikan hanya hasil yang didapatkan oleh masyarakat. Evaluasi merupakan tahap yang paling penting diperhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah karena pada tahap ini akan mengetahui dana yang digunakan apakah habis atau masih ada sisa, ini untuk mencegah adanya korupsi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan masih sangat rendah, tingkat komunikasi dari pemerintah ke masyarakat kurang sehingga menyebabkan masyarakat kurang paham apa yang disampaikan. Usia, pekerjaan, kepemimpinan dari tokoh masyarakat, penghasilan dan lamanya tinggal didesa mempunyai hubungan dengan keaktifan atau tingkat partisipasi yang tinggi terkait dengan pembangunan di desa.

REFERENSI

[1] Aprilia Thresia, 2014, *"Pembangunan Berbasis Masyarakat"*, Bandung: Alfabeta.

[2] Asep Nurwanda, *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)",* Makalah, 2016.

[3] Aziz Muslim, 2009, *"Metedologi Pengembangan Masyarakat"*, Yogyakarta: Teras Kompleks Gowok Blok D 2 No 186.

[4] Conyers, 1994, *"Perencanaan Sosial (Suatu Pengantar)"*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

[5] Dadang Vickram, *"Problematika Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sebangar kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis"*, Skripsi, 2010.

[6] Ginandjar Kartasasmita, 1977, *"Administrasi Pembangunan"*, Jakarta:Pustaka LP3ES.

[7] Hadi Suroso dkk, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik"*, Jurnal Wacana Vol 17 No 1, 2014.

[8] Isbandi Rukminto Adi, 2007, *"Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan"*, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press.

[9] Johni Ibrahim, 2007, *"Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif"*, Malang: Bayumedia Publishing.

[10] Laksana, Nuring Septyasa, *"Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"*, Jurnal kebijakan dan manajemen publik, 2013.

[11] Mahmud, Peter Marzuki, 2024, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana

[12] Matdoan, Usman, *"Peranan Program Pnpm-Mandiri Pedesaan Dalam Mendorong Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal"* Biosel: Biology Science and Education, Vol 14 No 3, 2016.

[13] Merry Onibala dkk, *"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Minahasa, Kawangkoan Utara Kabupaten"*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol 2 No 2, 2017.

[14] Ndraha, Taliziduhu, 1987, *"Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas"*, Jakarta: Bina Aksara.

[15] Putra, Candra Kusuma, *"Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)"*, Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 No 6, 2013.

[16] Rahardjo Adisasmita, 2006, *"Pembangunan Desa Partisipatif"*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Cetakan Pertama.

[17] Sandra Hasba dan Syahrul, *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan: KasusKelurahan Bungguosu Konawe"*, Jurnal Shautut Tarbiyah Ed ke-38 Th. XXIV Mei 2018.

[18] Suroso, Hadi,dkk, *"Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik"*, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17 No 1, 2014.

[19] Tjokromidjojo, B, 1998, *"Perencanaan Pembangunan"*, Jakarta: CV Haji Masagung.

[20] Ulzikri, Ahmad Robi. 2020. "Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis Dalam Kasus Eksploitasi Pasir Di Perairan Krakatau Lampung Selatan)." *Jurnal Public Policy* 6(2):56. doi: 10.35308/jpp.v6i2.1994.

Vol. 4, No. 1, Maret 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

#KaburAjaDulu: Analisis Fenomena Media Sosial sebagai Ekspresi Kekecewaan Masyarakat terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Keadilan di Indonesia

Asep Koswara [(1,a)*], Lina Herlina [(2,b)]
[(1)]Magister Manajemen, IKOPIN University, Jatinangor, Indonesia
[(2)]Magister Religious Studies, UIN Bandung, Bandung, Indonesia
Email : [(a*)]aspkosw@gmail.com, [(b)]tehlinaherlin@gmail.com

A B S T R A K

Fenomena #KaburAjaDulu mencerminkan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong tren ini, peran media sosial dalam membangun narasi kritik sosial, respons pemerintah dan masyarakat, serta dampaknya terhadap persepsi publik mengenai masa depan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi terhadap unggahan di platform media sosial seperti X (Twitter), TikTok, threads, facebook dan Instagram, serta kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan. Analisis temuan penelitian ini dihubungkan dengan teori sosial, terutama dalam melihat bagaimana perubahan sosial dan ekspresi ketidakpuasan masyarakat terjadi melalui media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa #KaburAjaDulu dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi, sulitnya akses terhadap pekerjaan, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Media sosial berperan dalam mempercepat penyebaran kritik sosial dan memperkuat wacana ketidakadilan. Respons pemerintah cenderung defensif, sementara masyarakat terpolarisasi antara yang mendukung atau mengkritik tren ini. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
.

Kata kunci: KaburAjaDulu, Fenomena Sosial, Kritik Sosial, Media Sosial

A B S T R A C T

The #KaburAjaDulu phenomenon reflects the growing public concern over economic, social, and justice-related conditions in Indonesia. This study aims to analyze the driving factors behind this trend, the role of social media in shaping narratives of social criticism, government and public responses, and its impact on public perceptions of Indonesia's future. The research employs content analysis of posts on social media platforms such as X (Twitter), TikTok, Threads, Facebook, and Instagram, as well as a literature review of relevant previous studies. The analysis of the research findings is linked to social theories, particularly in understanding how social change and public dissatisfaction are expressed through digital media. The findings indicate that #KaburAjaDulu is influenced by economic instability, limited access to employment, and dissatisfaction with government policies. Social media plays a crucial role in accelerating the spread of social criticism and reinforcing narratives of injustice. The government's response tends to be defensive, while the public is polarized between those who support and those who criticize this trend. These findings are expected to provide insights for policymakers in formulating more responsive measures to address public concerns.

Keywords: *#KaburAjaDulu, Social Criticism, Social Media, Social Phenomenon*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
23.02.2025	27.02.2025	28.03.2025	31.03.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Media sosial telah menjadi ruang ekspresi utama bagi masyarakat dalam menyuarakan opini, kritik, serta keresahan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Di era digital ini, media sosial bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana mobilisasi opini publik yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satu fenomena terbaru yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia adalah tren #KaburAjaDulu, yang viral di berbagai platform seperti X, TikTok, dan Instagram. Tagar ini menjadi simbol kekecewaan, terutama di kalangan generasi muda, terhadap berbagai isu dalam negeri seperti tingginya tingkat pengangguran, kenaikan biaya hidup, serta ketidakpastian ekonomi dan sosial.

Fenomena #KaburAjaDulu muncul dalam konteks ketidakstabilan ekonomi yang terus berlanjut pascapandemi COVID-19. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara biaya hidup terus meningkat tanpa diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang memadai. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 masih berada di angka 5,45%, yang mengindikasikan kesulitan akses terhadap lapangan pekerjaan bagi banyak individu, terutama di kalangan fresh graduate. Selain itu, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani isu sosial dan ekonomi semakin memicu masyarakat untuk mencari peluang di luar negeri.

Tagar #KaburAjaDulu juga beriringan dengan tagar #IndonesiaGelap, yang semakin memperkuat narasi bahwa banyak orang merasa pesimis dengan kondisi bangsa ini. Dalam berbagai unggahan media sosial, warganet menyoroti berbagai faktor yang menyebabkan mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, mulai dari ketidakadilan dalam sistem hukum, korupsi yang masih merajalela, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin nyata. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan dan kondisi sosial. Pratama, Febrianita, & Chairil (2023) menegaskan bahwa kritik sosial yang berkembang di media sosial dapat menjadi alat bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan tekanan terhadap pemerintah.

Selain itu, fenomena ini juga semakin ramai dibicarakan berkat peran influencer dan content creator yang membagikan pengalaman mereka bekerja, kuliah, atau merintis usaha di luar negeri. Dengan kemudahan akses informasi dan inspirasi dari mereka yang sudah berhasil menetap di luar negeri, semakin banyak masyarakat yang mempertimbangkan opsi migrasi sebagai solusi terhadap kondisi sulit di dalam negeri. Media sosial, dalam hal ini, berperan sebagai katalis yang mempercepat penyebaran informasi dan membentuk persepsi kolektif tentang kehidupan yang lebih baik di luar negeri.

Melihat dinamika ini, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana fenomena #KaburAjaDulu merepresentasikan keresahan sosial masyarakat Indonesia serta bagaimana media sosial menjadi medium utama dalam penyebarannya. Dengan analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dampak fenomena ini terhadap kebijakan publik dan pola pikir masyarakat Indonesia.

2. Identifikasi Masalah

Seiring dengan semakin masifnya tren #KaburAjaDulu, muncul beberapa pertanyaan yang perlu dikaji lebih dalam, seperti:

a) Apa yang menjadi faktor utama di balik munculnya tren ini?
b) Bagaimana media sosial berperan dalam membentuk narasi kritik sosial terkait kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di Indonesia?
c) Bagaimana tanggapan pemerintah dan masyarakat terhadap tren ini?
d) Apa dampak dari tren ini terhadap persepsi masyarakat terhadap masa depan Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a) Menganalisis faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena #KaburAjaDulu di media sosial.
b) Mengkaji peran media sosial dalam menyebarkan kritik sosial terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di Indonesia.
c) Mengidentifikasi reaksi pemerintah dan masyarakat terhadap tren ini.
d) Menilai implikasi fenomena ini terhadap kebijakan publik dan dinamika sosial masyarakat Indonesia.

4. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada beberapa kajian terdahulu yang relevan. Cahyono (2016) menyoroti pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial di Indonesia, sementara Susanto (2018) membahas bagaimana media sosial dapat memengaruhi kebijakan publik dan kinerja badan publik. Studi oleh Pratama, Rahman, & Bachmid (2022) mengulas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam perspektif hak asasi manusia, yang relevan dalam konteks tren #KaburAjaDulu.

Selain itu, permasalahan ketenagakerjaan yang menjadi salah satu faktor utama munculnya fenomena ini juga telah dikaji dalam berbagai penelitian. Suhandi, Wiguna, & Quraysin (2021) membahas dinamika ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia, sedangkan Malik (2018) meneliti dinamika pasar tenaga kerja Indonesia. Dalam perspektif hubungan tenaga kerja, Subijanto (2011) menyoroti peran negara dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan mengacu pada berbagai literatur terbaru dan data empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena #KaburAjaDulu dan implikasinya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan keadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap berbagai unggahan di media sosial terkait fenomena #KaburAjaDulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna, persepsi, dan konteks sosial yang melatarbelakangi tren ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui interpretasi data yang berasal dari berbagai sumber.

Penelitian ini tidak melibatkan wawancara sebagai metode pengumpulan data, melainkan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari unggahan media sosial di berbagai platform seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram. Analisis dilakukan dengan mengkategorikan tema-tema yang muncul dalam unggahan tersebut, mengidentifikasi narasi dominan, serta mengeksplorasi reaksi publik dan respons pemerintah terhadap tren ini. Metode ini merujuk pada pendekatan Krippendorff (2018) dalam analisis isi yang menekankan pada identifikasi pola komunikasi dalam teks dan media digital.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kajian pustaka untuk mendukung analisis data yang telah diperoleh. Kajian pustaka dilakukan dengan mengacu pada berbagai jurnal dan literatur terkini yang membahas kritik sosial di media sosial (Pratama et al., 2023), perubahan sosial akibat media digital (Cahyono, 2016), serta kebebasan berekspresi di dunia maya (Pratama et al., 2022). Dengan menggabungkan analisis isi dari media sosial dan tinjauan literatur akademik (Ulzikri 2022), penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena #KaburAjaDulu dalam konteks kondisi sosial, ekonomi, dan keadilan di Indonesia.

Analisis data dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan

pola dan makna dalam fenomena yang sedang diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat induktif, yakni berasal dari temuan di lapangan dan dikonseptualisasikan dalam teori sosial yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

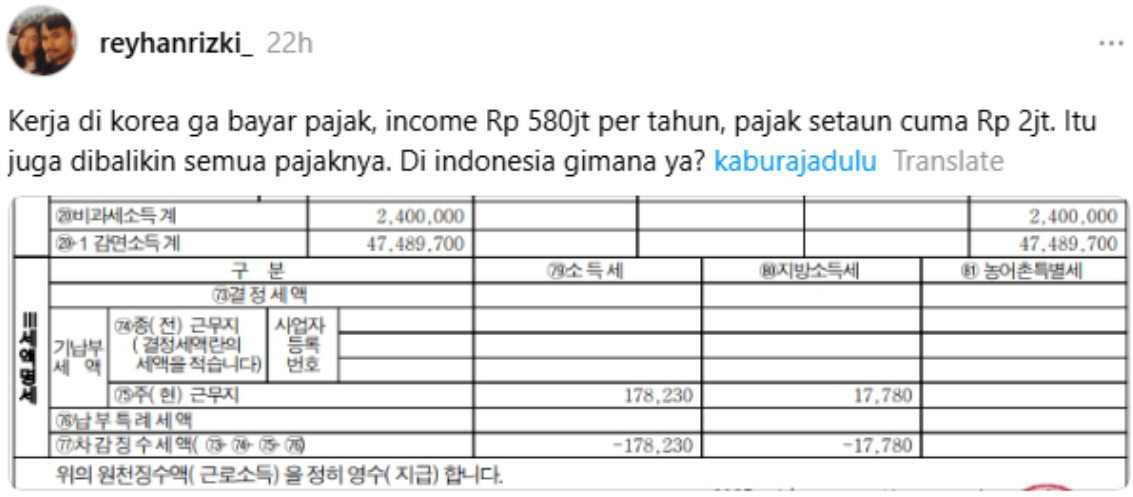
Fenomena #KaburAjaDulu mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di Indonesia. Tren ini tidak hanya menjadi viral di media sosial, tetapi juga menimbulkan diskusi yang lebih luas mengenai stabilitas negara dan masa depan anak muda. Dalam bagian ini, akan dibahas faktor utama yang mendorong munculnya tren ini, peran media sosial dalam membentuk narasi kritik sosial, serta respons pemerintah dan masyarakat terhadap fenomena tersebut. Selain itu, pembahasan juga akan menyoroti dampak tren ini terhadap persepsi masyarakat mengenai masa depan Indonesia, termasuk potensi migrasi tenaga kerja dan perubahan pola pikir generasi muda.

1. Faktor Utama di Balik Munculnya Tren #KaburAjaDulu

Tren #KaburAjaDulu menjadi perbincangan hangat di media sosial, mencerminkan keresahan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap berbagai tantangan yang dihadapi di dalam negeri. Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan representasi dari ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Berikut adalah beberapa faktor utama yang melatarbelakangi tren ini.

a. Ketidakstabilan Ekonomi dan Kesempatan Kerja yang Terbatas

Salah satu pemicu utama munculnya #KaburAjaDulu adalah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang. Data dari Suhandi, Wiguna, & Quraysin (2021) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi, terutama di kalangan lulusan baru. Banyaknya PHK, batasan usia dalam rekrutmen, serta rendahnya standar gaji dibandingkan biaya hidup yang terus meningkat menjadi alasan kuat bagi banyak individu untuk mencari peluang kerja di luar negeri.



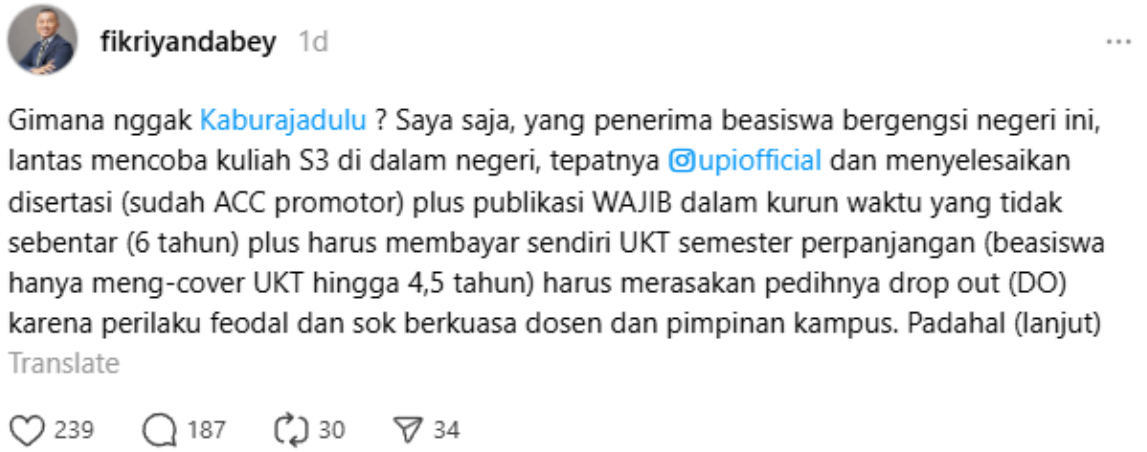
Gambar 1. Postingan media sosial @reyhanrizki_

Sebagai contoh, pengguna thread @reyhanrizki_ mengungkapkan bahwa bekerja di Korea dengan pendapatan Rp 580 juta per tahun hampir tidak dikenai pajak, sementara di Indonesia pajak penghasilan sangat membebani. Perbandingan ini semakin memperjelas mengapa banyak pekerja memilih hengkang ke luar negeri.

b. Sistem Pendidikan yang Tidak Ramah bagi Mahasiswa dan Akademisi

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia juga menjadi faktor yang mendorong individu untuk mencari peluang di luar negeri. Beberapa mahasiswa dan akademisi mengalami tekanan struktural

yang menghambat perkembangan akademis mereka. Contohnya, cuitan @fikriyandabey menyoroti pengalaman pahitnya sebagai penerima beasiswa yang harus membayar biaya tambahan di luar beasiswa dan bahkan mengalami drop out akibat kebijakan akademik yang feodal.



Gambar 2. Postingan media sosial @fikriyandabey

Penelitian Pratama, Febrianita, & Chairil (2023) dalam Jurnal Interaksi juga mengungkapkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh praktik birokrasi yang tidak efisien, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan akademisi.

c. Ketimpangan Pajak dan Kesejahteraan Sosial

Sistem perpajakan di Indonesia juga menjadi pemicu utama fenomena ini. Banyak pekerja merasa bahwa beban pajak yang tinggi tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Seperti yang diceritakan oleh @reyhanrizki_, di beberapa negara seperti Korea Selatan, pajak lebih ringan dan sering kali dikembalikan kepada pekerja dalam bentuk layanan sosial. Selain itu, standar gaji kerja di luar ngeri juga dianggap biisa memberikan tabungan yang lebih banyak sehingga mendukung kesejahteraan para pekerjanya. Misalnya postingan dari akun instagram @oppawilly berikut ini:



Gambar 3. Postingan media sosial IG @oppawilly

Penelitian Malik (2018) mengenai pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan antara pajak yang dibayarkan dan layanan publik yang diterima menjadi faktor yang menurunkan loyalitas pekerja terhadap negara. Hal ini membuat mereka lebih memilih mencari pekerjaan di negara dengan sistem pajak yang lebih menguntungkan.

d. Budaya Kerja yang Feodal dan Minimnya Mobilitas Sosial

Faktor lain yang turut memperparah tren ini adalah budaya kerja di Indonesia yang masih dipenuhi dengan hierarki yang kaku dan minimnya kesempatan untuk berkembang. Dalam dunia akademik maupun korporasi, banyak pekerja merasa sulit untuk naik jabatan tanpa relasi yang kuat dengan atasan.

Menurut penelitian Cahyono (2016) dalam Publiciana, budaya kerja di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh relasi kuasa dan bukan pada meritokrasi. Hal ini berakibat pada stagnasi karier bagi banyak pekerja muda yang merasa usahanya tidak diapresiasi.

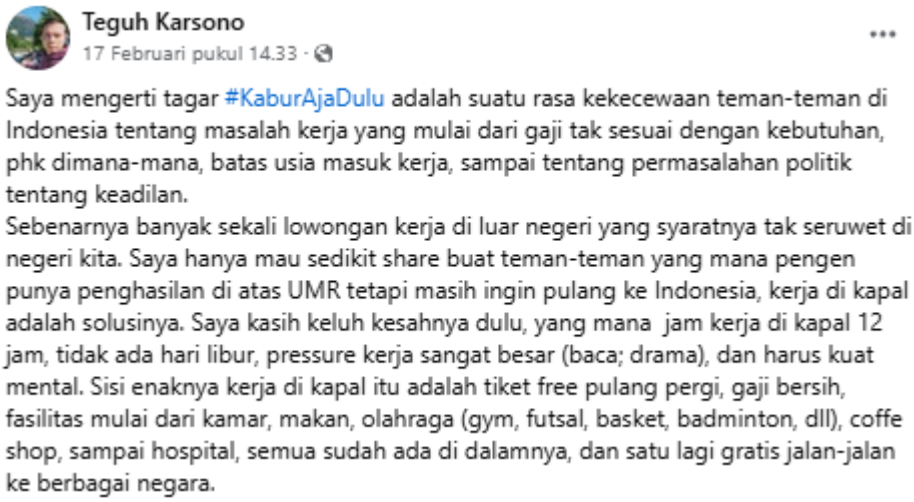
e. Politik dan Ketidakadilan Sosial

Ketidakstabilan politik dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat juga menjadi alasan banyak individu ingin mencari kehidupan yang lebih stabil di luar negeri. Teguh Karsono dalam komentarnya di media sosial menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tenaga kerja yang tidak berpihak kepada pekerja lokal.

Menurut Abduh & Cangara (2022) dalam Jurnal Nomosleca, kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat semakin meningkat seiring dengan maraknya diskusi di media sosial. Hal ini mempercepat lahirnya keputusan individu untuk meninggalkan Indonesia dan mencari negara yang dianggap lebih menjanjikan.

f. Peluang Kerja di Luar Negeri yang Lebih Menjanjikan

Banyaknya kesempatan kerja di luar negeri yang menawarkan gaji tinggi serta fasilitas yang lebih baik dibandingkan di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Teguh Karsono, bekerja di kapal dapat memberikan penghasilan bersih yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan di dalam negeri, bahkan bagi pekerja dengan posisi terendah sekalipun.



Gambar 4. Postingan media sosial Facebook @ Teguh Karsono

Subijanto (2011) dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan peluang yang tersedia di dalam negeri telah mendorong peningkatan migrasi tenaga kerja ke luar negeri.

g. Pengaruh Media Sosial sebagai Katalisator Tren

Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarluaskan narasi #KaburAjaDulu. Informasi tentang kesempatan kerja, pengalaman buruk di dalam negeri, serta keuntungan hidup di luar negeri semakin mudah diakses.

Penelitian Susanto (2018) menyoroti bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang kritik terhadap kebijakan publik dan sebagai alat untuk membangun opini publik. Bahkan kini ada banyak model yang digunakan seperti meme politik (Sandya, 2016). Hal ini mempercepat penyebaran tren seperti #KaburAjaDulu dan semakin mempengaruhi keputusan individu untuk meninggalkan Indonesia.

Fenomena #KaburAjaDulu bukan sekadar tren media sosial, melainkan refleksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Faktor ekonomi, ketimpangan pajak, sistem pendidikan, budaya kerja yang feodal, serta kebijakan pemerintah yang

dianggap tidak berpihak menjadi alasan utama di balik meningkatnya minat untuk bekerja atau melanjutkan hidup di luar negeri. Dengan meningkatnya perbincangan ini di media sosial, semakin jelas bahwa banyak individu yang merasa tidak lagi memiliki masa depan yang menjanjikan di dalam negeri.

2. Peran Media Sosial dalam Membentuk Narasi Kritik Sosial #KaburAjaDulu

Media sosial menurut Zempi (2023) telah menjadi alat yang sangat kuat dalam membentuk narasi kritik sosial, termasuk dalam tren #KaburAjaDulu. Tagar ini mencerminkan kekecewaan dan frustrasi banyak individu terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Media sosial, dengan sifatnya yang cepat dan luas jangkauannya, memainkan peran krusial dalam menyebarluaskan isu-isu ini dan membentuk opini publik.

a. Media Sosial sebagai Ruang Ekspresi dan Mobilisasi

Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan TikTok telah menyediakan ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan pengalaman pribadi dan pendapat mereka terkait permasalahan sosial. Sebagai contoh, unggahan dari akun @fikriyandabey menggambarkan bagaimana sistem pendidikan yang feodal dan ketidakadilan akademik dapat menyebabkan seseorang memilih untuk meninggalkan negeri ini. Unggahan ini kemudian mendapatkan ribuan interaksi dan dibagikan secara luas, memperkuat narasi bahwa kondisi akademik di Indonesia tidak kondusif bagi mereka yang ingin berkembang.

Selain itu, media sosial memungkinkan munculnya solidaritas di antara individu dengan pengalaman serupa. Narasi tentang ketidakadilan pajak, seperti yang diungkapkan oleh @reyhanrizki_, menunjukkan bagaimana pengguna media sosial dapat membandingkan kebijakan ekonomi antarnegara dan menciptakan diskusi yang lebih luas mengenai reformasi kebijakan pajak di Indonesia.

b. Algoritma dan Viralitas sebagai Penguat Isu

Algoritma media sosial memiliki peran besar dalam mempercepat penyebaran narasi kritik sosial. Platform seperti Twitter dan TikTok mempromosikan konten yang memiliki engagement tinggi, seperti like, retweet, dan komentar. Hal ini menyebabkan isu-isu seperti #KaburAjaDulu menjadi trending dan menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat.

Menurut penelitian Cahyono (2016), media sosial telah bertransformasi menjadi katalis perubahan sosial, di mana kelompok masyarakat dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi sosial dengan lebih efektif. Algoritma platform secara tidak langsung memperkuat isu-isu yang dianggap relevan oleh banyak orang, mempercepat pembentukan opini publik.

c. Media Sosial sebagai Pemantik Perubahan Kebijakan

Ketika sebuah narasi kritik sosial menjadi viral di media sosial, pemerintah dan institusi terkait sering kali dipaksa untuk memberikan respons. Tagar #KaburAjaDulu, misalnya, telah menarik perhatian publik mengenai rendahnya kesejahteraan pekerja, ketidakpastian pekerjaan, hingga regulasi yang dianggap merugikan generasi muda.

Dalam penelitian Abduh & Cangara (2022), disebutkan bahwa media sosial mampu memberikan tekanan politik yang signifikan terhadap pengambil kebijakan. Ketika kritik menjadi diskusi publik yang meluas, pemerintah sering kali harus merespons dengan kebijakan atau klarifikasi. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berperan sebagai wadah ekspresi tetapi juga sebagai alat advokasi bagi kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan.

Media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk narasi kritik sosial, termasuk dalam tren #KaburAjaDulu. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman, mempercepat penyebaran informasi melalui algoritma, dan memberikan tekanan terhadap kebijakan pemerintah, media sosial telah menjadi alat yang ampuh dalam menyoroti berbagai permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya penggunaan

media sosial, kekuatan platform ini dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan sosial semakin tidak bisa diabaikan.

3. Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Tren #KaburAjaDulu dalam Perspektif Teori Sosial

Tren #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial mencerminkan fenomena sosial yang lebih kompleks, bukan sekadar aksi spontan warga yang ingin pergi ke luar negeri. Menurut Kompas.com (2025), pemerintah telah merespons maraknya tren #KaburAjaDulu. Berbagai tanggapan dari pemerintah menunjukkan perbedaan sudut pandang, dari yang mendukung dengan syarat tertentu hingga yang mengkritik keras fenomena ini. Untuk memahami lebih dalam, mari kita analisis respons ini menggunakan beberapa teori sosial.

a. Migrasi sebagai Keputusan Rasional (Teori Rational Choice – Gary Becker, 1976)

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa keputusan merantau bisa menjadi langkah positif asalkan dilakukan dengan persiapan keterampilan dan mengikuti prosedur resmi. Hal ini sesuai dengan teori Rational Choice, di mana individu cenderung membuat keputusan berdasarkan kalkulasi keuntungan dan kerugian.

Dalam konteks ini, warga yang memilih "kabur" tidak semata-mata ingin melarikan diri, tetapi lebih karena melihat peluang ekonomi yang lebih baik di luar negeri. Jika mereka memiliki keterampilan dan bekerja secara legal, maka keputusannya akan memberikan manfaat jangka panjang. Sebaliknya, tanpa persiapan, migrasi bisa menjadi pilihan yang berisiko tinggi dan merugikan.

b. Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi (Teori Push and Pull Migration – Everett Lee, 1966)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melihat tren #KaburAjaDulu sebagai tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Pandangan ini selaras dengan teori Push and Pull Migration, yang menjelaskan bahwa migrasi terjadi karena kombinasi faktor pendorong (push factors) dan faktor penarik (pull factors).

- **Faktor pendorong (*push factors*):** Upah rendah, kesempatan kerja terbatas, ketidakstabilan ekonomi di Indonesia.
- **Faktor penarik (*pull factors*):** Gaji lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, serta kesempatan mengembangkan keterampilan di luar negeri.

Dari perspektif ini, tren #KaburAjaDulu sebenarnya bukan sekadar pelarian, tetapi lebih kepada pencarian peluang yang lebih menjanjikan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah adalah meningkatkan daya saing tenaga kerja di dalam negeri agar masyarakat tidak merasa perlu "kabur" untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

c. Partisipasi Sosial dan Sikap Patriotisme (Teori Civic Engagement – Robert Putnam, 1995)

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menilai tren #KaburAjaDulu sebagai bentuk sikap permisif dan kurangnya patriotisme dalam menyelesaikan masalah bangsa. Perspektif ini dapat dikaitkan dengan teori Civic Engagement, yang menekankan bahwa masyarakat yang terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan politik memiliki peran penting dalam membangun negara.

Menurut Nusron, alih-alih memilih untuk "kabur," masyarakat seharusnya terlibat dalam perbaikan kondisi di dalam negeri. Namun, di sisi lain, tren ini juga dapat dianggap sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi.

d. Peran Media Sosial dalam Membangun Narasi Sosial (Teori Social Construction of Reality – Berger & Luckmann, 1966)

Fenomena #KaburAjaDulu menjadi viral bukan hanya karena adanya keinginan individu untuk merantau, tetapi juga karena media sosial yang memperkuat narasi tersebut. Teori Social

Construction of Reality menjelaskan bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara alami, melainkan dibangun melalui interaksi dan diskusi publik. Ketika semakin banyak orang membagikan pengalaman dan alasan mereka ingin pergi ke luar negeri, persepsi bahwa "kabur" adalah solusi terbaik semakin menguat. Dalam hal ini, pemerintah yang tidak mengelola narasi dengan baik bisa semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

e. Respons Pemerintah yang Tidak Serius (Teori Kebijakan Publik – Thomas Dye, 2012)

Salah satu tanggapan paling kontroversial datang dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang mengatakan, "Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi." Pernyataan ini menunjukkan ketidakseriusan dalam memahami fenomena sosial yang sedang terjadi.

Dalam teori kebijakan publik, kebijakan yang baik harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Jika pemerintah meremehkan tren ini, maka mereka akan gagal dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi faktor pendorong yang membuat masyarakat ingin meninggalkan Indonesia.

Berdasarkan berbagai tanggapan pemerintah dan masyarakat, tren #KaburAjaDulu bukan hanya sekadar tren viral, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang lebih dalam.

- Dari perspektif individu, keputusan untuk merantau adalah pilihan rasional yang didorong oleh faktor ekonomi dan kesempatan kerja di luar negeri.
- Dari perspektif pemerintah, tren ini menyoroti tantangan dalam menciptakan lapangan kerja dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas di dalam negeri.
- Dari perspektif sosial, media sosial memainkan peran besar dalam membentuk narasi yang memperkuat tren ini.

Oleh karena itu, tanggapan pemerintah harus lebih dari sekadar pernyataan reaktif. Diperlukan kebijakan yang lebih konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka tidak perlu memilih "kabur" sebagai satu-satunya solusi.

4. Dampak Tren #KaburAjaDulu terhadap Persepsi Masa Depan Indonesia

a. Pengantar: Fenomena #KaburAjaDulu dan Maknanya

Tren media sosial #KaburAjaDulu mencerminkan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Hashtag ini sering digunakan oleh individu yang ingin mencari peluang lebih baik di luar negeri, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, atau gaya hidup. Namun, tren ini juga memunculkan perdebatan mengenai bagaimana persepsi terhadap masa depan Indonesia terbentuk akibat meningkatnya keinginan untuk merantau ke luar negeri.

Dalam perspektif teori komunikasi massa (McQuail, 2010), tren ini dapat dianggap sebagai bagian dari konstruksi realitas sosial yang dipengaruhi oleh media. Media sosial berperan sebagai ruang diskursus di mana aspirasi dan keluhan masyarakat diungkapkan secara terbuka, membentuk pemahaman kolektif tentang ketimpangan peluang dalam negeri dibandingkan luar negeri.

b. Dampak terhadap Kepercayaan Generasi Muda

Generasi muda merupakan pilar utama pembangunan bangsa. Namun, tren #KaburAjaDulu menunjukkan bahwa banyak dari mereka merasa lebih optimis terhadap peluang di luar negeri dibanding di dalam negeri. Ketidakpuasan terhadap gaji rendah, sulitnya memperoleh pekerjaan layak, dan ketidakpastian politik menjadi faktor utama di balik fenomena ini. Akibatnya, muncul persepsi bahwa Indonesia bukan tempat terbaik untuk berkembang, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi semangat kebangsaan dan kepercayaan diri kolektif.

Dalam teori anomi Emile Durkheim (1897), fenomena ini dapat dijelaskan sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara harapan individu dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Ketika masyarakat mengalami disorientasi akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik, individu cenderung mencari jalan keluar yang lebih menjanjikan, termasuk migrasi ke luar negeri.

c. Hubungan dengan Fenomena Brain Drain

Secara sederhana, brain drain atau human capital flight mengacu pada perpindahan kaum intelektual, ilmuwan, dan cendekiawan dari negara asal mereka untuk menetap di luar negeri. Tren #KaburAjaDulu memiliki potensi untuk mempercepat fenomena ini, di mana tenaga kerja terampil memilih untuk mencari peluang di luar negeri ketimbang berkontribusi di dalam negeri. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang menarik talenta kembali ke Indonesia (brain gain), maka negara bisa mengalami perlambatan inovasi dan kehilangan daya saing dalam ekonomi global.

Teori migrasi tenaga kerja (Todaro, 1976) menjelaskan bahwa migrasi terjadi ketika ada perbedaan signifikan dalam kesempatan ekonomi antara negara asal dan negara tujuan. Dalam konteks ini, Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan mampu menciptakan insentif bagi tenaga kerja berbakat untuk tetap bertahan atau kembali ke tanah air setelah memperoleh pengalaman di luar negeri.

Beberapa negara seperti India dan Tiongkok telah menghadapi masalah serupa di masa lalu. Namun, mereka berhasil mengatasi brain drain dengan menciptakan ekosistem ekonomi dan teknologi yang mampu menarik kembali profesional yang telah berkarier di luar negeri. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari strategi ini untuk mencegah dampak negatif dari meningkatnya migrasi tenaga kerja terampil.

d. Implikasi terhadap Kebijakan dan Pembangunan Nasional

Pemerintah harus melihat tren ini sebagai sinyal bahwa terdapat permasalahan struktural yang perlu segera diselesaikan. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi dampak negatif dari #KaburAjaDulu meliputi:

- Meningkatkan kualitas lapangan kerja: Pemerintah perlu menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan gaji kompetitif dan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan keterampilan.
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan riset: Negara yang memiliki sistem pendidikan tinggi yang kuat dan mendukung inovasi dapat mempertahankan talenta terbaiknya.
- Memberikan insentif bagi tenaga profesional untuk kembali ke Indonesia: Program seperti fasilitas pajak, hibah riset, dan peluang bisnis dapat menjadi daya tarik bagi mereka yang telah bekerja di luar negeri.
- Meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi: Dalam teori legitimasi politik (Lipset, 1959), stabilitas politik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi niat untuk mencari peluang di luar negeri.

Tren #KaburAjaDulu bukan sekadar tren media sosial, tetapi cerminan dari pergeseran pola pikir generasi muda Indonesia terhadap masa depan mereka. Jika tidak ditangani dengan baik, fenomena ini dapat berkontribusi terhadap brain drain dan memperlambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan inovasi, sehingga Indonesia tetap menjadi tempat yang menarik bagi talenta-talenta terbaiknya.

KESIMPULAN

Fenomena #KaburAjaDulu di media sosial mencerminkan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di Indonesia. Analisis terhadap tren ini menunjukkan bahwa banyak individu, terutama generasi muda, merasa kurang optimis terhadap masa depan di dalam negeri dan lebih memilih mencari peluang di luar negeri. Faktor utama yang mendorong fenomena ini meliputi ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan sosial, serta ketidakpercayaan terhadap institusi negara dalam menyediakan lapangan kerja dan kesejahteraan yang layak. Dari perspektif teori sosial, fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori ketidakpuasan relatif (relative deprivation theory), di mana individu membandingkan kondisi mereka dengan standar yang lebih baik di luar negeri, sehingga memicu keinginan untuk migrasi.

Meskipun fenomena ini memperlihatkan kritik sosial yang kuat, penelitian ini juga menemukan bahwa gerakan #KaburAjaDulu bukan sekadar bentuk eskapisme, tetapi juga mencerminkan dinamika ekonomi global, di mana mobilitas tenaga kerja menjadi semakin umum. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, seperti kurangnya data kuantitatif yang mendalam mengenai jumlah individu yang benar-benar melakukan migrasi setelah menyuarakan aspirasi mereka di media sosial. Selain itu, dampak jangka panjang dari tren ini terhadap pembangunan nasional masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana eksodus tenaga kerja potensial mempengaruhi ekonomi dan stabilitas sosial Indonesia.

Ke depan, diperlukan penelitian lebih lanjut yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami motivasi individu yang berpartisipasi dalam gerakan ini, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Selain itu, analisis lebih dalam mengenai peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap peluang di dalam dan luar negeri juga menjadi aspek penting yang perlu diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi ketidakpuasan masyarakat dan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tempat yang layak untuk berkembang.

REFERENSI

[1] Abduh, I. M., & Cangara, H. (2022). Kritik Sosial Kebijakan Pemerintah dalam Platform Media Sosial dengan Pendekatan Komunikasi Hyperpersonal. Jurnal Nomosleca, 8(1), 91-100.

[2] Becker, Gary S. (1976). The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago Press.

[3] Berger, Peter L., & Luckmann, Thomas. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.

[4] Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Publiciana, 9(1), 140-157.

[5] Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

[6] Dye, Thomas R. (2012). Understanding Public Policy (14th ed.). Boston: Pearson.

[7] Kompas.com. (2025, February 17). Ketika pemerintah tanggapi ramainya tagar #KaburAjaDulu. Kompas. https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/02/17/205255788/ketika-pemerintah-tanggapi-ramainya-tagar-kaburajadulu

[8] Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.

[9] Lee, Everett S. (1966). A Theory of Migration. Demography, 3(1), 47-57.

[10] Malik, N. (2018). Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia (Vol. 1). UMMPress.

[11] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage publications

[12] Pratama, A. C. J., Febrianita, R., & Chairil, A. M. (2023). Kritik Sosial Pada Pemerintah. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(2), 185-198.

[13] Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-16.

[14] Putnam, Robert D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6(1), 65-78.

[15] Sandya, A. P., Rakhmad, W. N., & KOm, M. I. (2016). Hubungan Intensitas Penggunaan Jejaring Sosial dan Faktor Pendorong Kehadiran Publik terhadap Partisipasi Politik dalam Perbincangan Politik Berbentuk Meme. Interaksi Online, 4(3), 1-13.

[16] Subijanto, S. (2011). Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 17(6), 705-718.

[17] Suhandi, S., Wiguna, W., & Quraysin, I. (2021). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan, 1(1), 268-283.

[18] Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. Jurnal Aspikom, 3(3), 379-398.

[19] Susanto, E. H. (2018). Media Sosial, Kebijakan Publik Dan Kinerja Badan Publik. Media dan Komunikasi Politik, 149.

[20] Zempi, C. N., Kuswanti, A., & Maryam, S. (2023). Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat. Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(1), 116-123.

[21] Ulzikri, Ahmad Robi. 2022. “Efektifitas Strategi Kampanye Politik Melalui Media Sosial : Belajar Pada Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSTER)* 1(1):1–13.

Vol. 4, No. 1, Maret 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

The Contributions of Feminist Theory in Advancing the Field of International Relations

Fikram Rettob[(1)*]
Human Rights and International Politics, The University of Glasgow, G12 8QQ, The United Kingdoms
Email: 3012929R@student.gla.ac.uk

ABSTRAK

Teori feminis memperkenalkan perspektif kritis dan transformatif ke ranah internasional, menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang politik global. Mengenali kontribusinya sangat penting untuk menganalisis tantangan global kontemporer secara komprehensif. Studi ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya ide-ide feminis. Meskipun sering terpinggirkan dalam wacana politik dominan tentang maskulinitas, ide-ide feminis memberikan beberapa solusi yang paling adil dan efektif untuk mengatasi masalah global. Perspektif feminis menantang struktur kekuasaan tradisional, mengadvokasi keadilan gender, dan mempromosikan inklusivitas dalam pengambilan keputusan politik. Dengan memeriksa kontribusi ini, penelitian ini berupaya untuk menekankan pentingnya mengintegrasikan pendekatan feminis ke dalam kerangka politik global. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, studi ini didasarkan pada analisis konten asli dan cara deduktif, memanfaatkan sumber-sumber yang kredibel, termasuk buku, jurnal peer-review, artikel ilmiah, dan pernyataan tertulis resmi. Melalui pendekatan ini, studi ini menggarisbawahi perlunya teori feminis dalam membangun lanskap politik global yang lebih adil dan seimbang..

Kata kunci: Politik, Feminis, Kekuasaan, Internasional.

ABSTRACT

Feminist theory introduces a critical and transformative perspective to the international sphere, offering a nuanced understanding of global politics. Recognising its contributions is essential for comprehensively analysing contemporary global challenges. This study aims to highlight the significance of feminist ideas. Despite often being marginalised in dominant political discourses of masculinity, feminist ideas provide some of the most equitable and effective solutions for addressing global issues. Feminist perspectives challenge traditional power structures, advocate for gender justice, and promote inclusivity in political decision-making. By examining these contributions, this research seeks to emphasise the importance of integrating feminist approaches into global political frameworks. Utilising a qualitative methodology, the study is grounded in original content analysis and deductive way, drawing upon credible sources, including books, peer-reviewed journals, scholarly articles, and official written statements. Through this approach, the study underscores the necessity of feminist theory in constructing a more just and balanced global political landscape.

Keywords: *Politics, Feminist, Power, International.*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
23.02.2025	27.02.2025	29.03.2025	31.03.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

INTRODUCTION

Since the cessation of World War II on August 15, 1945, the discipline of international relations has undergone extensive expansion and intellectual evolution (Erdelja & Koulouri, 2009). The unprecedented destruction and immense human suffering resulting from the conflict served as a critical impetus for scholars to formulate theoretical frameworks aimed at preventing the recurrence of such global catastrophes. Liberal theorists, for instance, emphasize international cooperation as a fundamental mechanism for conflict mitigation and the promotion of global stability. Conversely, realist scholars contend that such cooperation is primarily a strategic instrument employed by dominant states to safeguard their hegemonic interests and exert influence over weaker entities (Rosyidin, 2022). Despite their theoretical prominence, these paradigms are predicated on traditional assumptions that have systematically marginalized women and other underrepresented groups in global political structures. As a result, such exclusionary tendencies have entrenched systemic inequalities, obstructed the realization of equitable justice, and disproportionately disadvantaged women and other vulnerable communities on the international stage.

In response to these epistemological and structural deficiencies, feminist scholars have sought to reconceptualize the discourse of international relations by placing the rights, experiences, and contributions of women and other historically marginalized groups at the centre of analysis. Their scholarship interrogates entrenched power hierarchies and advocates for a more inclusive and equitable analytical framework that challenges hegemonic structures within global governance. Feminist perspectives have substantially contributed to the advancement of international relations by offering incisive critiques of conventional power relations, advocating for the recognition and prioritization of marginalized voices(Ulzikri 2023), and broadening the conceptualization of security beyond state-centric and militaristic dimensions to include human security and socio-economic well-being. Additionally, feminist theorists have introduced the concept of intersectionality, highlighting the interconnectedness of gender, race, class, and other social categories in shaping global inequalities. Furthermore, they critically examine neoliberalism as a primary mechanism of exploitation that exacerbates socio-economic disparities, particularly in the Global South, while also challenging the dominance of Western epistemologies in international relations. By advocating for decolonial approaches and pluralistic perspectives, feminist scholars seek to dismantle hierarchical global power structures and foster a more just, inclusive, and equitable world order. Through these interventions, feminist international relations theory not only enriches the discipline’s theoretical landscape but also provides a transformative vision for reimagining global politics in ways that are more reflective of diverse lived experiences and structural realities.

METHODOLOGY

In this research, the author uses a qualitative approach as a method to collect data that is used as a source for this research. A qualitative approach is research that focuses on natural events or symptoms. Fundamental and naturalistic qualitative research must be carried out in the field or library study rather than in a lab. As a result, this kind of research is often called field study or naturalistic inquiry. According to Bogdan and Biklen, qualitative research is a method that generates descriptive data from people's written or spoken words as well as their observable behaviours; it takes a holistic approach to the environment and the individual (Bogdan & Biklen, 1982).

In social science, qualitative research is a specific tradition that primarily depends on observing people in their local context and communicating with them using their language and vocabulary. Furthermore, qualitative quality or characteristics is referred to as the empirical element, or the actual human existence, which encompasses all that lies behind the patterns of attitudes and

behaviours that characterize bio-social people. According to Rachmat Kriyantono, the purpose of qualitative research is to explain the phenomena that occur in society by collecting data in-depth and completely (Andayani, 2017). There are three stages in conducting qualitative research (Fiantika, 2022). These stages are data collection and description. This stage explains how the data was found and describes the information obtained, namely describing what was read or seen, heard, and felt in passing. Another is data reduction (combination). This step carries out the process of reducing information obtained at the collection and description stage to focus on certain problems. The last is data selection. This stage describes the problem as a focus that has been set in more detail, then conducts an in-depth analysis of the focus of the problem. The results obtained are in the form of themes that are constructed based on data obtained from the field into knowledge or even new theories. To deepen the author's analysis, the author will use a content analysis style in a deductive way. Content analysis is the scientific study approach that is used to objectively and methodically examine textual, visual, or auditory data to find certain patterns, themes, meanings, or structures within the material (Fife & Gossner, 2024). The main goal of content analysis is to understand and interpret the patterns, meanings, and messages contained in particular journals, books, websites, and critical news and then select the most relevant ones to prove the author's hypothesis. In short, it is an approach from general to specific. This way is often used in qualitative methods, which often help the author in finding conclusions from many arguments.

DISCUSSION AND FINDING

The contributions of feminist theory to international order.

Reconceptualizing Power and Advancing the Recognition and Protection of Marginalized Groups' Rights.

Feminist theory provides a critical reassessment and reconceptualization of power within the field of International Relations, challenging the traditionally masculinist paradigms that have emphasized state-centrism, militarization, and hierarchical structures of authority. By interrogating these dominant frameworks, feminist scholarship advances a more nuanced and multidimensional perspective on power, one that is relational, intersectional, and embedded within broader social, economic, and cultural contexts. As Simone de Beauvoir posits in The Second Sex, women's social positioning and identity are shaped by a complex interplay of historical, economic, and cultural forces, which collectively contribute to their systemic marginalisation within societal structures (Beauvoir, 2009). This theoretical perspective carries significant implications for International Relations, a discipline historically centred on state sovereignty and the pursuit of national interests. Feminist scholars challenge this hierarchical model, arguing that the inherently global nature of international relations necessitates a more inclusive analytical framework, one that incorporates the diverse and intersecting concerns of all actors, particularly those who have been historically marginalised or excluded from political and policy-making processes (Kumar, 2023).

Feminist perspectives advocate for the recognition and prioritization of these often-overlooked interests, asserting that global justice and equitable policymaking can only be realised through the intentional inclusion of marginalized voices and the dismantling of entrenched power asymmetries within the international system. This concept, which feminist scholars refer to as relational power, emphasizes the interconnected nature of power dynamics and highlights the necessity of integrating

diverse perspectives into global governance structures. Consequently, the roles, contributions, and active engagement of marginalized groups, particularly women, have received growing recognition within international discourse. Women now play an increasingly prominent role in global governance, actively contributing to international organizations such as the United Nations and participating in the formulation and implementation of foreign policy at the state level. (Tong, 2018). This shift is exemplified by the appointment of Sheikha Haya of Bahrain as the fourth female President of the United Nations General Assembly in 2006. Similarly, in 2007, Nancy Pelosi was elected as the first female Speaker of the United States House of Representatives, while Betty Boothroyd became the first female Speaker of the British House of Commons (Kumar, 2023). These milestones reflect a gradual erosion of male dominance in high-ranking political positions and key decision-making roles in international affairs.

Beyond advocating for inclusivity, feminist perspectives also place significant emphasis on the concept of human security. This approach expands the traditional, state-centred definition of security, which has historically been primarily concerned with military threats and external violence. Feminist scholars argue that security must be redefined to encompass broader social and economic dimensions, including the protection of women from structural and systemic violence, economic disparities, and political exclusion. By reframing security in this way, feminist theorists seek to construct a more holistic and equitable framework for international relations, one that prioritizes the well-being and agency of all individuals rather than solely focusing on the strategic interests of states.

Broadening the Concept of Security.

Feminist scholars contend that the traditional definition of security must be expanded to encompass a wider range of concerns, particularly those affecting women in their daily lives. This redefined conceptualization of security transcends the traditional military- centric paradigm, advocating for a more comprehensive approach that prioritizes the protection of women's health, education, and access to essential resources—fundamental components that safeguard their well-being, dignity, and overall security. In her foundational work, Mary Wollstonecraft contends that women's subjugation does not stem from inherent inferiority but rather from systemic barriers to education. She argues that while men and women may demonstrate distinct cognitive abilities and societal functions, these differences are predominantly the result of unequal educational opportunities afforded to each gender from an early age. Consequently, Wollstonecraft asserted that gender disparities are not innate but are socially constructed and reinforced through institutionalized educational frameworks (Slijepčević & Vilić, 2023). To rectify this imbalance and empower women, she critically examined how gender bias is entrenched within educational systems and advocated for structural reforms aimed at equipping women with the necessary tools to assert their rights and participate in decision-making processes at both national and international levels (Slijepčević & Vilić, 2023).

As a direct result of sustained feminist advocacy and intellectual contributions, gender equality and the protection of women’s rights have progressively been integrated into national and international legal frameworks, policies, and institutional mechanisms. Feminist interventions have been instrumental in shaping legal provisions, policy initiatives, and social programs designed to address deeply entrenched gender inequalities that have historically relegated women to subordinate positions across multiple spheres of life (Dugis, 2016). These policies aim to redress gender-based disparities not only within the public domain, by promoting increased political participation, equitable employment

opportunities, and improved access to justice—but also within the private sphere, which includes the protection of women from domestic violence, gender-based violence, and economic exploitation (Tong, 2018). The incorporation of gender-sensitive policies within both public and private spheres represents a significant paradigm shift, recognizing gender inequality as a multifaceted and systemic issue that extends beyond the state to encompass domestic and interpersonal dimensions. This holistic approach highlights the imperative of addressing both structural disparities and individual rights, emphasizing the need for coordinated initiatives at the global, national, and local levels to promote a more just and equitable society for women. The evolving discourse on security reflects an emerging international consensus that achieving gender justice requires a holistic, intersectional framework that actively dismantles systemic barriers to equality and prioritizes the protection and empowerment of marginalized groups.

The Concept of Intersectionality in Feminist Scholarship.

Feminist scholars have significantly advanced the understanding of the underlying causes of violence against women by introducing the concept of intersectionality. Originally developed by legal scholar Kimberlé Crenshaw, this analytical framework elucidates the interconnections between various social identities and their role in shaping women's experiences of violence and discrimination. Crenshaw's seminal research, which primarily explores the intersection of race and gender, underscores how Black women face a distinct and intensified form of oppression compared to white women due to the compounded effects of both racism and sexism. Her study demonstrates that the lived experiences of Black women cannot be fully understood through an isolated examination of either racial or gender-based discrimination. Instead, these dimensions function concurrently, producing unique forms of marginalization that are not experienced in the same way by white women (Crenshaw, 1989).

This theoretical model has since been critically examined and reinterpreted by scholars such as Jennifer C. Nash, who challenges Crenshaw's approach, particularly regarding the legal rights of Black women within American constitutional law. Nash contends that Crenshaw's framework does not entirely account for the complexities of multiple and overlapping systems of oppression. While Crenshaw's intersectional analysis predominantly focuses on race and gender, Nash argues that additional dimensions of identity, including socioeconomic status, sexual orientation, and skin colour, must also be integrated to capture the diverse and intricate ways in which violence and discrimination manifest (Nash, 2008). According to Nash, restricting intersectionality to a binary focus on race and gender risks oversimplifying the multifaceted nature of oppression, thereby overlooking how various social categories interact to produce distinct experiences of marginalisation among different groups of women. Thus, Nash's reinterpretation of intersectionality advocates for a broader and more dynamic understanding that acknowledges the multiplicity of identities women hold and how these intersecting factors shape their exposure to violence and systemic inequality. This expanded framework calls for more comprehensive approaches to addressing gender-based violence, recognising the interplay of intersecting forms of discrimination, including but not limited to race, class, gender, and sexuality.

Intersectionality provides a critical alternative paradigm for analysing the multidimensional causes of women's subjugation within the global landscape. It urges

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

policymakers, both within international institutions and at the level of nation-states, to adopt more nuanced, multidimensional strategies in combating gender-based inequalities and violence. By acknowledging that women's experiences of oppression are influenced not solely by gender but also by intersecting identities such as race, class, ethnicity, sexual orientation, disability, and immigration status, intersectionality challenges conventional single-axis approaches to policy formulation and advocacy. This perspective necessitates the development of policies that are attuned to the complexities of women's lived experiences, ensuring that interventions effectively address the compounded effects of multiple forms of discrimination.

An example of the institutional application of intersectionality can be observed in the United Nations integration of this framework into its gender equality initiatives. The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted in 2015, reflects a commitment to an inclusive, intersectional approach by emphasising the principle of "leaving no one behind" (United Nations, 2015). This framework explicitly recognises how intersecting dimensions of inequality shape women's access to education, healthcare, and economic opportunities, particularly among marginalized populations such as Indigenous women, women with disabilities, and migrant women. Goal 5 of the Sustainable Development Goals (SDGs) aims to achieve gender equality and empower all women and girls while also acknowledging the distinct challenges encountered by those who experience compounded marginalization due to intersecting forms of oppression (United Nations, 2015).

Moreover, intersectionality has emerged as a vital analytical tool in addressing contemporary global crises, such as forced migration and displacement. International organizations such as the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) have increasingly incorporated intersectionality into their approaches to protecting female refugees (Baillot & Connelly, 2018). Research has demonstrated that refugee women, particularly those from marginalized racial or ethnic backgrounds, face distinct forms of violence and exploitation, including sexual violence, human trafficking, and systemic barriers to accessing essential services. These challenges cannot be adequately addressed without acknowledging the complex interplay of gender, race, immigration status, and socioeconomic vulnerability (Baillot & Connelly, 2018). Consequently, international institutions have developed more tailored and culturally sensitive policies that recognize the compounded vulnerabilities faced by refugee women and implement targeted interventions to address their specific needs.

In addition to its influence on institutional policies, intersectionality has played a pivotal role in feminist advocacy and activism. One prominent example is the #SayHerName movement, which emerged in response to the disproportionate violence inflicted upon Black women in the United States. The movement, which was spearheaded by Kimberlé Crenshaw alongside other feminist scholars and activists, underscores the intersection of race and gender in experiences of police brutality and systemic violence against Black women (Crenshaw et al., 2015). The campaign has drawn attention to how racialized misogyny manifests in law enforcement practices, exposing a long-standing pattern of violence that had been largely overlooked within mainstream feminist and racial justice discourses (Richardson, 2016). The #SayHerName movement exemplifies how intersectionality serves as a tool for advocacy, challenging dominant narratives and ensuring that the voices of those experiencing compounded forms of oppression are heard and addressed within social justice movements.

Ultimately, intersectionality provides a transformative lens through which scholars, policymakers, and activists can analyse and address gender-based oppression more holistically and inclusively. By recognizing the intersecting dimensions of discrimination that women face, this framework facilitates the development of more comprehensive and

Responsive policies and advocacy strategies. The application of intersectionality within contemporary international policies and feminist movements demonstrates its capacity to drive systemic change, fostering a deeper understanding of the multifaceted nature of women's experiences of marginalization and resistance.

Neoliberalism as a Mechanism of Exploitation.

Feminist critiques of neoliberalism emphasize its role in sustaining the exploitation of women within the global labour market and exacerbating economic inequalities resulting from neoliberal economic policies. Neoliberalism, characterized by market liberalization, deregulation, privatization, and a reduced state role in welfare provision, has been critically examined by feminist scholars as a system that disproportionately impacts women, particularly those from marginalized communities (Pearson & Elson, 2015). By prioritizing profit maximization and market-driven economic expansion, neoliberal policies frequently undermine social welfare, labour rights, and gender equity. These policies have contributed to the feminization of labour, wherein the increasing dependence on female workers in low-wage and precarious employment across global supply chains has deepened gender disparities by failing to address the specific vulnerabilities faced by women (Ylostalo, 2022).

A central feminist critique of neoliberalism is its perpetuation of exploitative labour conditions for women in the global economy. Women, particularly those in the Global South, are often relegated to low-wage, informal, and unstable employment sectors, such as garment production, domestic labour, and agricultural work, where they experience substandard working conditions, excessive hours, and a lack of job security (Wilson, 2015). The global outsourcing of labour, driven by neoliberal economic policies, has facilitated the relocation of manufacturing jobs to regions with lower production costs, resulting in the disproportionate employment of women under exploitative conditions. For example, in the garment industry, female workers in countries such as Bangladesh, Cambodia, and Vietnam face hazardous working environments, insufficient wages, and systemic violations of labour rights (Revolution, 2014). These women, despite their significant contribution to the global economy, remain vulnerable to exploitation and abuse, as their labour is undervalued and often unprotected by legal frameworks. The expansion of the fast fashion industry exemplifies this dynamic, wherein the commodification of women's labour generates substantial profits for multinational corporations while failing to ensure fair remuneration or workplace protections for female workers.

Moreover, neoliberal economic policies have exacerbated gender inequalities by undermining social welfare systems and failing to establish sufficient protections for workers. Feminist scholars contend that the neoliberal focus on austerity measures and market-oriented policy approaches has resulted in substantial reductions in public services, including healthcare, education, and childcare, disproportionately affecting women (Dabrowski, 2021). As women frequently assume primary caregiving responsibilities within households and communities, the erosion of social safety nets exacerbates their economic vulnerability, particularly for those who already experience marginalization due to intersecting factors such as race, ethnicity, and socioeconomic status. The dismantling of state support mechanisms heightens women's susceptibility to poverty and economic insecurity, further entrenching structural inequalities. In response, feminist critics advocate for a fundamental re-evaluation of global economic policies, calling for a shift away from neoliberalism towards economics.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Frameworks that prioritize social welfare, gender equality, and poverty reduction. These alternative policy frameworks aim to address the structural foundations of gender inequality by ensuring that economic systems do not perpetuate the exploitation of women but instead promote their empowerment through equitable wages, labor protections, and fair access to resources. Feminist organizations and activists emphasize the importance of implementing living wages for women workers, enforcing labor regulations to prevent gender-based violence in the workplace, and acknowledging the economic significance of unpaid care work, which continues to be disproportionately performed by women (Win, 2019). Initiatives such as the International Labour Organization's Convention 190 on Violence and Harassment in the Workplace and UN Women's advocacy for gender-responsive economic policies represent critical efforts to challenge neoliberal economic paradigms and centre women's rights within global development agendas (Aslikyan, 2024).

Furthermore, transnational feminist movements, including Women's Global Strike and the International Women's Alliance, have advocated for economic policies that recognise the intersectional dimensions of gender, class, and race in shaping women's experiences of labour exploitation and inequality (Gupta, 2019). These movements emphasise the necessity of comprehensive economic reforms that address the redistribution of unpaid care work, ensure access to essential public services such as healthcare and education, enforce equal pay policies, and implement gender-sensitive social protections. Such measures are particularly crucial for safeguarding the rights of marginalised women, including migrant workers, women of colour, and those residing in rural areas, who are disproportionately affected by neoliberal economic structures.

Feminist critiques of neoliberalism ultimately contend that global economic policies must be restructured to prioritize social justice, gender equality, and poverty alleviation rather than reinforcing exploitative economic systems. By advocating for an intersectional and multidimensional approach to economic reform, feminist scholars and activists seek to establish a more just global economic order—one that recognizes and values women's labour, ensures equitable access to fundamental resources, and guarantees dignified work and social security. Such a transformative shift would not only contribute to women's economic empowerment but also advance broader efforts toward achieving social equity and sustainable economic development.

Challenging Western Hegemony in Knowledge Production and International Relations.

Since its establishment, the field of International Relations has been largely shaped by the intellectual traditions of Western Europe and the United States. As Connell (2007) argues in Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science, dominant academic institutions in global metropoles maintain epistemic control, systematically marginalizing and overlooking intellectual contributions from regional and national scholarly communities outside the Western sphere. This Eurocentric epistemological framework is particularly evident in the foundational theoretical paradigms of International Relations, such as realism, liberalism, and idealism, which are deeply rooted in Western historical and cultural contexts (Mann & Huffman, 2005). These theories often fail to adequately reflect the lived realities of populations in other regions, particularly those in the Global South, Asia, and Africa, thereby reinforcing a knowledge hierarchy that privileges Western perspectives while disregarding alternative epistemologies.

The implications of this epistemological dominance are far-reaching. Knowledge generated within Western institutions is frequently perceived as both legitimate and universal, whereas the intellectual traditions and indigenous knowledge systems of non-Western societies, such as those in Africa, Asia, and Latin America, are often marginalized or dismissed as peripheral (Alvarez, 1999). This paradigm perpetuates a narrow and exclusionary understanding of global politics that neglects the complexity and diversity of

perspectives outside the Western world. By positioning Western theoretical frameworks as the default mode of analysis, this hegemonic approach constrains the scope of international relations scholarship and limits the inclusion of alternative ontologies and methodologies.

Feminist theory critically examines the Western-centric epistemological foundations of International Relations by challenging the presumed universality of Western knowledge claims, which are often used to justify interventions in the Global South and the Middle East (Mahmood, 2008). Feminist scholars argue that such assertions frequently erase the voices of marginalized communities, particularly women, whose lived experiences and priorities are subordinated to Western narratives of progress, civilization, and liberation (Mahmood, 2008). A prominent example is the discourse surrounding the so-called "war on terror" in the Middle East, where Western military interventions have been framed as efforts to protect women from oppressive regimes. However, this justification frequently disregards the agency and perspectives of women in the region, many of whom view these interventions as exacerbating existing socio-political crises rather than addressing them. Rather than centring the voices of local women, Western powers often impose external solutions that fail to account for the historical, cultural, and political complexities of the societies they claim to assist.

This example illustrates how Western-dominated approaches to International Relations reinforce a top-down model of knowledge production and intervention, in which the perspectives of individuals and communities in the Global South, particularly women, are either silenced or misrepresented. Feminist theory provides a critical counter-narrative to these hegemonic frameworks by advocating for a more inclusive and pluralistic understanding of global politics, one that incorporates the diverse and intersecting experiences of all actors within the international system. By challenging the epistemic dominance of Western scholarship, feminist theorists advance an alternative framework that seeks to decolonise knowledge production and promote a more equitable and representative discourse on global affairs.

The Significance of Feminist Contributions to International Relations

Feminist scholarship has significantly reshaped the field of International Relations by providing a critical perspective that challenges dominant theoretical paradigms while advocating for inclusivity, justice, and a more comprehensive understanding of global dynamics. Traditionally, the study of International Relations has been influenced by frameworks grounded in masculinist perspectives, which have shaped the discipline's core assumptions and analytical approaches (Kumar, 2023). Feminist theory disrupts these traditional approaches by advocating for gender-inclusive decision-making processes at both national and international levels. This paradigm shift is instrumental in redefining the nature of power and governance, fostering political and institutional structures that are more representative and equitable. By critiquing the systematic exclusion of women and other marginalized groups, feminist scholars push for structural reforms that acknowledge diverse lived experiences, ensuring that international relations theories and policies are grounded in equity and inclusivity. Through this engagement, feminist theory not only reshapes theoretical discourse but also bridges the gap between academic analysis and real-world policy implementation.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Feminist perspectives critically challenge the predominance of elite-driven narratives that contribute to the marginalization of underrepresented voices and the reinforcement of systemic inequalities. By foregrounding the experiences of those historically excluded from dominant discourse, feminist scholarship enhances the study of global politics by advocating for more inclusive and participatory frameworks (Tong, 2018). Traditional international institutions, often scrutinized for privileging the interests of powerful states and elite actors, are urged to incorporate diverse perspectives into their decision-making processes. Such inclusivity ensures that global governance structures and policies more accurately reflect the lived experiences of individuals and communities that have been historically marginalized within the field of International Relations.

One of the most significant contributions of feminist theory has been its reconceptualization of security within international relations. Conventional security paradigms have largely been state-centric, focusing on sovereignty and military power while neglecting the everyday insecurities faced by individuals. Feminist scholarship broadens this scope by emphasizing human security, which considers issues such as gender-based violence, labour exploitation, and access to essential resources as fundamental to global security. This redefinition shifts the focus from abstract, militarized notions of security to the tangible and intersectional vulnerabilities experienced by marginalized groups, particularly women, whose concerns have often been overlooked in mainstream security discourse.

A key contribution of feminist scholarship is the application of intersectionality, an analytical framework that explores how intersecting identities—such as gender, race, ethnicity, class, and religion, collectively shape distinct experiences of marginalization and oppression (Nash, 2008). Intersectionality requires scholars, policymakers, and institutions to recognize the compounded impact of these overlapping factors. For example, a woman's lived experience is not solely determined by her gender but is also shaped by broader socio-economic and geopolitical contexts, which influence her access to opportunities, resources, and rights. This analytical lens has profound implications for international relations, as it necessitates policy approaches that address multi-layered forms of discrimination. The incorporation of intersectional analysis into global policymaking ensures that responses to systemic inequalities are both equitable and contextually informed.

Feminist critiques also highlight the exploitative dimensions of neoliberalism, particularly its disproportionate impact on women in the Global South. The neoliberal economic framework, characterized by deregulation, privatization, and profit maximization, has exacerbated social inequalities by relying on precarious labour, particularly within industries dominated by female workers. Feminist scholars argue that these exploitative dynamics perpetuate structural inequalities and undermine the dignity and rights of workers (Win, 2019). By exposing these injustices, feminist theorists call upon international relations scholars, policymakers, and global institutions to prioritize labour protections and corporate accountability. These critiques underscore the necessity of economic systems that are not only efficient but also just and equitable, advocating for structural reforms that protect vulnerable populations from economic exploitation.

A final key contribution of feminist scholarship is its critique of the epistemic dominance of Western-centric theories in international relations. Western academic paradigms have historically been presented as universal, marginalizing non-Western knowledge systems and perspectives. Feminist scholars challenge this intellectual hegemony, arguing that it reinforces narrow understandings of global dynamics while sustaining systemic inequalities. By advocating for the decentralization of Western epistemology, feminist theory fosters a more pluralistic and inclusive approach to

International relations, ensure that diverse intellectual traditions and lived experiences inform the discipline (Mahmood, 2008). This epistemic shift encourages greater recognition of non-Western scholarship, thereby disrupting entrenched biases and advancing a more balanced and globally representative discourse.

Collectively, these feminist contributions have profoundly reshaped international relations by introducing more inclusive, equitable, and contextually responsive frameworks. Through critical engagement with dominant power structures, feminist theory has expanded the scope of international relations, advocating for policies that reflect the lived realities of all individuals, particularly those marginalized within traditional paradigms. In doing so, feminist scholarship continues to play a pivotal role in transforming the field into a more just, reflective, and globally conscious discipline.

CONCLUSION

The research finds that the presence of feminist ideas in the international arena has significantly contributed to a more just and comprehensive understanding of gender in global politics. One of the key contributions of feminist theory is the redefinition of power, which was traditionally framed through a masculine lens. Instead of being associated solely with dominance and control, power is now increasingly understood in terms of equality and shared agency. Additionally, feminist perspectives have expanded the concept of security, which was historically centred on public and state-centric concerns, to include the everyday realities of women's lives in both domestic and public spheres.

Furthermore, feminist theory has introduced the concept of intersectionality into international discourse, providing a critical analytical framework for understanding the multifaceted nature of discrimination and violence against women, which were previously attributed to singular causes. Feminist scholars also critique neoliberalism as a source of systemic injustice in the global order, challenging its prioritization of market-driven policies that often exacerbate inequalities. Additionally, feminist perspectives work to decentralize dominant political and theoretical frameworks by challenging the hegemony of Western-centric ideas and advocating for more inclusive, diverse, and contextually relevant approaches. These contributions are essential for constructing a more equitable and nuanced understanding of international politics.

BIBLIOGRAPHY

[1] Alvarez, S. E. (1999). Advocating feminism: The Latin American Feminist NGO 'Boom'. International Feminist Journal of Politics, I(2), 181-209.

[2] Andayani, K. V. (2017). Pengaruh Komunikasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Metoda Clts (Community Led Total Sanitation). Journal JENIUS, 104-113.

[3] Aslikyan, L. (2024). UNDP and ILO collaborate to address violence and harassment in the world of work. Retrieved December 12, 2024, from

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://www.ilo.org/resource/news/undp-and-ilo-collaborate-address-violence-and-harassment-world-work.

[4] Beauvoir, S. d. (2009). The Second Sex. London: Vintage Books.

[5] Connell, R. (2007). Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science (1st Edition ed). Cambridge: Polity Press.

[6] Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. Univer- sity of Chicago Legal Forum , 140, 139–167.

[7] Dabrowski, V. (2021). Neoliberal feminism: Legitimising the gendered moral project of austerity. The Sociological Review, 69(1), 90-106.

[8] Deacon, David, Graham Murdock, Michael Pickering, & Peter Golding. (2021). Researching Communications: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis. London: Bloomsbury Academic.

[9] Dugis, V. (2016). Liberalisme. In V. Dugis (Ed.), Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik (pp. 55-80). Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.

[10] Dusanka Slijepcevi & Dragana Vilic. (2023). Gender (in)equality in (European) society. Technium Social Sciences Journal, 47, 339-354.

[11] Fiantika, F. R. (2022). Metodelogi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), Konsep Dasar Penelitian Kualitatif (pp. 1-15). Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

[12] Deacon, David, Graham Murdock, Michael Pickering, & Peter Golding. (2021). Researching Communications: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis. London: Bloomsbury Academic.

[13] Dugis, V. (2016). Liberalisme. In V. Dugis (Ed.), Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik (pp. 55-80). Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.

[14] Dusanka Slijepcevi & Dragana Vilic. (2023). Gender (in)equality in (European) society. Technium Social Sciences Journal, 47, 339-354.

[15] Fiantika, F. R. (2022). Metodelogi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), Konsep Dasar Penelitian Kualitatif (pp. 1-15). Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

[16] Gupta, N. (2019). Press Release: Women and Gender Rights Activists Deeply Disappointed with Regional Outcome on Human Rights. Retrieved December 12, 2024, from https://apwld.org/press-release-women-and-gender-rights-activists-deeply-disappointed-with-regional-outcome-on-human-rights/

[17] Helen Baillot & Elaine Connelly. (2018, June 5). Women seeking asylum: Safe from violence in the UK. Retrieved December 9, 2024, from https://www.asaproject.org/uploads/Safe_from_violence_in_the_UK._ASAP-RC_report_.pdf

[18] Kimberlé W. Crenshaw, Andrea J. Ritchie, Rachel Anspach, Rachel Gilmer, & Luke Harris. (2015). Say Her Name: Resisting Police Brutality Against Black Women. Columbia Law School , I, 1-43.

[19] Kumar, A. (2023). Feminism: An Alternative Approach to International Relations. Technium Social Sciences Journal, 51, 245-260.

[20] Mahmood, S. (2008). Women's Studies on the Edge. In J. W. Scott (Ed.), Feminism, Democracy, and Empire: Islam and The War of Terror (pp. 81-114). Duke: Duke University Press.

[21] Nash, J. C. (2008). Re-thinking Intersectionality. Feminist Review, 89, 1-15.

[22] Revolution, F. (2014). Exploitation or emancipation? Women workers in the garment industry. Retrieved December 12, 2024, from https://www.fashionrevolution.org/exploitation-or-emancipation-women-workers-in-the-garment-industry/#:~:text=Today%2C%20more%20than%2070%25%20of,and%20having%20basic%20work%20security.

[23] Richardson, A. V. (2016). Teaching #BlackLivesMatter: Media, Race, and Social Movements #SayHerName. Teaching Media Quarterly, IV, 1-5.

[24] Robert Bogdan, & Sari Knopp Biklen. (1982). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Michigan: Allyn and Bacon.

[25] Ruth Pearson, & Diane Elson. (2015). Transcending the impact of the financial crisis in the United Kingdom: towards plan F - a feminist economic strategy. Feminist Review, 109(1), 28-39.

[26] Stephen T. Fife, & Jacob D. Gossner. (2024). Deductive Qualitative Analysis: Evaluating, Expanding, and Refining Theory. International Journal of Qualitative Methods, 23, 1-12.

[27] Susan Archer Mann, & Douglas J. Huffman. (2005). The Decentering of Second Wave Feminism and the Rise of the Third Wave. Science and Society, 69(1), 51-91.

[28] Tong, R. (2018). Feminist Thought A More Comprehensive Introduction (5th Edition ed.). New York: Routledge.

[29]

[30] United Nations. (2015, September 25). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved December 9, 2024, from https://sdgs.un.org/2030agenda United Nations. (2015, September 25). THE 17 GOALS | Sustainable Development. Retrieved December 9, 2024, from https://sdgs.un.org/goals.

[31] Wilson, K. (2015). Towards a Radical Re-appropriation: Gender, Development and Neoliberal Feminism. Development and Change, 46(4), 803-832.

[32] Win, E. (2019). 100 years fighting for decent working conditions and labour equality. Retrieved December 12, 2024, from https://actionaid.org/opinions/2019/100-years-fighting-decent-working-conditions-and-labour-equality

[33] Ylostalo, H. (2022). Feminism at the Crossroads of Neoliberalism and Neoconservatism: Restructuring Women's Labor in the Context of Family Leave Reform in Finland. Oxford University Press, 29(4), 1336–1359.

[34]Ulzikri, Ahmad Robi. 2023. "Politik Dan Bencana : Kajian Rekognisi Hak Masyarakat Di Pulau Terisolir Di Masa Krisis." *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSTER)* 2(1):28–39.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Vol. 4, No. 1, Maret 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah (Konsep Tiga Dimensi Kekerasan Johan Galtung

Yuliana [(1,a)*], Elia Damayanti [(1,b)]
[(1)]Sosiologi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
Email : [(a*)]yuliana168@fisip.upr.ac.id [(b)] elia.damayanti@fisip.upr.ac.id

A B S T R A K

Implikasi dari masyarakat demokratis adalah kebebasan dan kesetaraan, jika semakin mengemuka, maka konflik adalah hal yang biasa karena kekebabasan dan kesetaraan akan memberi ruang pada perbedaan pandangan, bahkan saling berseberangan. Namun konflik menjadi tidak biasa jika berbentuk menjadi kekerasan. Begitupun dengan konflik kelapa sawit antar pihak perusahaan kelapa sawit dan masyarakat di Kalimantan Tengah. Tulisan ini bertujuan memotret secara umum kejadian konflik kelapa sawit yang berbentuk kekerasan melalui konsep 3 dimensi kekerasan Johan Galtung, meliputi kekerasan structural, kekerasan langsung, kekerasan kultural/budaya. Melalui data primer dan dukungan data sekunder tentang konflik sawit di Kalimantan Tengah. Hasil identifikasi, bahwa ke 3 dimensi kekerasan tersebut ditemukan dalam konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah, diantaranya kemiskinan dan soal keluhan Plasma, kriminalisasi dan penembakan hingga kematian, serta ketakutan terhadap polisi dan kekerasan structural atas nama pengamanan dan ketertiban.

Kata kunci: Konflik kelapa sawit; kekerasan; Johan Galtung

A B S T R A C T

The implications of a democratic society are freedom and equality. If this becomes more prominent, then conflict is normal because freedom and equality will give space to differences in views, even opposing each other. However, conflict becomes unusual if it becomes violent. Likewise with the palm oil conflict between palm oil plantation companies and the community in Central Kalimantan. This article aims to take a general picture of violent palm oil conflict incidents using Johan Galtung's 3-dimensional concept of violence, including structural violence, direct violence, cultural violence. Through primary data and secondary data support regarding palm oil conflicts in Central Kalimantan. The results of the identification show that these 3 dimensions of violence were found in the palm oil conflict in Central Kalimantan, including poverty and plasma complaints, criminalization and shootings to death, as well as fear of the police and structural violence in the name of security and order.

Keywords: *Palm oil conflict; violence; Johan Galtung.*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
23.02.2025	27.02.2025	29.03.2025	31.03.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Bagian dari realita yang kita hadapi dari kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah konflik yang terjadi antar masyarakat lokal dan perusahaan kelapa sawit yang dibarengi dengan kekerasan yang dialami masyarakat. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2023 oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bahwa di Indonesia terjadi berupa 525 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat baik perempuan dan laki-laki, 52 kasus orang dianiaya, 3 penembakan, hingga 3 orang meninggal dunia. Sebagaimana yang terjadi baru-baru ini secara khusus di Kalimantan Tengah yaitu kekerasan pada konflik kelapa sawit yang menyebabkan tewasnya salah seorang petani di Seruyan, Kalimantan Tengah, akibat bedil aparat keamanan saat menagih janji plasma dari perusahaan perkebunan PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) yang tidak kunjung diberikan.

Menurut kronologi (Iman Herdiana, 2023) aksi masyarakat Desa Bangkal dilakukan dari 16 September hingga 25 September 2023. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Seruyan dan Komandan Distrik Militer 1015 Sampit hadir dalam pertemuan mereka dengan perwakilan perusahaan. Ini adalah lanjutan dari perjanjian tahun 2013 antara PT HMBP dan warga Desa Bangkal, di mana mereka dijanjikan untuk memberikan 2 hektare per kepala keluarga. Selain meminta plasma, warga juga meminta lahan seluas 1.175 hektare yang tidak diizinkan oleh HGU PT HMBP untuk dikelola oleh masyarakat.

PT HMBP adalah cucu dari perusahaan Best Capital Investment, salah satu dari tiga anak perusahaan grup tersebut. Dari pertemuan tersebut ternyata antar pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai tuntutan penduduk Desa Bangkal untuk mendapatkan 20 persen kebun plasma. Warga juga menghadapi mobilisasi tentara dan polisi. Kasus baru tersebut, menambah daftar panjang kasus kekerasan dalam konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah sebagaimana yang telah didokumentasikan pada penelitian terdahulu oleh (Yuliana, et al., 2020) bahwa terjadi 15 kasus mengandung kekerasan dari 45 kasus konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah, diantaranya kekerasan dilakukan polisi, pihak sekuriti perusahaan, bahkan preman yang disewa oleh perusahaan.

Timbulnya konflik muncul dari *basic needs* yang tidak terpenuhi (Burton, 1988). Dalam beberapa contoh kasus konflik dibarengi kekerasan yang terjadi, bahwa tuntutan masyarakat terhadap perusahaan kelapa sawit adalah terkait kebutuhan dasar (*basic need*) yaitu menagih janji plasma dari perusahaan, serta menuntut ganti rugi lahan yang dirampas perusahaan. Sebagaimana menurut (Trijono, Konflik dan Rekonsiliasi sebuah Pendekatan Transformatif, 2018) bahwa konflik pasti terjadi, namun konflik menjadi kekerasan bukanlah peristiwa biasa karena menimbulkan akibat kerusakan hingga hilangnya eksistensi manusia, sehingga penulis tertarik mengangkat pertanyaan penelitian tentang kekerasan dalam konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah yaitu "Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terdapat pada konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah". Sehingga tujuan tulisan ini untuk melakukan analisa lebih lanjut guna mengidentifikasi bentuk kekerasan pada konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah melalui konsep Johan Galtung yaitu tiga dimensi kekerasan terdiri dari kekerasan structural, kultural, dan langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada analisis terhadap data tentang kekerasan dan konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Denzin & S.Lincoln, 2000). Adapun sumber data utama adalah data tersier dan data sekunder, dari hasil wawancara dengan pemerhati isu konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah, serta refleksi penulis dari hasil diskusi dengan organisasi *non-government* (NGO) di Kalimantan Tengah seperti WALHI Kalteng, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, dan Progress Palangka Raya. Serta penulis melakukan penelusuran hasil pemberitaan media massa, penelitian dan laporan konflik kelapa sawit secara khusus di Kalimantan Tengah, selain penulis menggunakan data-data lapangan yang penulis himpun bersama tim dalam melakukan beberapa penelitian konflik kelapa sawit salah satunya tertuang dalam laporan kebijakan/ *policy* brief dengan judul *"Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Kalimantan*

Tengah: Evaluasi terhadap efektivitas berbagai mekanisme resolusi konflik (Laporan Kebijakan No.4, Leiden, Belanda)" yang terbit pada tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah dan Sumber Konflik

Pesatnya pertumbuhan sektor kelapa sawit telah mengubah lanskap pedesaan di Indonesia. Pesatnya perluasan areal perkebunan telah menyebabkan perusahaan kelapa sawit membeli dan mengkonversi lahan yang luas. Hal demikian juga terjadi di Kalimantan Tengah. Data Ditjen Perkebunan menunjukkan bahwa perkebunan sawit Kalimantan Tengah memiliki luas 1,9 juta hektar pada tahun 2022, dengan 330 ribu hektar perkebunan rakyat dan 1,5 juta hektar lagi dikelola oleh Perusahaan Swasta Nasional. Perkebunan sawit Kalimantan Tengah berada di posisi ketiga terluas di seluruh negeri, setelah Riau dan Kalimantan Barat. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan Tengah yaitu 153.568 km2. (Levrita Rahayunie,MMCKalteng, 2024).

Sementara itu, peralihan tata guna lahan menjadi perkebunan kelapa sawit memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat, di mana keduanya memiliki perspektif yang berbeda dalam menerjemahkan konflik (Ulzikri 2020), yang mana karakter keluhan pemicu umum penyebab konflik antaralain: rasa ketidakadilan bagaimana perusahaan memperoleh lahan, bagaimana manfaat penggunaan lahan didistribusikan, masalah polusi dan dampak pencemaran lingkungan, serta tidak mendapat timbal balik yang cukup atas tanah mereka yang hilang (Yuliana, et al., 2020). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengidentifikasi bahwa perkebunan sumber utama konflik, dengan bisnis kelapa sawit menjadi pemicu utama. Tercatat Konflik agraria tahun ini naik 12% dibanding tahun 2022 yang berjumlah 212 konflik (Agraria, 2023). Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah (Dimas N. Hartono, 2020), bahwa hingga ditahun 2020 lalu di Bumi Tambun Bungai (sebutan untuk Kalimantan Tengah) ada 345 konflik masyarakat lokal dan pihak perusahaan kelapa sawit.

Berdasakan penelitian terdahulu tentang Konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Yuliana, et al., 2020) umumnya konflik kelapa sawit bersumber dari:

1. Ada rasa ketidakadilan mengenai cara perusahaan mendapatkan lahan dan bagaimana keuntungan dari penggunaan lahan tersebut.
2. Masyarakat menyuarakan opini mereka secara damai melalui demonstrasi dan audiensi dengan pihak berwenang di tingkat lokal. Namun, sering terjadi kecenderungan pihak tersebut dikriminalisasi oleh polisi dan manajemen perusahaan. Dalam 20 dari 45 kasus di Kalimantan Tengah, terjadi 272 penangkapan, yang menyebabkan 76 orang terluka dan 4 orang tewas.
3. Konflik kelapa sawit jarang yang terselesaikan. Di Kalimantan Tengah, 71% dari 45 konflik yang diteliti, masyarakat tidak (atau hampir tidak) berhasil sama sekali mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Adapun ketika konflik selesai memerlukan waktu hingga 8 tahun.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu tersebut, maka tulisan ini menyorot konteks kekerasan dalam konflik kelapa sawit merupakan manifestasi dari akumulasi sumber-sumber konflik yang tidak terselesaikan tersebut diatas. Selain di Kalimantan Tengah, persoalan perkebunan kelapa sawit telah dibicarakan secara internasional melalui berbagai tulisan, salah satu yang menarik adalah persoalan kelapa sawit yang digambarkan oleh (Li & Semedi, 2021) sebagai Raksasa menghancurkan sekitarnya, dan perkebunan bekerja dengan menguasai aspek kehidupan. Sementara masyarakat menanggung akibat dari perkebunan kelapa sawit dimana kehilangan tanah, mengubah lahan menjadi monoculture sementara masyarakat adat bahkan masih bergantung dengan hutan dan lahan untuk penghidupan mereka, eksistensi hutan penting untuk kelangsungan identitas hidup mereka, namun kelapa sawit menjadi ancaman tersendiri (Friend Of The Earth, 2008)

Dimensi Kekerasan Johan Galtung dalam Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah

Kekerasan merupakan konflik yang tidak terselesaikan secara damai (Trijono, Konflik dan Rekonsiliasi sebuah Pendekatan Transformatif, 2018), kasus kekerasan pada konflik kelapa sawit

yang ramai diperbincangan saat ini salah satunya kasus penembakan di Kalimantan Tengah pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan Gijik seorang warga Kabupaten Seruyan, Desa Bangkal, tewas yang terjadi saat warga unjuk rasa. Protes itu berlangsung sejak 16 September (Tempo.co, 2023). Tuntutan warga Desa Bangkal ini merupakan lanjutan dari perjanjian tahun 2013 antara PT HMBP dan warga Desa Bangkal yang menjanjikan 2 hektare per kepala keluarga. Selain itu, warga juga menuntut plasma, serta lahan seluas 1.175 hektare yang tidak termasuk dalam izin HGU PT HMBP untuk dikelola oleh masyarakat.

Kekerasan yang terjadi pada konflik menjadi indikasi bahwa konflik tidak mampu dikelola, dan menjadi pertanyaan bagi kehadiran negara pada situasi konflik, sebagaimana Hobbes (Susan, Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisa, 2019) mengenai *state of nature* gambaran hadirnya organisasi yang mampu memberi aturan. Negara bertindak sebagai pengatur dan pelindung para warganya. Sebaliknya, pada situasi konflik kelapa sawit yang berbentuk kekerasan di Kalimantan Tengah, justru negara yang direpresentasikan oleh kehadiran aparat keamanan pada situasi konflik menjadi pelaku penembakan terhadap warga bernama Gijik pada 7 Oktober 2023 (ANTARA, 2024), yang merupakan seorang warga menuntut kebun sawit plasma dari perusahaan, PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP). Menurut KPA, 69 orang tewas dalam konflik agraria selama dua pemerintahan Jokowi (2015–2022). Korban dalam konflik agraria terus meningkat sebagai akibat dari peristiwa Seruyan ini. (Budi Baskoro, 2023).

Sebagaimana Galtung dan Webel dalam (Deutsch, 2007) Kekerasan yang digunakan dalam jangka panjang untuk alat politik atau kepentingan bagi pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini kehadiran aparat keamanan (polisi) representasi dari kehadiran negara pada kondisi konflik untuk kepentingan perusahaan perkebunan kelapa sawit, justru tidak mempromosikan ketertiban, namun sebaliknya mengurangi keamanan psikologis (ketakutan, ancaman) dan keamanan politik (kebebasan menyuarakan pendapat) bagi masyarakat yang menyuarakan kepentinganya terhadap perkebunan melalui demonstrasi atau unjuk rasa. Padahal perlu disadari bahwa konsekuensi dari masyarakat demokratis adalah konflik yang pasti terjadi minimal pada perbedaan pandangan bahkan berseberangan karena kebebasan berpendapat dan kesetaraan yang mengemuka, namun konflik jangan sampai menjadi kekerasan (Trijono, 2007).

a. Kekerasan Struktural: Kemiskinan dan Keluhan Plasma

Johan Galtung (Galtung, Cultural Violence, 1990) mengatakan kekerasan struktural adalah ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem sehingga menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, ada kondisi suatu kelompok dihalangi dari akses yang sama terhadap peluang, layanan, yang memungkinkan untuk kebutuhan dasar, dapat bersifat formal terdapat pada struktur hukum, atau bersifat fungsional secara budaya. Lebih lanjut situasi kekerasan structural pada masa kini dapat dilihat di daerah industry (Susan, 2009). Sebagaimana (Riana, Sumantri, & Wahyudi, 2018) menegaskan bahwa konflik struktural terjadi pada konflik perkebunan sawit dengan bentuk masih terdapat kondisi kemiskinan ekonomi, infrastruktur, pendidikan bahkan kesehatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sawit, serta masyarakat tidak diberikan kebun plasma.

Begitupula hal yang terjadi di Kalimantan Tengah, sebagai penghasil sawit No. 3 di Indonesia, masih terdapat 142.000 penduduk miskin menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantah Tengah, pada triwulan III tahun 2023. Secara khusus dibeberapa wilayah perkebunan sawit, lebih lanjut dijelaskan dalam (voxkalteng, 2023) berdasarkan data BPS tersebut, bahwa beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah seperti Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kalimantan Tengah, mencapai 26.570 orang, sementara Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit 411102.36 Hektare. Kabupaten Kapuas peringkat dua penduduk miskin sebanyak 19.190 orang, sementara Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit 105840.52 Hektare, lalu Seruyan dengan jumlah 15.710 orang penduduk miskin, sementara Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit 332397.81. hectare. (Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Swasta, Perkebunan Rakyat. Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah,

2018)[1].

Sesungguhnya cara mengukur indikator kemiskinan tidak tunggal. Meski data perbandingan diatas nampaknya tidak mendalam namun memberi gambaran bahwa kecendrungan kehadiran kelapa sawit di suatu daerah tidak serta merta mengentaskan kemiskinan yang ada. Akan tetapi contoh nyata yang terjadi di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan tentang kekerasan struktural yaitu, konflik kelapa sawit PT HMBP terkait janji plasma yang tidak dipenuhi perusahaan kepada warga. Seyogyanya harapan masyarakat melalui pola hubungan kemitraan perkebunan sawit inti dan plasma maka masyarakat dapat memenuhi hidup, namun plasma hanya tinggal janji-janji saja. Padahal perusahaan memiliki kewajiban memenuhi Plasma bagi masyarakat berdasarkan amanat penerapan Peraturan Menteri Pertanian No 26 Tahun 2007 pasal 11 tentang kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan (pihak yang terdampak tidak hanya yang terbentuk setelah tahun 2007, namun juga sebelum tahun 2007).

Skema Plasma merupakan akses dan kesempatan bagi masyarakat di perkebunan untuk memperoleh manfaat baik dari keberadaan perkebunan kelapa sawit, dan hasilnya berguna sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, selain itu skema Plasma diatur secara formal melalui Permentan No 26 Tahun 2007 Pasal 11. Sehingga, ketika Plasma tidak dipenuhi oleh perusahaan maka disitulah letak dari kekerasan struktural terjadi. Masalah Plasma sebagaimana temuan penelitian terdahulu oleh (Yuliana, et al., 2020) bahwa keluhan Plasma menduduki perigkat ke dua di angka 60% dari 45 konflik yang dipelajari di Kalimantan Tengah, selain keluhan utama adalah 80% penyerobotan lahan. Menurut penelitian tersebut, bahwa keluhan plasma ada 3 bentuk: 1. Beberapa perusahaan tidak merealisasikan lahan plasma seperti yang sudah dijanjikan; 2. Lahan plasma direalisasikan, tapi keuntungan yang dibagikan ke masyarakat tidak ada atau terlalu kecil; 3. Koperasi yang dibentuk untuk mengelola skema plasma tidak berfungsi karena koperasi tersebut tidak membagikan keuntungan secara transparan kepada anggotanya.

b. Kekerasan Langsung: Penembakan dan Kriminalisasi

Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang bisa dilihat dan mempunyai efek langsung (Khaswara & Hambali, 2021). Sebagaimana disebutkan Galtung (Galtung, 1969) bahwa membunuh dan melukai adalah kekerasan langsung. Dalam aksi masa masyarakat di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan, Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023, masyarakat yang memperjuangkan hak mereka menuntut janji perusahaan kelapa sawit sejak 2013 yaitu menuntut plasma dan menuntut lahan seluas 1.175 hektare diluar izin HGU PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) untuk di kelola masyarakat sendiri. Namun demonstrasi masyarakat di hadapkan dengan pihak kepolisian yang mengambil tindakan kekerasan dengan gas air mata dan peluru tajam untuk membubarkan masyarakat yang melakukan tuntutan. Hingga 7 Oktober 2023, ada tiga korban tembak peluru tajam, salah satunya meninggal dunia.

Kasus kekerasan dalam konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah jgabterdokumentasi dengan baik oleh penelitian terdahulu (Yuliana, et al., 2020) bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat menyuarakan keluhan mereka secara damai melalui demonstrasi dan audiensi dengan pejabat lokal. Namun, ada kecenderungan yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin demonstrasi sering dikriminalisasi oleh polisi dan manajemen perusahaan: 20 dari 45 kasus di Kalimantan Tengah melibatkan 272 penangkapan anggota masyarakat. Dalam konflik tersebut, 76 orang terluka dan 4 orang meninggal.

a. Kekerasan Budaya

Berdasarkan penjelasan Galtung (Galtung, 1990) Kekerasan budaya juga merupakan kekerasan structural dan kekerasan langsung yang mendapat legitimasi dan diterima oleh masyarakat. Seperti pembunuhan atas nama negara, atau membuat kenyataan menjadi buram sehingga tidak dapat melihat tindakan dan fakta kekerasan (terselubung). Menurut Jeong dalam

[1] https://kalteng.bps.go.id/indicator/54/569/1/kelapa-sawit.html , diakses pada July 4, 2024, 10:03 pm .

(Susan, 2019) kekerasan budaya dilihat sebagai sumber lain dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan dan kecurigaan.

Karakteristisk konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah berdasarkan temuan penelitian terdahulu oleh (Yuliana, et al., 2020) bahwa kecendrungan masyarakat memprotes perusahaan menghindari konfrontasi terbuka sehingga memilih cara-cara damai seperti demonstrasi di wilayah perkebunan, atau mengemukakan pendapat dengan tokoh-tokoh lokal, atau bertemu dengan General Manager perusahaan. Jadi strategi protes cenderung akomodatif. Hal ini menghindari resiko yang cukup besar yaitu ditangkap atau dikriminalisasi kepolisian, terutama bagi pemimpin protes. Namun, bahkan penangkapan pemimpin protes karena hal remeh yaitu karena membawa parang yang tidak digunakan untuk melawan, (dimasukan kepolisian dalam kategori membawa senjata tajam), atau menggunakan bahasa yang mengancam.

Pada situasi tersebut terdapat kekerasan kultural yang sifatnya terselubung dimana terbangun persfektif warga "polisi ditakuti", justru bukan persfektif bahwa "polisi melindungi hak masyarakat" dan bahkan image polisi pada konflik kelapa sawit dianggap, dicurigai, sebagai pihak perusahaan. Hal ini akumulasi (perulangan) dari kejadian konflik kelapa sawit yang memperhadapkan aparat keamanan yaitu polisi untuk membubarkan warga masyarakat yang protes hingga terdapat bentuk kriminalisasi dan korban jiwa.

Pada kasus terbaru konflik kelapa sawit PT HMBP dan warga Bangkal, Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah, hal demikian terjadi dimana pengamanan aksi melibatkan 500 personel gabungan Polisi Resor Seruyan, Anggota Polda, hingga TNI karena eskalasi protes meningkat (Tempo.co, 2023) Meski dimikian tindakan kekerasan atau penembakan tetap tidak dibenarkan meski atas nama "pengamanan".

KESIMPULAN

Kekerasan dalam konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah antara masyarakat dan pihak perusahaan kelapa sawit, masih saja terjadi. Saat ini sedang memuncak adalah PT HMBP dengan masyarakat Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Teridentifikasi 3 bentuk kekerasan pada konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah melalui konsep Johan Galtung yaitu dimensi kekerasan structural meliputi tingkat kemiskinan tingggi di Kabupaten, yang memiliki wilayah kelola perkebunan kelapa sawit yang tinggi, dan terdapat persolana keluhan plasma. Adapun kekerasan kultural berupa perspektif ketakutan, kebencian kepada polisi yang dibangun oleh akumulasi konflik yang tidak diselesaikan dan selalu memperhadapkan warga yang protes dengan pihak kepolisian atas nama pengamanan hingga penggunaan gas air mata dan penembakan. Adapun kekerasan langsung adalah kriminalisasi dan penembakan hingga menewaskan mayarakat.

REFERENSI

Affandi, H. I. (2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Agraria, K. P. (2023). *Laporan Tahunan Agraria 2023: Dekade Krisis Agraria Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024.* Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

ANTARA. (2024, Juni 11). *www.borneonews.co.id.* Retrieved from https://www.borneonews.co.id/berita/343657-perwira-polisi-penembak-gijik-warga-bangkal-divonis-10-bulan-penjara-ketua-lbh-palangka-raya-aneh-bin-ajaib

Budi Baskoro. (2023, Oktober 8). *www.mongabay.co.id.* Retrieved from https://www.mongabay.co.id/2023/10/08/tuntut-plasma-pt-hmbp-seorang-warga-seruyan-tewas/

Burton, J. W. (1988). Conflict Resolution As A Political System. *George Mason University Centre for Conflict Analysis and resolution Working Paper series*.

Denzin, N. K., & S.Lincoln, Y. (2000). *Handbook Of Qualitative Research (Eds).* Sage Publication: California, USA.

Deutsch, M. (2007). *The Handbook of Peace and Conflict Studies Charles Webel and Johan Galtung.* Routledge.

Dimas N. Hartono. (2020, Desember 30). *https://pantaugambut.id/*. Retrieved from https://pantaugambut.id/: https://pantaugambut.id/kabar/melihat-lingkaran-konflik-perkebunan-kelapa-sawit-di-kalteng

Friend Of The Earth. (2008, Februari). *Losing Ground: The human impacts of palm oil expansion.* Retrieved from https://www.conflictresolutionunit.id/wp-content/uploads/2019/07/2008-Losing-Ground-The-human-impacts-of-palm-oil-expansion.pdf

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research . *Journal of Peace Research*, 167-191.

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 291-305. Retrieved from https://rpl.hds.harvard.edu/what-we-do/our-approach/peace-violence

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 291-305.

Iman Herdiana. (2023, Oktober 9). *bandungbergerak.id.* Retrieved from https://bandungbergerak.id/article/detail/158909/ylbhi-mengecam-kebrutalan-polisi-di-bangkal-kalimantan-tengah

Khaswara, F., & Hambali, R. Y. (2021). Conflict Theory According to Johan Galtung. *Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)* (pp. 650-661). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Levrita Rahayunie,MMCKalteng. (2024, Februari 5). *mmc.kalteng.go.id.* Retrieved from https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/42995/buka-forum-diskusi-prospek-perkebunan-kelapa-sawit-pasca-uuck-gubernur-kalteng-h-sugianto-sabran-tegaskan-perusahaan-wajib-berikan-20-plasma

Li, T. M., & Semedi, P. (2021). *Plantation Life: Corporate Occupation in Oil Palm Zone.* USA: Duke University Press.

Riana, R. F., Sumantri, S. H., & Wahyudi, B. (2018). CONFLICT RESOLUTION OF PALM OIL PLANTATION BETWEEN PT ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA WITH SOCIETY IN SUPPORTING REGION SECURITY IN SUNGAI ROTAN DISTRICT MUARA ENIM REGENCY. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 69-94.

Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik Kontemporer.* Jakarta: Kencana.

Susan, N. (2019). *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisa.* Jakarta: Kencana.

Tempo.co. (2023, Oktober 10). *nasional.tempo.co*. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1781889/polisi-bekingi-perusahaan-di-konflik-seruyan-polda-kalteng-itu-hoaks

Tempo.co. (2023, Oktober 10). *nasional.tempo.co*. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1781875/polisi-tembak-2-warga-bangkal-seruyan-setelah-eskalasi-massa-meningkat-terjunkan-500-personel

Trijono, L. (2007). *Pembangunan Sebagai Perdamaian.* Yogyarkarta: Yayasan Obor Indonesia.

Trijono, L. (2018). Konflik dan Rekonsiliasi sebuah Pendekatan Transformatif. Yogyakarta: Suluh Media.

voxkalteng. (2023, November 28). Retrieved from https://voxkalteng.com/penghasil-sawit-nomor-3-indonesia-kalteng-masih-miliki-142-ribu-penduduk-miskin/

www.infosawit.com. (2024, Juni 30). Retrieved from https://www.infosawit.com/2024/06/30/sugianto-sabran-bangun-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-di-kalimantan-tengah/

Yuliana, Waldianto, Adriana, R., Dhiaulhaq, A., Berenschot, W., & Afrizal. (2020). *Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah: Evaluasi terhadap efektivitas berbagai mekanisme resolusi konflik. Laporan Kebijakan No.4.* Leiden, Belanda: POCAJI.

Ulzikri, Ahmad Robi. 2020. "Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis Dalam Kasus Eksploitasi Pasir Di Perairan Krakatau Lampung Selatan)." *Jurnal Public Policy* 6 (2): 56. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994.

Vol. 4, No. 1, Maret 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Resiliensi Perempuan Kepala Keluarga Terhadap Karhutla

Resilient Of Female-Headed Households against Forest And Land Fires

Elia Damayanti [(1,a)]
[(1)] Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
Email : [(a*)] elia.damayanti@fisip.upr.ac.id

A B S T R A K

Studi ini berfokus pada resiliensi rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan dalam menghadapi kebakaran hutan. Tujuan penelitian ini adalah memahami dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap mata pencaharian rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan serta ketahanan mereka terhadap perubahan iklim. Studi ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (SLR) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi artikel-artikel yang relevan, relevansi artikel-artikel tersebut terhadap studi, dan relevansi studi tersebut terhadap bidangnya. Studi ini mencakup dua jenis penelitian; peran perempuan dalam ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim dan lensa interseksional gender dan etnisitas. Studi ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang mendalam tentang ketahanan mata pencaharian melalui lensa interseksional gender dan etnisitas, serta lensa gender untuk membangun ketahanan iklim. Temuan ini akan berguna bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama kebakaran lahan hutan.

Kata kunci: Resiliensi, Perempuan Kepala Keluarga, Karhutla, Perubahan Iklim

A B S T R A C T

The study focuses on the resilience of female-headed households againts forest and land fires. The research aims to understand the impact of forest and land fires on the livelihoods of these households and their resilience to climate change. The study uses a systematic literature review (SLR) method to gather and analyze data from various studies. The research aims to identify relevant articles, their relevance to the study, and the relevance of the study to the field. The study includes two types of studies: one on the role of women in community resilience to climate change, another on the intersectional lens of gender and ethnicity. The study aims to provide a nuanced assessment of livelihood resilience through the intersectional lens of gender and ethnicity, as well as a gendered lens for building climate resilience. The findings will be useful for policymakers, researchers, and policymakers in addressing the challenges faced by female-headed households in the face of climate change expecialy forest land fires.

Keywords: *Resilience, Female Head of Household, Forest and Land Fires, Climate Change*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
23.02.2025	27.02.2025	29.03.2025	31.03.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan dikenal sebagai karhutla adalah bencana yang terjadi hampir tiap tahun di Indonesia. Data (Tyukavina et al., 2022)mengenai tren hilangnya lahan akibat kebakaran dari tahun 2001 hingga 2019 menunjukkan bahwa area terbakar akibat karhutla meningkat sekitar 5,4% setiap tahunnya selama periode tersebut. Sedangkan di Indonesia, data menunjukkan bahwa dari tahun Januari hingga Oktober 2023 saja, karhutla di Indonesia diperkirakan menghasilkan emisi terbesar hingga 141,8 juta ton CO^2.

Rusaknya ekosistem akibat karhutla berpengaruh pada penghidupan masyarakat sekitar hutan. Tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga ancaman penyakit infeksi pernapasan atas (ISPA) terutama pada anak-anak dan perempuan. Data KLHK 2018 menunjukkan bahwa jumlah penderita ISPA akibat karhutla mencapai 919.516 orang pada bulan Februari hingga September 2018 yang tersebar di enam provinsi, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemulihan pasca bencana karhutla adalah sesuatu yang sulit mengingat hal ini juga mengancam tiap tahun, bagi masyarakat dengan daerah rawan risiko kebakaran, terutama bagi warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam.

Kerentanan tersebut juga dirasakan terutama pada perempuan yang menjadi kepala keluarga yang tinggal di daerah rawan karhutla. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi terutama bagi kelompok yang rentan. Dalam konteks ini, analisis strategi mata pencaharian menunjukkan bahwa ketersediaan aset modal—baik modal manusia, finansial, maupun alam sangat menentukan kemampuan adaptasi komunitas minor dalam menghadapi bencana karhutla. Isu ini juga berkaitan dengan politik dan bencana yang melibatkan aspek gender (Ulzikri 2023). Perempuan yang menjadi kepala keluarga, misalnya, seringkali harus menghadapi keterbatasan pendidikan dan beban hutang yang tinggi, sehingga alokasi pendapatan terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini diperparah oleh akses yang terbatas terhadap sumber daya publik dan keuangan, terutama bagi perempuan dari kelompok minoritas seperti janda atau etnis minoritas, yang berdampak langsung pada penurunan resiliensi mereka.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan tinjauan pustaka penelitian ini adalah Systematic Literature Review atau SLR, yaitu metode tinjauan pustaka yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis kritis data dan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan penelitian terdahulu yang dipublikasikan di *Google Scholar* dengan menggunakan aplikasi *Publish or Perish*. Kriteria yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Artikel yang relevan dengan resiliensi pasca bencana
2. Tahun terbit dibatasi dari 2021 – 2025
3. Artikel bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang terindeks Scopus
4. Artikel yang memiliki penelitian serupa dengan menggunakan kata kunci *"resilience, female-household, forest and land fires, climate change"*

Kemudian digunakan prosedur PRISMA *(Prefereed Reporting Items For Systematic Reviews and Meta Analyses)* yang meliputi *identification*, *screening*, *eligibity* serta *included* dari pengumpulan data sampai penyaringan artikel.

Identification	*Screening*	*Eligibity*	*Included*
Identifikasi melalui *Publish or Perish* dengan *source Google Scholar* N = 770	Terbit pada tahun 2021 – 2025, Jenis dokumen: Jurnal Penelitian N = 230	Terindeks Scopus N = 65	Jurnal dipilih yang relevan dengan judul penelitian N = 12

Setelah didapatkan artikel yang memenuhi kriteria, dilakukan identifikasi secara menyeluruh pada setiap artikel. Kemudian dilakukan pengklasifikasian menurut hasil penelitian tersebut. Selain itu, terdapat hasil penelitian tambahan untuk mendukung bahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

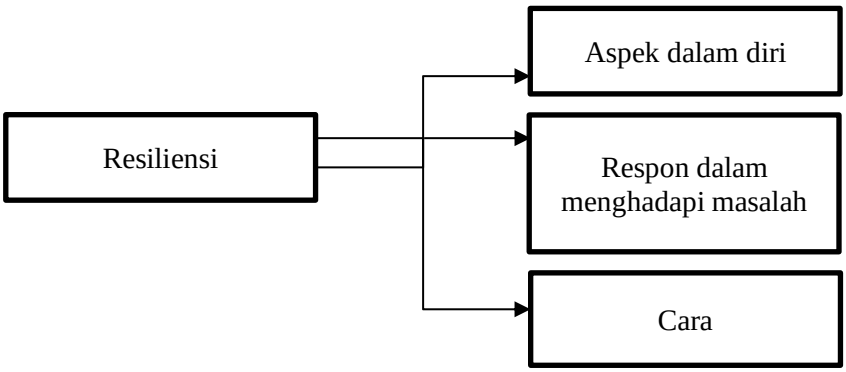
Penulis masukkan dua belas studi dalam tinjauan ini. Karakteristik rinci dari studi-studi ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik, Objek dan Perspektif Studi Literatur

No	Penulis, Publikasi, Tahun, Negara	Objek	Perspektif
Perempuan dan Resiliensi			
1.	Singh, P. The role of women in community resilience to climate change: A case study of an Indigenous Fijian community. 2022. Fiji	Peran perempuan di komunitas pesisir dalam menghadapi perubahan iklim	*Rural Studies*
2.	Tran, V.T. Nuanced assessment of livelihood resilience through the intersectional lens of gender and ethnicity: Evidence from small-scale farming communities in the upland regions of Vietnam. 2022. Vietnam	Resiliensi dan Interseksionalitas	Gender
3.	Tran, V.T. A Nuanced Analysis on Livelihood Resilience of Vietnamese Upland Households: An Intersectional Lens of Ethnicity and Gender. 2023. Vietnam.	Resiliensi dan Interseksionalitas	Gender
4.	Malik, I. Coastal Women's Resilience Strategy against Climate Change Vulnerability in Makassar, Indonesia. 2021. Indonesia	Kerentanan Perempuan Pesisir menghadapi perubahan Iklim	Environmental and Energy Policies
5.	Datey, A. A gendered lens for building climate resilience: Narratives from women in informal work in Leh, Ladakh. 2023. India	Resiliensi perempuan komunitas pegunungan dalam menghadapi perubuahan iklim	Gender
Resiliensi Kepala Keluarga Perempuan			
1.	Fuller, Rob & Lain. Are female-headed households less resilient? Evidence from Oxfam's impact evaluations. 2019. Africa, Asia & Latin America	Komparasi resiliensi antara kepala keluarga laki-laki dan kepala keluarga perempuan di dalam rumah tangga	Climate and Development
2.	Habib. Becoming Female Head of a Household: By Force or by Choice?. 2020. Bangladesh	Kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga	Gender
3.	Panampitiya. A Review of the Concept of Urban Fragility and Urban Resilience. 2023. India	Kerentanan dan Resiliensi keluarga	Gender
4.	Andersen, L. E., Verner, D., & Wiebelt, M. Gender and Climate Change in Latin America: An Analysis of Vulnerability, Adaptation and Resilience Based on Household Surveys. 2017. Amerika Latin.	Resiliensi Keluarga dalam menghadapi perubahan iklim	Gender and Climate Change
5	Randriamparany dan Randrianalijaona. The vulnerability of Antandroy women to droughts in Ambovombe Androy. 2022. Madagascar	Faktor-faktor di balik kerentanan perempuan terhadap kekeringan pasca bencana	Climate and Development
6.	Canosa et al. Villaverde et al. Community Risk and Resilience to Wildfires: Rethinking the Complex Human–Climate–Fire Relationship in High-Latitude Regions. 2024. Republik Sakha, Russia	Resiliensi komunitas yang memiliki risiko karhutla	Sustainability

Resiliensi dan Kerentanan

Istilah Resiliensi, yang berasal dari ilmu ekologi, kemudian digunakan secara luas dalam ilmu sosial dan tantangan perubahan lingkungan secara global. Pada dasarnya, istilah tersebut menekankan kemampuan untuk menanggapi perubahan atau gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Elmqvist et al (2019) berpendapat bahwa resiliensi jauh melampaui sekadar pulih dari gangguan, melainkan *melenting* layaknya pegas dalam fisika. Resiliensi terdiri dari tiga komponen utama: cara, respons terhadap masalah, dan aspek dalam diri. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan membentuk mekanisme adaptasi yang efektif untuk mengatasi tekanan atau situasi sulit. Menurut Scott (1989), cara resiliensi mencakup apa yang dilakukan orang untuk bertahan dalam situasi sulit. Cara ini terdiri dari tiga poin utama yang digambarkan dalam bagan: membangun jaringan atau hubungan sosial, mencari subsistensi alternatif, dan "mengikat sabuk lebih kencang" atau menghemat uang. Berikut adalah gambaran tentang konsep resiliensi.



Gambar 1. Konsep Resiliensi

Pada Gambar 1. dijelaskan bahwa resiliensi terdiri dari tiga komponen utama: cara, respon individu dalam menangani masalah, dan aspek dalam diri. Ketiga komponen ini saling terkait dan membentuk mekanisme adaptasi yang efektif untuk mengatasi tekanan atau situasi sulit.

Pertama, aspek dalam diri yaitu dari faktor-faktor internal yang membantu seseorang menjadi mampu bertahan. Tujuh poin terdiri dari komponen ini yaitu, pemahaman diri, kemandirian, hubungan sosial, inisiatif, kreativitas, humor, dan moralitas. Semakin positif poin-poin tersebut, maka seseorang semakin memiliki modal dalam diri untuk resilien. Aspek dalam diri adalah dasar yang kuat bagi seseorang untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dan mengambil tindakan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain.

Bagian kedua dari resiliensi adalah respons dalam menghadapi masalah. Ini berfokus pada cara orang bereaksi terhadap stres dan masalah. Regulasi emosi dan pengendalian diri membantu orang untuk tetap tenang dan menghindari membuat keputusan terburu-buru dalam situasi tekanan. Optimisme membuat seseorang tetap termotivasi untuk mencari solusi jika mereka memiliki pandangan positif terhadap masa depan. Selain itu, kemampuan untuk melakukan analisis memungkinkan orang untuk menemukan sumber utama dari kesulitan yang mereka hadapi, yang memungkinkan mereka untuk mencari solusi yang tepat. Keyakinan pada kemampuan diri sendiri, atau *self-efficacy*, juga memainkan peran penting dalam respons ini. Orang lebih cenderung mengambil tindakan proaktif untuk mengatasi kesulitan jika mereka percaya pada kemampuan mereka sendiri. Sebaliknya, empati membantu orang membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, yang dapat membantu mereka dalam adaptasi. Selain proses dalam diri, dan merespon impuls dari luar, yang mempengaruhi resiliensi seseorang adalah dengan caranya, dalam cara ini terdiri atas tiga poin utama yaitu; membangun relasi atau jaringan sosial, mencari alternatif subtensi dan melakukan penghematan.

Kerentanan *(vulnerability)* diartikan sebagai paparan individu atau kelompok terhadap tekanan sebagai dampak dari perubahan ekologi (Adger, 2006). Kerentanan didefinisikan sebagai serangkaian kondisi sosial ekonomi yang dapat diidentifikasi. Resiliensi dan kerentanan *(vulnerability)* adalah konsep-konsep yang saling melengkapi yang digunakan untuk memahami

bagaimana sistem dan aktor merespons perubahan, termasuk guncangan dan pergeseran bertahap (Miller et al., 2010).Sementara kerentanan merujuk pada risiko dari bahaya, resiliensi adalah kemampuan untuk pulih dari dampak bahaya tersebut. Dalam konteks ekonomi, kerentanan didefinisikan sebagai paparan terhadap guncangan dari luar, sementara ketahanan adalah kemampuan yang dipicu oleh kebijakan untuk bertahan atau pulih dari guncangan tersebut (Briguglio et al., 2009). Meskipun asal-usulnya berbeda dalam teori ekologi dan sosial, ada area-area yang memiliki korelasi antara konsep-konsep ini (Miller et al., 2010). Memahami konsep-konsep ini sangat penting untuk mengantisipasi bahaya alam dan risiko, karena risiko bencana tidak dapat dikurangi hanya dengan fokus pada bahaya fisik tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial-ekonomi (Thaler et al., 2018).

Resiliensi Kepala Keluarga Perempuan

Keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak, atau ibu dan anak. Sementara pengertian kepala rumah tangga yaitu salah satu anggota rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik 2020 menunjukkan bahwa 1 dari 10 kepala keluarga adalah perempuan atau sebanyak 12,73 persen perempuan Indonesia adalah kepala keluarga jumlah tersebut meningkat sejak tahun 2014 hingga 2020. Di antara latar belakang yang dimiliki perempuan sebagai kepala rumah tangga termasuk bercerai, suami tidak mencari nafkah karena difabel atau kehilangan pekerjaan, suami meninggalkan rumah untuk waktu yang lama tanpa menafkahi, belum menikah tetapi memiliki tanggungan keluarga, poligami, dan cerai mati.

Penelitian tentang resiliensi rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan pasca karhutla menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa studi menunjukkan bahwa rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan tidak begitu resilien dibandingkan rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki (Fuller & Lain, 2020). Salah satu faktor penyebab rendahnya resiliensi pada rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan adalah keadaan perempuan untuk menjadi kepala rumah tangga bukan berdasarkan pilihan sendiri. Pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Selain Undang-Undang Perkawinan, budaya patriarki di masyarakat membuat perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dan kepala keluarga tidak diakui secara penuh. Penelitian (Habib, 2020) menunjukkan bahwa perceraian dan kematian pasangan adalah alasan utama munculnya kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga *(de jure)* selain alasan lain yaitu ketidakmampuan suami seperti sakit atau disabilitas dan migrasi. Keadaan yang terpaksa itulah yang memunculkan fenomena tersebut terlepas dari kelas ekonomi dan tempat tinggal mereka berasal. Tidak ada perempuan yang secara sukarela mengambil peran sebagai kepala keluarga. Hal yang sama ditunjukkan pada penelitian (Panampitiya, 2020) menunjukkan bahwa pada masyarakat patrarki, kekuasaan dan otoritas biasanya diberikan kepada perempuan karena ketiadaan laki-laki dalam rumah tangga. Pada keadaan yang terpaksa menjadi pemimpin dalam rumahtangga, perempuan lebih rentan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga hingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga. (Eka & Saputri, n.d.)mengatakan bahwa ketika perempuan menjadi pemimpin rumahtangga, maka terdapat beban ganda dalam pekerjaan domestik serta beban memberikan nafkah bagi keluarga.

Penelitian Andersen et al (2017) menunjukkan hal yang berbeda. Studi yang dilakukan di negara-negara amerika latin dengan mengukur tingkat pendapatan per kapita dan tingkat diversivikasi pendapatan menunjukkan bahwa rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan lebih resilien terhadap guncangan perubahan iklim dibandingkan rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki, meskipun dengan tingkat pendidikan kepala keluarga perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh diversivikasi pendapatan yang dilakukan oleh anggota keluarga, khususnya kepala keluarga. Hasil penelitian Singh et al., (2022) yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki resiliensi baik sosial, ekonomi dan ekologi oleh karena keterlibatan perempuan di berbagai jaringan informal sehingga perempuan memiliki akses yang lebih mudah untuk berbagi dan mendapatkan keahlian, pengalaman dan pengentauan untuk mendukung anggota keluarga dan komunitas dalam keadaan sulit. Namun, meskipun dalam hal ini perempuan resilien, kontribusi

pengambilan keputusan terkait resiliensi baik di keluarga maupun di komunitas tetap dipegang oleh laki-laki.

Resiliensi Kepala Keluarga Perempuan Pasca Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menurut Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No: P.12/PPI/Set/Kum.1/12/2020 adalah suatu kejadian di mana hutan dan/atau lahan terbakar, baik secara alami maupun karena tindakan manusia, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian dalam bidang ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran lahan dan kebakaran hutan adalah istilah yang berbeda. Kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar hutan, seperti lahan pertanian dan sebagainya. Berikut adalah data 10 provinsi dengan kasus karhutla terbesar di Indonesia selama 6 tahun terakhir.



Sumber: Menlk 2024[1] *diolah*

Berdasarkan kasus karhutla terbanyak di Indonesia, ditemukan bahwa tipolofi daerah paling rawan mengalami karhutla adalah hutan kering dan gambut. Data KLHK 2024 dapat dilihat bahwa tipologi daerah rawan kebakaran adalah daerah dengan hutan kering yang terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan lahan gambut yang terdapat di pulau Kalimantan, daerah Sumatera bagian timur, dan Papua. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah menjadi masalah yang serius di Indonesia setiap musim kemarau. Karhutla tidak hanya berdampak pada lahan yang terbakar saja, melainkan pada kondisi kesehatan masyarakat sekitar, penerbangan lokal, hingga berdampak pada negara tetangga.

Keluarga yang memiliki kepala keluarga perempuan di provinsi dengan tipologi daerah hutan kering dan gambut memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Pada data **BPS** menunjukkan bahwa persentase kepala keluarga perempuan pada **provinsi** menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi kepala rumah tangga di Indonesia memiliki risiko akan bencana kebakaran hutan.

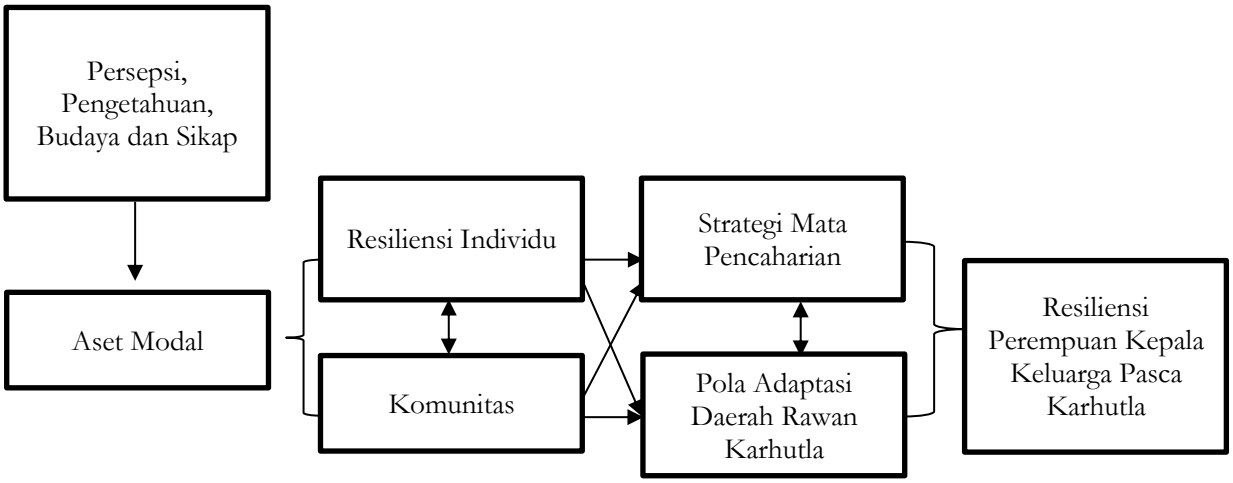
Karhutla, dapat terjadi karena proses alami, pembakaran yang tidak dikendalikan, karena kelalaian atau ketidaksengajaan atau juga memang sengaja dibakar. Contoh dari proses alami adalah kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung yang menyemburkan bara api, atau gesekan antar ranting tumbuhan kering yang menimbulkan panas atau percikan api di musim

[1]MENLHK. 2024. Indikasi Luas Kebakaran Indonesia https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran

kemarau. Kebakaran yang terjadi akibat manusia ada yang sengaja ataupun akibat kelalaian. Contoh karhutla secara sengaja misalnya pembukaan lahan untuk kegiatan ladang, perkebunan, peternakan. Sedangkan contoh karhutla akibat ulah manusia akibat kelalaian adalah membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah yang tidak dikendalikan, aktivitas berkemah, dan sebagainya. Utomo et al (2022)menjelaskan bahwa karhutla yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia (99,9%) baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, sedangkan 0,01% oleh faktor alam. Penelitian (Marlina et al., 2020)menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara karhutla dan resiliensi rumah tangga pada kasus kebakaran di Indonesia. Motif ekonomi adalah penyebab utama di balik aktivitas pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan pertanian yang paling mudah dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak serta dana yang relatif kecil.

Strategi mata pencaharian di daerah rawan kebakaran dipengaruhi oleh aset modal yang tersedia, dengan komunitas menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan modal manusia, finansial, dan alam(Nurlia et al., 2021). Penelitian (Aulia et al., n.d. 2020) menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan kepala keluarga memiliki kerentanan tinggi dengan pendidikan rendah dan memiliki hutang untuk modal kerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan paling besar untuk pangan dan sebagian besar untuk non pangan adalah untuk cicilan/angsuran dan sewa rumah. Penelitian (Marlina et al., 2020)menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan bekerja di luar rumah. Hal ini mengakibatkan perempuan sangat rentan terkena efek dari kebakaran hutan dan lahan selain daripada kurangnya peran perempuan dalam mitigasi bencana. Studi Warga et al (2022)menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat spiritualitas dengan resiliensi kepada penyitas bencana. Masyarakat dengan tingkat spiritualitas yang tinggi akan memiliki tingkat resiliensi yang tinggi.

Phoung et al (2023) mengatakan resiliensi individu bergantung pada persepsi, pengetahuan, budaya, dan sikap subjek. Perempuan dengan posisi minoritas, dalam hal ini adalah janda (widow) memiliki resiliensi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok perempuan lain dalam masyarakat karena modal manusia mereka yang lebih rendah dan akses terbatas ke sumber daya publik dan keuangan, yang sebagian terkait dengan perbedaan dalam pembagian kerja berdasarkan gender dan norma budaya tradisi patriarki. Hal yang menggambarkan hubungan variabel tersebut diberi istilah *interseksionalitas* yaitu ketika gender dipandang bukan sekedar perempuan dan laki-laki secara garis besar saja, tapi juga memiliki banyak strata-strata di bawahnya yang mempengaruhi resiliensi suatu kelompok. Hasil studi Phuong et al (2023) menjelaskan bahwa perempuan dengan kelompok etnis minoritas menyumbang lebih dari 50% dari total penduduk miskin di Vietnam. Ketimpangan tersebut berkaitan erat dengan jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan partisipasi anggota keluarga yang memiliki pekerjaan di bidang non-pertanian. Berdasarkan berbagai studi di atas dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2 Hubungan Antar Aspek Terhadap Resiliensi pada Perempuan Kepala Keluarga

Perempuan di daerah rawan karhutla memiliki keterlibatan yang cukup signifikan dalam mencegah sekaligus penanganan pasca karhutla. Penelitian Sihombing et al (2020)menunjukkan bahwa peran perempuan di Keluarahan Kereng Bangkirai, Kalimantan Tengah memiliki pengetahuan lokal dalam mengidentifikasi pencegahan karhutla melalui peran langsung maupun tidak langsung. Peran langsung perempuan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah memastikan bahwa api benar-benar padam sebelum mereka meninggalkan lokasi. Peran tidak langsung mereka adalah memberi informasi, mengingatkan, dan berkomunikasi tentang penyebab dan bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada keluarga. Sedangkan pada penelitian (Marlina et al., 2020) menunjukkan bahwa peran perempuan dalam penanganan karhutla hanya membantu menyiapkan bahan makanan dan berpartisipasi dalam memadamkan api ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, tetapi masih kurang keterlibatan perempuan dalam upaya pencegahan dan sosialisasi terkait dampak kebakaran hutan dan lahan. Penelitian (Indirastuti, 2020)menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki akses ke sumber daya yang diberikan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, padahal dalam kenyataannya kegiatan pemadaman kebakaran memerlukan keterlibatan perempuan terutama ketika terjadi di tanah atau ruang tinggal mereka. Dalam menghadapi bencana perempuan menjadi korban terbanyak karena mereka memprioritaskan anak-anak dan keluarga mereka daripada menyelamatkan diri sendiri (Sumarni & Rudiatin, 2021).

KESIMPULAN

Pada perempuan kepala keluarga, sebagian besar memiliki kerentanan tinggi terutama yang memiliki pendidikan yang rendah. Perempuan kepala keluarga juga sangat rentan terkena efek dari kebakaran hutan dan lahan serta perannya dalam mitigasi bencana hanya sebagai penyalur informasi dan bukan hingga ke tahap pengambilan keputusan. Perempuan tidak memiliki akses ke sumber daya yang diberikan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, padahal dalam kenyataannya kegiatan pemadaman kebakaran memerlukan keterlibatan perempuan terutama ketika terjadi di tanah atau ruang tinggal mereka.

REFERENSI

Adger, W. N. (2006). Vulnerability. *Global Environmental Change*, *16*(3), 268–281. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006

Andersen, L. E., Verner, D., & Wiebelt, M. (2017). Gender and Climate Change in Latin America: An Analysis of Vulnerability, Adaptation and Resilience Based on Household Surveys. *Journal of International Development*, *29*(7), 857–876. https://doi.org/10.1002/jid.3259

Andreas Jongguran Sihombing, Evi Feronika Elbaar, & Soaloon Sinaga. (2020). Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan di Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal of Environment and Management*, *1*(3), 212–220. https://doi.org/10.37304/jem.v1i3.2567

Aulia, N., Muhammad, W. ;, Program, A., Ekonomi, S. I., Pembangunan, S., & Bisnis, E. (n.d.). *POLA KERENTANAN FEMINISASI PADA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI (Studi Kasus Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)*.

Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements. *Oxford Development Studies*, *37*(3), 229–247. https://doi.org/10.1080/13600810903089893

Eka, O. :, & Saputri, W. (n.d.). PERILAKU SOSIAL PENGGUNA TIKTOK (STUDI PADA SISWA SMA NEGERI 8 MAKASSAR. In *Pinisi Journal of Sociology Education Review* (Vol. 2, Issue 3).

Elmqvist, T., Andersson, E., Frantzeskaki, N., McPhearson, T., Olsson, P., Gaffney, O., Takeuchi, K., & Folke, C. (2019). Sustainability and resilience for transformation in the urban century. *Nature Sustainability*, *2*(4), 267–273. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0250-1

Fuller, R., & Lain, J. (2020). Are female-headed households less resilient? Evidence from Oxfam's impact evaluations. *Climate and Development*, *12*(5), 420–435. https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1637330

Habib, T. Z. (2020). Becoming Female Head of a Household: By Force or by Choice? *OALib*, *07*(10), 1–12. https://doi.org/10.4236/oalib.1106825

Indirastuti, C. (2020). Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces. *Jurnal Perempuan*, *25*(1), 13. https://doi.org/10.34309/jp.v25i1.407

Marlina, S., Lautt, B. S., Usup, A., & Sunaryati, R. (2020). Dampak Kebakaran Lahan Dan Hutan Terhadap Kesehatan Perempuan Di Kabupaten Pulang Pisau. *EnviroScienteae*, *16*(3), 423. https://doi.org/10.20527/es.v16i3.9684

Miller, F., Osbahr, H., Boyd, E., Thomalla, F., Bharwani, S., Ziervogel, G., Walker, B., Birkmann, J., van der Leeuw, S., Rockström, J., Hinkel, J., Downing, T., Folke, C., & Nelson, D. (2010). Resilience and Vulnerability: Complementary or Conflicting Concepts? *Ecology and Society*, *15*(3), art11. https://doi.org/10.5751/ES-03378-150311

Nurlia, A., Rahmat, M., Waluyo, E. A., Purnama, D. H., & Sabaruddin. (2021). Gender Role in Farmers' Livelihood Strategies at Peatland Area of Fire-Prone in Ogan Komering Ilir Regency South Sumatra Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *810*(1), 012028. https://doi.org/10.1088/1755-1315/810/1/012028

Panampitiya, G. (2020). A Review of the Concept of Urban Fragility and Urban Resilience. *Journal of Political Science*.

Phuong, T. T., Tan, N. Q., Hai, N. T., & Ngu, N. H. (2023). Reframing Climate Change Resilience: An Intersectional Perspective of Ethnicity and Gender from Vietnam. *Climate*, *11*(4), 85. https://doi.org/10.3390/cli11040085

Singh, P., Tabe, T., & Martin, T. (2022). The role of women in community resilience to climate change: A case study of an Indigenous Fijian community. *Women's Studies International Forum*, *90*, 102550. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2021.102550

Sumarni, L., & Rudiatin, E. (2021). WOMEN'S ROLE IN MITIGATION AND DISASTER MANAGEMENT. *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship*, *3*(1), 1. https://doi.org/10.24853/baskara.3.1.1-12

Thaler, T., Zischg, A., Keiler, M., & Fuchs, S. (2018). Allocation of risk and benefits—distributional justices in mountain hazard management. *Regional Environmental Change*, *18*(2), 353–365. https://doi.org/10.1007/s10113-017-1229-y

Tyukavina, A., Potapov, P., Hansen, M. C., Pickens, A. H., Stehman, S. V., Turubanova, S., Parker, D., Zalles, V., Lima, A., Kommareddy, I., Song, X.-P., Wang, L., & Harris, N. (2022). Global

Trends of Forest Loss Due to Fire From 2001 to 2019. *Frontiers in Remote Sensing*, *3*. https://doi.org/10.3389/frsen.2022.825190

Ulzikri, Ahmad Robi. 2023. "Politik Dan Bencana : Kajian Rekognisi Hak Masyarakat Di Pulau Terisolir Di Masa Krisis." *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSTER)* 2(1):28–39.

Utomo, B., Yusmiono, B. A., Prasetya, A. P., Julita, M., & Putri, M. K. (2022). Analisis Tingkat Bahaya Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, *10*(1), 30–41. https://doi.org/10.14710/jwl.10.1.30-41

Warga, P., Bencana, P., Di, B., Joyotakan, K., Surakarta, K., Rahmawati, A. M., & Gati, N. W. (n.d.). Hubungan Tingkat Spiritualitas Dengan Tingkat Resiliensi. *Public Health and Safety International Journal Oktober 2024*, *4*(2), 2715–5854. https://doi.org/10.55642

Vol. 4, No. 1, Maret 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Inovasi Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan

Vivi Sylvia Purborini [(1,a)*], Ida Bagus Suryanatha [(1,b)]
[(1)]Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia
[(2)]Sosiologi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
Email : [(a*)]velioraps1@gmail.com, [(b)]bagusnatha11@fisip.upr.ac.id

A B S T R A K

Inovasi teknologi memegang peran penting dalam era digital saat ini, dengan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pemberdayaan masyarakat. Transformasi teknologi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan sosial, dan membangun kemandirian ekonomi. Namun demikian, implementasi inovasi teknologi bukan tanpa tantangan, terutama dalam konteks keberagaman kemampuan akses dan penerimaan di masyarakat. pendekatan penelitian harus mencakup elemen pengumpulan data yang terfokus, analisis yang rinci, serta interpretasi kritis dari temuan yang berkaitan dengan dinamika inovasi teknologi dalam masyarakat. Metode campuran, yang menggabungkan teknik kualitatif dan kuantitatif, sering dipilih guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam komunitas untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi lokal dan kemandirian, yang dapat dilakukan melalui partisipasi aktif dan upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menegaskan bahwa inovasi teknologi memainkan peran krusial dalam pemberdayaan masyarakat dengan mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Selama penelitian, ditemukan bahwa keberhasilan implementasi teknologi bergantung pada aksesibilitas dan adaptasi lokal. Meski terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman masyarakat, integrasi antara berbagai pihak dapat mempercepat adopsi teknologi.

Kata Kunci: Inovasi Teknologi, Pemberdayaan Masyarakat, Membangun Kemandirian, Kesejahteraan

A B S T R A C T

Technological innovation plays an important role in the current digital era, with a significant impact on various aspects of human life, including community empowerment. Technological transformation provides opportunities for society to improve the quality of life, reduce social inequality, and build economic independence. However, the implementation of technological innovation is not without challenges, especially in the context of diversity in access and acceptance in society. Research approaches must include elements of focused data collection, detailed analysis, and critical interpretation of findings related to the dynamics of technological innovation in society. Mixed methods, which combine qualitative and quantitative techniques, are often chosen in order to obtain a more comprehensive picture of the phenomenon under study. Community empowerment is a concept that emphasizes increasing the capacity of individuals and groups in communities to control their own lives. This approach focuses on developing local potential and independence, which can be done through active participation and collaborative efforts between various stakeholders. This research confirms that technological innovation plays a crucial role in empowering society by encouraging economic independence and improving prosperity. During the research, it was discovered that successful implementation of technology depends on accessibility and local adaptation. Even though there are challenges such as limited infrastructure and lack of public understanding, integration between various parties can accelerate technology adoption.

Keywords: *Technological Innovation, Community Empowerment, Building Independence, Prosperity*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
23.02.2025	27.02.2025	28.03.2025	31.03.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Inovasi teknologi memegang peran penting dalam era digital saat ini, termasuk pemberdayaan masyarakat. Transformasi teknologi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan sosial, dan membangun kemandirian ekonomi. Namun demikian, implementasi inovasi teknologi bukan tanpa tantangan, terutama dalam konteks keberagaman kemampuan akses dan penerimaan di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara inovasi teknologi bisa secara efektif digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada aspek-aspek yang dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan. Pendahuluan ini memberikan gambaran umum tentang pentingnya topik ini. (Daraba et al.2023). Kemajuan teknologi yang cepat telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Inovasi-inovasi ini membuka peluang bagi pemberdayaan masyarakat, namun tetap menghadapi berbagai tantangan seperti disparitas akses dan pengetahuan. Masyarakat di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur teknologi, yang menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan kemajuan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana inovasi teknologi dapat diintegrasikan secara efektif guna memberdayakan masyarakat, terutama di wilayah yang kurang terjangkau. Pemberdayaan melalui teknologi dapat mencakup peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial, yang pada akhirnya mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. (Muttaqin et al.2021).

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis bagaimana inovasi teknologi dapat diimplementasikan secara efektif untuk memberdayakan masyarakat. Pertanyaan utama yang diangkat adalah: Bagaimana inovasi teknologi dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat? Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi teknologi tersebut? Selain itu, bagaimana strategi dan model kolaborasi yang dapat mendorong penerimaan dan pemanfaatan teknologi di masyarakat? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui pendekatan analitis yang mendalam, dengan menggali informasi dari berbagai kasus studi dan situasi nyata di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran inovasi teknologi dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat implementasi teknologi di berbagai konteks masyarakat.

Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengembangkan model atau strategi efektif yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan teknologi dengan upaya pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk memfasilitasi proses tersebut. Melalui tujuan-tujuan ini, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur yang ada dan menawarkan solusi praktis bagi para pemangku kepentingan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat, serta menawarkan perspektif baru dalam penelitian terkait. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam memfasilitasi integrasi teknologi dalam upaya pemberdayaan. Sementara bagi masyarakat umum, terutama di daerah yang kurang terjangkau, hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan panduan praktis dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam inovasi teknologi untuk pemberdayaan masyarakat mencakup sejumlah pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dan dapat diimplementasikan guna membangun kemandirian dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, pendekatan penelitian harus mencakup elemen pengumpulan data yang terfokus, analisis yang rinci, serta interpretasi kritis dari temuan yang berkaitan dengan dinamika inovasi teknologi dalam masyarakat.

Metode campuran, yang menggabungkan teknik kualitatif dan kuantitatif, sering dipilih guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi dapat dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat secara efektif. (Rijal et al.2023). Metode penelitian kualitatif dalam studi inovasi teknologi berfokus pada pemahaman mendalam mengenai konteks sosial dan budaya dari pemberdayaan masyarakat. Teknik seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus digunakan untuk menggali wawasan mengenai pengalaman subjektif individu dan komunitas terkait implementasi teknologi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi motivasi, persepsi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian kualitatif sering memberikan informasi yang kaya dan detail yang membantu dalam merumuskan strategi inovasi yang relevan dan diterima oleh masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya, metoda ini menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas pendekatan sesuai dengan dinamika lapangan. (Rohyadi et al.2024). Penelitian kuantitatif dalam konteks inovasi teknologi untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data secara statistik guna menghasilkan temuan yang dapat diuji dan digeneralisasikan. Pendekatan ini biasanya melibatkan pengumpulan data melalui survei, kuesioner, dan eksperimen yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat adopsi teknologi, efektivitas program pemberdayaan, serta dampak pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan alat statistik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, metode kuantitatif menyediakan dasar bukti yang kuat untuk menilai keberhasilan intervensi teknologi dan menginformasikan kebijakan yang berkaitan dengan inovasi dan pemberdayaan masyarakat. (Punu et al., 2021).

Studi kasus dalam konteks ini berfungsi untuk menguji penerapan inovasi teknologi dalam pemberdayaan masyarakat secara mendalam dan komprehensif. Metode studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran konkret bagaimana konsep teoritis diterapkan dalam situasi nyata. Dengan memahami dinamika lokal dan kondisi sosial-ekonomi spesifik dari komunitas yang dipilih, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kekurangan dari penerapan teknologi tersebut. Studi ini tidak hanya menilai hasil dari pengenalan teknologi tetapi juga proses adaptasi dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut. (Suryani et al., 2023). Pemilihan studi kasus harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan relevansi dan keberagaman konteks lokal serta jenis teknologi yang diimplementasikan. Kriteria pemilihan meliputi keterwakilan karakteristik demografis, ekonomi, dan geografis dari masyarakat yang sedang diberdayakan. Selain itu, tingkat kemajuan teknologi yang ada, kesiapan infrastruktur, dan dukungan kebijakan lokal juga menjadi pertimbangan utama. Dengan begitu, hasil studi diharapkan dapat memberikan wawasan yang signifikan dan bisa digeneralisasi untuk konteks yang lebih luas, sekaligus menawarkan solusi pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan spesifik. (Panggabean and Harahap2024). Analisis studi kasus dilakukan dengan mengevaluasi data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen sekunder. Pendekatan analitis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penggunaan teknologi, hambatan yang dihadapi masyarakat, serta kesempatan pengembangan lebih lanjut. Analisis fokus pada bagaimana teknologi mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya setempat serta kemampuan masyarakat untuk mengeksploitasi teknologi bagi peningkatan kemandirian dan kesejahteraan. Temuan ini kemudian dievaluasi untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan keberlanjutan teknologi dalam konteks pemberdayaan. (Lubis2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam komunitas untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi lokal dan kemandirian, yang dapat dilakukan melalui partisipasi aktif dan upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, pemberdayaan melibatkan sejumlah langkah strategis, termasuk penciptaan kesempatan belajar, akses informasi, dan pengembangan keterampilan yang relevan. Pemberdayaan bertujuan

untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan, memperbaiki kesejahteraan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (Achmad2024). Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses di mana individu, komunitas, dan organisasi mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Definisi ini mencakup aspek psikologis dan struktural, yang meliputi peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan mengakses sumber daya yang diperlukan. Pembangunan kepercayaan, jaringan sosial, dan kapabilitas kolektif juga menjadi bagian integral dari definisi ini. Pemberdayaan tidak hanya mengenai peningkatan kekuatan ekonomi, tetapi juga keberdayaan dalam menyuarakan aspirasi dan meningkatkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan masyarakat. (As' et al.2024). Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi kesetaraan, partisipasi, keberlanjutan, dan kesadaran kritis. Kesetaraan menekankan pada pentingnya menyediakan kesempatan yang adil bagi setiap anggota masyarakat untuk terlibat dan berkembang. Partisipasi adalah prinsip kunci yang memastikan bahwa semua suara dalam masyarakat didengar dan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan.

Keberlanjutan mengacu pada pengembangan strategi dan tindakan yang memungkinkan komunitas untuk mempertahankan inisiatif pemberdayaan dalam jangka panjang. Sementara itu, kesadaran kritis menyoroti perlunya memahami keberadaan dan dampak struktur sosial yang ada, sehingga masyarakat dapat mengatasi hambatan dan menciptakan perubahan positif secara efektif. (Rista and Wiranata2024). Inovasi teknologi telah menjadi elemen kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penggunaan teknologi, masyarakat mampu mengakses lebih banyak informasi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pemberdayaan ekonomi melalui kesempatan baru dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Teknologi memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, menghubungkan mereka dengan sumber daya dan jaringan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kesenjangan akses informasi dan partisipasi, sekaligus membuka jalan bagi terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera, dengan memanfaatkan teknologi untuk inovasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. (Apriliana and Pujianto2024).

Inovasi teknologi merujuk pada pengembangan dan penerapan solusi teknis baru yang meningkatkan atau merombak cara kerja yang ada dalam berbagai bidang. Ini mencakup perancangan dan penerapan teknologi baru atau peningkatan signifikan dari teknologi yang ada, yang menghasilkan efisiensi lebih baik, aksesibilitas yang lebih luas, dan solusi yang lebih efektif untuk tantangan masyarakat. Inovasi teknologi tidak hanya terbatas pada pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga melibatkan pendekatan baru dalam penerapannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, inovasi teknologi memungkinkan masyarakat untuk mengakses pengetahuan dan sarana yang diperlukan untuk memecahkan masalah lokal, memungkinkan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. (Amane and Laali2024).

Inovasi teknologi memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan membuka akses terhadap sumber daya dan informasi yang sebelumnya tidak dapat dijangkau, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui teknologi, masyarakat dapat membangun jaringan, mempelajari keterampilan baru, dan menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Secara khusus, teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan distribusi informasi yang lebih merata, sementara teknologi pertanian modern dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Inovasi teknologi juga memungkinkan pelayanan publik yang lebih efisien melalui platform digital. Dengan demikian, inovasi teknologi tidak hanya memfasilitasi penguatan ekonomi secara langsung, tetapi juga memperkuat kedudukan sosial ekonomi masyarakat dalam skala yang lebih luas. (Judijanto et al.2023).

Inovasi teknologi telah memberikan dampak signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh infrastruktur tradisional. Studi kasus menunjukkan bahwa teknologi dapat mengubah ekosistem sosial dan ekonomi melalui berbagai cara, mulai dari peningkatan akses informasi hingga penguatan kapasitas

lokal. Penggunaan aplikasi mobile telah membawa pendidikan ke daerah terpencil, sementara IoT telah merevolusi sektor pertanian derngan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi hasil produksi. Kedua contoh ini menggambarkan bagaimana teknologi mutakhir dapat diimplementasikan secara efektif untuk memperbaiki keadaan hidup masyarakat, membangun kemandirian ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. (Martan et al.2023).

Aplikasi mobile menjadi solusi inovatif dalam mengatasi tantangan pendidikan di daerah terpencil, di mana akses terhadap tenaga pengajar dan bahan ajar berkualitas sering kali terbatas. Melalui aplikasi ini, anak-anak dapat mengakses bahan pelajaran interaktif dan konten edukatif yang mendukung kurikulum nasional. Aplikasi ini juga memungkinkan pembelajaran mandiri, yang mempercepat kemampuan literasi dan numerasi siswa. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile didukung dengan peningkatan infrastruktur jaringan telekomunikasi, yang membuka peluang pendidikan lebih luas bagi anak-anak di daerah terpencil. Program ini telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan partisipasi sekolah dan prestasi akademik anak-anak, sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan antara kota dan pedesaan. (Najjar and Oktasari2023). Internet of Things (IoT) memainkan peran penting dalam transformasi pertanian menuju praktik yang lebih berkelanjutan, terutama melalui integrasi teknologi sensor dan analisis data dalam aktivitas pertanian. Dengan memanfaatkan perangkat IoT, petani dapat memonitor kondisi lingkungan pertanian secara real-time, termasuk kelembapan tanah, kondisi udara, dan parameter pertumbuhan tanaman. Informasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien, khususnya dalam penggunaan air dan pestisida, yang pada gilirannya mengurangi dampak lingkungan dan menurunkan biaya operasional. Studi kasus menunjukkan bahwa penerapan IoT dalam pertanian telah meningkatkan hasil panen hingga 15% dan mengoptimalkan sumber daya alam, memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan. (Mendrofa et al.2024).

Meski inovasi teknologi memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat, ada masalah dalam implementasinya. Tantangannya adalah kesenjangan digital yang masih signifikan, di mana tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi mutakhir. Ketidaksetaraan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur yang mendukung konektivitas internet dan ketersediaan perangkat teknologi. Selain itu, tantangan lain muncul dari aspek kebijakan, di mana regulasi yang tidak adaptif terhadap perubahan teknologi dapat menghambat laju inovasi serta adopsi, sehingga memerlukan pendekatan multistakeholder untuk mengatasi isu-isu tersebut. (Yandra et al.2024).

Daerah terpencil di Indonesia menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi yang signifikan, menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi modern untuk pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan ini disebabkan oleh geografi yang sulit dijangkau, biaya tinggi untuk pembangunan infrastruktur teknologi, serta minimnya investasi dari sektor publik atau swasta. Selain itu, kualitas koneksi internet yang rendah dan ketiadaan jaringan listrik yang stabil menjadi penghalang utama bagi masyarakat di daerah terpencil untuk menikmati manfaat dari inovasi teknologi. Situasi ini mengharuskan adanya perhatian khusus dan solusi berbasis kebijakan, seperti insentif bagi investasi infrastruktur dan pengembangan teknologi alternatif yang lebih sesuai. (Hidayatullah et al.2023).

Kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru merupakan aspek penting dalam keberhasilan implementasi inovasi teknologi. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi digital, ketidakpercayaan terhadap teknologi baru, serta kebiasaan yang sudah mengakar dapat menghambat adopsi teknologi. Sering kali, masyarakat dihadapkan pada ketakutan akan perubahan yang dibawa oleh teknologi, sehingga memerlukan pendekatan edukatif yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam penyediaan program pelatihan dan sosialisasi dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi hambatan ini, serta memfasilitasi transisi menuju masyarakat yang lebih terbuka terhadap inovasi. (Abdussamad et al.2024). Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi, strategi yang efektif harus mencakup pengelolaan sumber daya yang holistik, pemberian pelatihan yang relevan, serta penilaian kebutuhan masyarakat setempat secara tepat. Model implementasi harus adaptif terhadap kondisi sosial dan geografis masing-masing wilayah. Ini mencakup pemetaan ekosistem teknologi lokal dan pengembangan kebijakan yang

memastikan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini memperkuat kapabilitas lokal sekaligus mengatasi ketimpangan digital dengan melibatkan aktor-aktor penting yang bisa memberikan dampak signifikan bagi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. (Izzati2024).

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi inovasi teknologi. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator utama melalui regulasi yang kondusif serta pengembangan infrastruktur dasar. Sektor swasta berkontribusi melalui investasi teknologi dan inovasi operasional, sedangkan masyarakat berperan aktif dengan berpartisipasi dalam proses adopsi teknologi dan penilaian kebutuhan lokal. Kerjasama ini tidak hanya menghasilkan solusi yang lebih relevan dengan kondisi lapangan, tetapi juga mampu meningkatkan akseptabilitas dan keberlanjutan proyek pemberdayaan berbasis teknologi. (Ibrahim et al.2024). Model kemitraan publik-swasta dalam pengembangan teknologi untuk masyarakat menekankan pada pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang antara pemerintah dan sektor swasta. Kemitraan ini mendorong inovasi dengan memanfaatkan sumber daya dan expertise masing-masing pihak. Pemerintah berperan sebagai penyedia regulasi dan dukungan infrastruktur, sementara sektor swasta memberikan inovasi teknologi, pendanaan, dan keahlian teknis. Model ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses lebih mudah terhadap teknologi canggih melalui proyek yang lebih terukur dan berkelanjutan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. (Karim et al.2024).

Evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari inovasi teknologi pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk menilai sejauh mana teknologi telah berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap partisipasi masyarakat, peningkatan keterampilan penduduk lokal, dan aksesibilitas terhadap teknologi. Dampak ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan dampak sosial menyoroti perubahan dalam kualitas hidup, pemerataan kesempatan, dan penguatan jejaring sosial. Sebagai gambaran, program pelatihan berbasis teknologi telah berhasil meningkatkan kemampuan warga untuk memanfaatkan platform digital dalam mendukung kegiatan ekonomi mereka. (Togatorop et al.2024).

Metode evaluasi dampak sosial bertujuan untuk mengukur perubahan dalam aspek sosial yang dihasilkan dari penerapan inovasi teknologi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah metode kualitatif, seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, yang membantu dalam memahami persepsi dan pengalaman masyarakat terkait perubahan sosial. Metode kuantitatif, seperti survei dan analisis statistik, juga berperan penting dalam mengukur indikator spesifik seperti pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan sosial. Kombinasi kedua metode ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika sosial yang terjadi serta mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi lebih lanjut guna memastikan keberlanjutan dampak positif inovasi tersebut. (Munandar et al.2023). Dalam menilai dampak ekonomi dari inovasi teknologi pemberdayaan masyarakat, indikator kesejahteraan ekonomi yang diukur mencakup aspek-aspek seperti peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan kesempatan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator seperti akses terhadap keuangan dan peningkatan daya saing ekonomi lokal juga merupakan elemen penting yang dipantau. Data kuantitatif mengenai perubahan pada tingkat tabungan dan investasi masyarakat dapat menggambarkan dampak positif dari teknologi terhadap stabilitas ekonomi. Di sisi lain, pengukuran secara kualitatif melalui studi kasus dan wawancara membantu memahami perubahan perilaku ekonomi dan adaptasi masyarakat terhadap peluang yang ditawarkan oleh teknologi baru. (Akhadi, 2022).

Kemandirian dan kesejahteraan merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kemandirian mencakup kemampuan individu atau komunitas untuk mengelola sumber daya dan menjalani kehidupan tanpa ketergantungan berlebih pada pihak eksternal. Hal ini melibatkan penguasaan keterampilan, akses terhadap informasi, dan penggunaan teknologi yang adapun untuk mencapai tujuan pribadi maupun kolektif. Sebaliknya, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana individu atau masyarakat menikmati kesehatan, kebahagiaan, dan kenyamanan secara berkesinambungan. Penerapan teknologi dapat memperkuat kedua konsep

ini dengan menyediakan sarana untuk efisiensi, inovasi, dan penciptaan nilai tambah. Pemerataan akses terhadap teknologi penting agar kemandirian dan kesejahteraan dapat terwujud secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kemajuan teknologi harus dirancang dan diimplementasikan secara inklusif guna memastikan tidak ada yang tertinggal dalam arus perkembangan. (Ismail & Nurlia, 2024).

Teknologi memainkan peran vital dalam memperkuat kemandirian individu dan masyarakat. Dengan adopsi teknologi yang tepat, individu dapat memperoleh akses lebih mudah ke informasi, kesempatan pendidikan, serta potensi untuk membuka usaha mandiri. Misalnya, teknologi informasi memungkinkan pelaku usaha kecil mengakses pasar yang lebih luas melalui platform daring, meningkatkan penjualan dan efisiensi operasional. Selain itu, teknologi juga menyediakan alat untuk peningkatan keterampilan melalui kursus online dan pelatihan jarak jauh, yang pada akhirnya membekali masyarakat dengan kemampuan kompetitif di tingkat global. Penggunaan teknologi dalam pertanian contohnya, seperti sistem irigasi otomatis atau penggunaan drone untuk pemantauan tanaman, membantu petani mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi ketergantungan pada metode tradisional, sehingga meningkatkan kemandirian secara berkelanjutan. (Amiyah2024).

Inovasi teknologi berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, telah membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, bahkan di daerah terpencil. Di sektor pertanian, teknologi seperti sensor tanah dan drone membantu petani meningkatkan hasil panen, sementara teknologi keuangan digital memfasilitasi inklusi keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani. Selain itu, inovasi teknologi dalam energi terbarukan menawarkan peluang untuk menurunkan biaya energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak berkelanjutan. Melalui adopsi teknologi inovatif, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik secara holistik, mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam kehidupan sehari-hari. (Harini et al.2023).

Pengembangan teknologi berkelanjutan merupakan aspek krusial dalam memfasilitasi keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Hal ini melibatkan penciptaan teknologi yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi serta sosial. Penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pembuatan dan pengelolaan produk dapat mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan juga diperlukan untuk menciptakan inovasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengimplementasikan teknologi ini secara luas dan efektif demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. (Andini, 2023).

Teknologi telah menjadi pilar penting dalam berbagai sektor kehidupan, menjadi katalis utama dalam mempercepat kemajuan ekonomi dan sosial. Dalam sektor pertanian, teknologi seperti penggunaan drone dan sensor canggih meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memungkinkan pemantauan kondisi tanaman secara real-time. Industri manufaktur memanfaatkan otomasi dan robotika untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan efektif, sementara teknologi energi terbarukan menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil. Semua ini menunjukkan bagaimana penerapan teknologi berperan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. (Jaya et al.2023).

Penggunaan TIK dapat mempercepat penyampaian layanan publik, memungkinkan transaksi ekonomi lebih efisien, dan membuka peluang kerja baru melalui pengembangan ekonomi digital. Selain itu, TIK memfasilitasi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, di mana individu dapat memperoleh materi pembelajaran serta layanan medis dari jarak jauh. Dalam konteks sosial, media sosial dan aplikasi komunikasi mendukung interaksi antar komunitas, memberikan ruang partisipasi yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, investasi dan pengembangan TIK harus menjadi prioritas untuk membangun kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan di era digital ini. (Mardinata et al.2023.

Teknologi ramah lingkungan menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan. Inovasi seperti

panel surya, kendaraan listrik, dan pengelolaan limbah berteknologi tinggi menjadi contoh konkret bagaimana teknologi dapat mendukung kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Implementasi teknologi ini juga mendorong perkembangan ekonomi hijau yang memicu lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya tidak terbarukan. Dengan adopsi yang lebih luas dan pengembangan kebijakan yang mendukung, teknologi ramah lingkungan tidak hanya menawarkan solusi atas permasalahan ekologis, tetapi juga menjadi motor utama bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. (Fadillah et al.2025).

Teknologi kesehatan telah memainkan peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi di bidang layanan medis dan aksesibilitas informasi kesehatan. Penggunaan telemedicine, misalnya, memungkinkan konsumen mengakses layanan kesehatan dari rumah, mengurangi hambatan geografis. Di sisi lain, wearable devices membantu individu memantau kesehatan secara real-time, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan. Teknologi seperti big data dan AI meningkatkan kualitas diagnosis dan personalisasi perawatan, sementara aplikasi kesehatan digital mempromosikan gaya hidup sehat. Keseluruhan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup serta efisiensi dan aksesibilitas layanan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Indriyani et al.2022).

Teknologi pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan kemandirian intelektual dengan menghadirkan akses informasi dan sumber belajar yang lebih luas serta beragam. Melalui teknologi pendidikan, pelajar dapat mengakses berbagai platform online untuk memperoleh pengetahuan baru, mengikuti kursus daring, serta bergabung dalam komunitas belajar global yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, adanya aplikasi dan perangkat lunak berbasis teknologi memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan adaptif sesuai kebutuhan individu, yang dapat meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Dengan demikian, teknologi pendidikan tidak hanya memudahkan akses ilmu pengetahuan tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri secara intelektual. (Nurhayati and Is2024).

Teknologi pertanian memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan, terutama melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas. Penerapan teknologi seperti sistem irigasi pintar, pemantauan tanah dengan sensor, dan penggunaan drone untuk pemetaan lahan pertanian dapat mengoptimalkan hasil panen. Selain itu, teknologi bioteknologi, seperti rekayasa genetika pada tanaman, mampu menghasilkan varietas tahan hama dan adaptif terhadap perubahan iklim. Penggunaan data analitik dalam pemetaan kebutuhan nutrisi tanah juga menjadi inovasi penting untuk memastikan tanaman mendapatkan asupan tepat, mengurangi pemakaian pupuk yang tidak efisien. Secara keseluruhan, teknologi mendorong kemandirian pangan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi tantangan eksternal. (Abdillah & Vaulina, 2023).

Teknologi industri memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan efisiensi produksi dan pengurangan biaya operasional. Dengan adopsi teknologi otomatisasi dan robotika, sektor industri mampu memproduksi barang dengan kecepatan dan ketepatan yang lebih tinggi, sehingga memenuhi permintaan pasar secara efektif. Selain itu, teknologi industri juga mendukung penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam bidang teknik dan manajemen. Penerapan teknologi canggih dalam proses produksi juga berkontribusi terhadap pengurangan limbah dan peningkatan keberlanjutan lingkungan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, teknologi industri tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi tetapi juga menyumbang pada pembangunan sosial yang berkelanjutan. (Mindarta et al.2024). Kolaborasi dan kemitraan dalam pengembangan teknologi merupakan elemen penting yang dapat mendorong inovasi dan akselerasi kemajuan teknologi. Melalui kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan institusi pendidikan, pengembangan teknologi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Misalnya, sektor swasta sering kali menyediakan sumber daya finansial dan keahlian teknis, sedangkan lembaga pendidikan dan riset menyumbang ide-ide segar dan penelitian dasar.

Pemerintah berperan menciptakan kebijakan proaktif yang mendorong kolaborasi antar pihak, sehingga dapat menciptakan ekosistem inovasi yang sehat dan mendukung kemandirian

teknologi nasional. Kerjasama internasional juga memperluas akses terhadap teknologi terbaru dan praktik terbaik, menjadikan sinergi ini sebagai landasan vital menuju kesejahteraan melalui teknologi yang relevan dan berdaya saing. (Dewi & Nyoman, 2024). Pengembangan teknologi yang pesat menghadirkan tantangan dalam merumuskan regulasi dan etika yang sesuai. Regulasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak melanggar hak asasi manusia atau merugikan pihak lain.

Pemerintah dan pembuat kebijakan harus menyusun kerangka hukum yang adaptif, mendukung, dan melindungi dari ancaman cyber, penyalahgunaan data, serta pelanggaran privasi. Di sisi lain, etika berperan dalam menuntun pengembang dan pengguna teknologi untuk bertindak dengan rasa tanggung jawab sosial, memprioritaskan keamanan pengguna, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkomitmen pada kemajuan teknologi yang bertanggung jawab. (Pakina & Solekhan, 2024). Peran pemerintah dalam mendorong inovasi teknologi sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan dan penerapan teknologi baru. Pemerintah dapat berperan melalui kebijakan yang mendukung riset dan pengembangan (R&D), seperti pemberian insentif pajak, pendanaan, dan subsidi. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta perguruan tinggi untuk mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi. Pemerintah juga perlu memastikan regulasi yang adaptif dan pro-inovasi agar tidak menghambat penerapan teknologi baru. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat menciptakan lingkungan yang inovatif sekaligus meningkatkan daya saing nasional di kancah global. (Maisaroh & Untari, 2024).

Pendidikan memiliki peran krusial dalam menumbuhkan literasi teknologi yang esensial bagi individu untuk beradaptasi dalam era digital. Dengan kurikulum yang terintegrasi teknologi, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar, tetapi juga keterampilan kritis dalam memecahkan masalah menggunakan teknologi. Pelatihan guru yang berkelanjutan memastikan mereka dapat mengajarkan teknologi secara efektif, sementara laboratorium dan alat digital di sekolah menyediakan praktik langsung. Selain itu, kolaborasi dengan industri teknologi dapat memperkaya materi ajar, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir inovatif dan meningkatkan kesiapan kerja di masa depan, sejalan dengan perkembangan teknologi yang dinamis. (Sihombing et al.2024).

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan teknologi menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan adopsi dan keberlanjutan inovasi teknologi. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam hal penerimaan, tetapi juga dalam proses desain dan implementasi teknologi. Dengan melibatkan masyarakat, pengembang teknologi dapat lebih memahami kebutuhan nyata dan konteks budaya lokal yang berpengaruh pada penerimaan teknologi tersebut. Keterlibatan ini juga dapat memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat maksimal dan sesuai dengan harapan pengguna akhirnya. Lebih jauh, partisipasi masyarakat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap teknologi yang diadopsi, serta meminimalisir resistansi yang mungkin muncul. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan tingkat literasi teknologi masyarakat sehingga mereka dapat berperan secara aktif dan konstruktif dalam pengembangan teknologi, menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. (Lubis and Sinaga2024).

Penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi memegang peranan krusial dalam membangun kemandirian suatu bangsa dengan menghadirkan solusi inovatif untuk berbagai tantangan lokal. Dengan menanamkan investasi yang signifikan dalam litbang, negara dapat merancang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks domestik, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini tidak hanya mempercepat proses industrialisasi tetapi juga membuka peluang kerja baru serta memupuk kemampuan tenaga kerja setempat. Selain itu, litbang teknologi dapat mendorong munculnya sektor-sektor industri baru yang berbasis pengetahuan, yang memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kancah global. Dengan demikian, litbang teknologi bukan hanya pilar kemandirian tetapi juga mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Anisa & Aryani, 2024). alam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk kemandirian dan kesejahteraan, berbagai tantangan dan peluang perlu dikenali

secara cermat. Tantangan utama meliputi kesenjangan akses terhadap teknologi akibat disparitas infrastruktur dan keterbatasan literasi digital.

Sementara itu, peluang besar terletak pada potensi teknologi untuk menciptakan efisiensi, inovasi, dan solusi berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup. Peningkatan kemandirian dapat dicapai melalui adopsi teknologi pada sektor-sektor vital seperti pertanian dan pendidikan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk melewati hambatan dan memaksimalkan manfaat teknologi. Oleh sebab itu, kebijakan inklusif, investasi infrastruktur, serta pelatihan keterampilan digital menjadi esensial agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi. (PERORANGAN & INDONESIA)
Konsep dasar pemberdayaan masyarakat berfokus pada proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Ini melibatkan usaha sistematis untuk membangun kemandirian melalui pendidikan, pelatihan, dan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, serta politik. Pendekatan ini menekankan pentingnya penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang relevan sebagai modal utama. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat diposisikan sebagai subjek penentu nasib mereka, bukan sekadar objek program pembangunan. Hal ini menuntut keterlibatan aktif dan inklusif, mendorong perubahan struktural yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi dan peningkatan kesejahteraan. Membangun jaringan dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat. (Fitrianesti & Muhtadi, 2022)

Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang memberikan kemampuan kepada individu dan kelompok dalam komunitas untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengendalikan sumber daya dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Pemberdayaan mencakup peningkatan akses terhadap informasi, keterampilan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan. Melalui pemberdayaan, masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Proses ini termasuk dalam rangkaian tindakan yang sistematis dan terkoordinasi, bertujuan untuk mengembangkan potensi lokal serta memperkuat kedudukan sosial masyarakat di mata pihak eksternal. Dengan demikian, pemberdayaan berfungsi sebagai katalisator bagi terciptanya perubahan yang lebih demokratis dan berkelanjutan dalam struktur sosial serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. (As' et al.2024)

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa aspek fundamental yang memastikan efektivitas dan keberlanjutan proses pemberdayaan(Ulzikri 2020). Salah satu prinsip utama adalah partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku kunci. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap informasi adalah elemen penting lainnya yang memastikan semua pihak memahami tujuan dan manfaat program yang dijalankan. Keadilan sosial menjadi landasan yang menekankan distribusi yang adil atas sumber daya dan keuntungan dari proses pemberdayaan. Pengakuan dan penghormatan atas kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat juga penting untuk menghindari benturan budaya dan menciptakan solusi yang kontekstual. Akhirnya, prinsip kewirausahaan atau peningkatan kapasitas ekonomi pribadi dan kolektif sering diintegrasikan untuk mendorong kemandirian finansial serta mengurangi ketergantungan. (Anisa et al.2024)

Peran teknologi dalam pemberdayaan masyarakat tak dapat diabaikan, mengingat kemampuannya untuk meningkatkan akses informasi dan sumber daya. Teknologi dapat menjadi alat yang signifikan dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Misalnya, dengan adanya internet, masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh pengetahuan dan potensi pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, teknologi memungkinkan berjalannya komunikasi yang lebih efektif dan efisien antara masyarakat dan pembuat kebijakan, sehingga partisipasi warga dalam pengambilan keputusan bisa lebih nyata. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam upaya pemberdayaan menjadi krusial untuk mendukung pertumbuhan komunitas yang mandiri dan sejahtera. (Rijal et al.2023)

Inovasi teknologi telah menciptakan peluang baru dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengatasi batasan-batasan tradisional. Salah satu inovasi penting adalah pengembangan aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan akses layanan keuangan digital di wilayah terpencil. Hal ini tidak hanya mendorong inklusi keuangan, tetapi juga memfasilitasi transaksi bisnis dan pengelolaan keuangan personal. Sebagai tambahan, platform pembelajaran online memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa batasan geografis. Dengan demikian, inovasi teknologi menjalankan fungsi sebagai pendorong utama dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sosial. (Jurnal et al.2022)

Aplikasi teknologi untuk kesejahteraan mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di bidang kesehatan, telemedicine memungkinkan pasien di daerah terpencil untuk mendapatkan konsultasi medis tanpa harus bepergian jauh, yang secara signifikan mengurangi biaya dan waktu. Dalam pendidikan, platform e-learning menyediakan materi yang dapat diakses kapan saja, memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal. Pada sektor ekonomi, solusi teknologi seperti platform e-commerce dan pembayaran digital membantu usaha kecil dan menengah untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Melalui aplikasi-aplikasi ini, teknologi menjadikan kesejahteraan lebih inklusif dan merata. (Sulistiyaningsih et al.2024)

Untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat, strategi yang efektif harus mencakup upaya holistik yang melibatkan peningkatan akses, literasi digital, dan dukungan infrastruktur. Akses internet yang merata perlu diperluas ke daerah terpencil untuk memastikan inklusi digital. Selain itu, pelatihan literasi digital harus ditingkatkan guna memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi secara mandiri. Ketersediaan perangkat lunak dan aplikasi yang relevan, sesuai dengan kebutuhan lokal, juga harus didorong. Penguatan infrastruktur seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan listrik yang andal memainkan peran penting dalam memastikan teknologi dapat diakses dan digunakan secara efektif. Kebijakan tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan potensi lokal dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal. (Ramdhan, 2025)(Maulida, 2024).

Kebijakan publik dan regulasi memainkan peranan penting dalam peningkatan pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat. Regulasi yang adaptif dan proaktif diperlukan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, serta mengatasi isu-isu seperti privasi data, keamanan cyber, dan hak cipta. Pemerintah harus merancang regulasi yang mendorong inovasi serta partisipasi dari berbagai sektor, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Kebijakan publik harus difokuskan pada pengurangan kesenjangan digital melalui subsidi atau insentif untuk infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Selain itu, pembentukan kerangka kerja regulasi yang jelas dan mendukung kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan penerapan dan efektivitas teknologi dalam pemberdayaan masyarakat. (Rachmawati et al.2024). Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan elemen krusial dalam strategi peningkatan pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menyediakan kebijakan yang mendukung, sementara sektor swasta menyumbang teknologi inovatif dan modal. Masyarakat, di sisi lain, menyediakan wawasan dan umpan balik untuk menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan lokal. Program kemitraan publik-swasta dapat meningkatkan efektivitas dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari masing-masing pihak. Kemitraan ini dapat diperluas melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung program pelatihan dan pengembangan kapasitas di tingkat lokal, untuk memastikan adopsi teknologi yang lebih merata dan berkelanjutan. (Rachmawati et al.2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa inovasi teknologi memainkan peran krusial dalam pemberdayaan masyarakat dengan mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Selama penelitian, ditemukan bahwa keberhasilan implementasi teknologi bergantung pada aksesibilitas dan adaptasi lokal. Meski terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan

kurangnya pemahaman masyarakat, integrasi antara berbagai pihak dapat mempercepat adopsi teknologi. Dalam konteks ini, strategi kolaboratif dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat memberikan dampak positif yang signifikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi sarana efektif dalam pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses informasi dan fasilitas.

Studi kasus yang dilakukan memperlihatkan dampak nyata dalam pendidikan dan pertanian, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Peran penting dari kerjasama antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal sangat menonjol dalam menghadapi resistensi awal terhadap teknologi baru, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan dan pemanfaatan secara lebih luas. Untuk memaksimalkan peran teknologi dalam pemberdayaan masyarakat, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur dan literasi teknologi di kalangan masyarakat. Prioritas sebaiknya diberikan pada pelatihan teknis dan peningkatan pendidikan yang dapat memfasilitasi pemahaman dan penerimaan teknologi baru. Model kemitraan antara sektor publik dan swasta harus diperkuat dengan kerangka kerja yang jelas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Praktik terbaik mencakup penyusunan strategi implementasi yang inklusif dan adaptif, yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi spesifik dari setiap komunitas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa teknologi memiliki peran sentral dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Teknologi berfungsi sebagai katalisator dalam memfasilitasi akses informasi, meningkatkan keterampilan, serta membuka kesempatan ekonomi baru. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan akses teknologi dan literasi digital tetap menjadi penghambat yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pendekatan terpadu yang melibatkan teknologi, kebijakan, dan pendidikan sangat direkomendasikan untuk memaksimalkan manfaat teknologi dalam proses pemberdayaan.

REFERENSI

Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., Sunarsi, D., & Bustamin, B. (2023). Membangun Pelayanan Publik Yang Inovatif Dan Efisien Di Era Digital Di Indonesia. Jurnal Pallangga Praja (JPP), 5(1), 31-40. ipdn.ac.id

Muttaqin, A. R., Wibawa, A., & Nabila, K. (2021). Inovasi digital untuk masyarakat yang lebih cerdas 5.0: Analisis tren teknologi informasi dan prospek masa depan. Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik, 1(12), 880-886. um.ac.id

Achmad, W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, 14(9). ikopin.ac.id

As' ari, H., Gusliana, H. B., Umami, I. M., Habibie, D. K., & Putri, R. A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal di Desa Kesumbo Ampai. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 6(1), 2470-2477. sisfokomtek.org

Rista, D., & Wiranata, I. H. (2024, August). Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Warga Negara menuju Masyarakat yang Demokratis. In Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran) (Vol. 7, pp. 1216-1227). unpkediri.ac.id

Apriliana, E. M., & Pujianto, W. E. (2024). Analisis Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gelam. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(1), 213-223. staiypiqbaubau.ac.id

Amane, A. P. O., & Laali, S. A. (2024). Menjembatani Transformasi Masyarakat di Era Society 5.0. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, 11(2), 159-169. unsiq.ac.id

Judijanto, L., Sandy, S., Yanti, D. R., Kristanti, D., & Hakim, M. Z. (2023). Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Berbasis Inovasi Teknologi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(6), 12500-12507. universitaspahlawan.ac.id

Martan, S., Jumadi, O., Wahyuddin, N. R., & Suryaningsih, N. A. (2023). Pemberdayaan kelompok budidaya jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) melalui penerapan teknologi dan inovasi dalam

peningkatan produksi, diversifikasi produk, branding produk, dan pemanfaatan limbah. MALLOMO: Journal of Community Service, 4(1), 203-217. umsrappang.ac.id

Najjar, S., & Oktasari, H. (2023, December). Embracing Mobile Learning In Education: Membuka Keuntungan, Menghadapi Tantangan, dan Menjelajahi Prospek Masa Depan. In Prosiding Seminar Nasional Kemahasiswaan (Vol. 1, No. 1, pp. 74-83). unismuh.ac.id

Mendrofa, J. S., Zendrato, M. W., Halawa, N., Zalukhu, E. E., & Lase, N. K. (2024). Peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi pertanian. Tumbuhan: Publikasi Ilmu Sosiologi Pertanian Dan Ilmu Kehutanan, 1(3), 01-12. asritani.or.id

Yandra, R., Mahfudnurnajamuddin, M., & Suriyanti, S. (2024). Implementasi Teknologi dalam Manajemen Pemasaran Pendidikan: Tantangan dan Peluang. Journal of Education Research, 5(2), 2008-2024. jer.or.id

Hidayatullah, M. T., Asbari, M., Ibrahim, M. I., & Faidz, A. H. H. (2023). Urgensi aplikasi teknologi dalam pendidikan di indonesia. Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2(6), 70-73. jisma.org

Abdussamad, S., Tamrin, M. M., Rusmulyadi, R., Dunggio, S., & Abdussamad, J. (2024). Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat tentang Manfaat Briket dari Limbah Tongkol Jagung: Strategi Pengabdian Masyarakat. Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2(1), 19-31. unisan.ac.id

Izzati, I. (2024). STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP), 7(3), 9025-9034. universitaspahlawan.ac.id

Ibrahim, A. H. H., Madjid, S., & Hafel, M. (2024). Tinjauan Kolaboratif dalam Mendorong Pengembangan Desa Wisata Lapasi di Maluku Utara. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5(2), 15-15. pubmedia.id

Karim, K., Firdaus, F., Ramatni, A., Bahtiar, M. Y., Kawani, F. B., & Sawlani, D. K. (2024). Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan:: Membangun Model Manajemen yang Efektif. Indonesian Research Journal on Education, 4(4), 3053-3060. irje.org

Togatorop, A. M. H., Darmawan, D. W., & Hidayati, R. (2024). Transformasi Digital dalam Mencapai Keberlanjutan di Bidang Ekonomi dan Keuangan. In Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC) (Vol. 7, No. 1, pp. 16-31). untan.ac.id

Munandar, A., Nurholizah, S., Artika, D. T., Mahroja, S., Nurholizah, R., Anggraini, M., ... & Gustianda12, A. (2023). Evaluasi Program Pendidikan: Tinjauan Terhadap Efektivitas dan Tantangan. vol, 9, 128-136. semanticscholar.org

Akhadi, I. (2022). Pengaruh penerimaan pajak terhadap variabel pendapatan perkapita dan angka kemiskinan sebagai indikator kemakmuran rakyat. Jurnal pajak Indonesia (Indonesian Tax Review). pknstan.ac.id

Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., & Nirawana, I. W. S. (2023). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat. Easta Journal of Innovative Community Services, 1(03), 156-170. eastasouth-institute.com

Rohyadi, R. F., Kusumawati, A., Kamila, S., & Pasya, M. R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan. Concept: Journal of Social Humanities and Education, 3(1), 167-173. journal-stiayappimakassar.ac.id

Punu, C., Pangemanan, S. E., & Kumayas, N. (2021). Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado. GOVERNANCE. unsrat.ac.id

Suryani, S., Yeni, A., & Nirwana, I. (2023). … dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan Kota Sawahlunto (Studi Kasus Masyarakat …. Jurnal Manajemen Riset Inovasi. prin.or.id

Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024). Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(1), 1-15. jayapanguspresspenerbit.org

Lubis, A. F. (2022). Implikasi Kebijakan Hukum Terhadap Struktur Sosial dalam Penguatan Kedaulatan Negara. MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 19(2), 121-140. untagsmg.ac.id

Fitrianesti, R. & Muhtadi, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan dalam Membangun Kemandirian di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) Jakarta …. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. uinsu.ac.id

As' ari, H., Gusliana, H. B., Umami, I. M., Habibie, D. K., & Putri, R. A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal di Desa Kesumbo Ampai. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 6(1), 2470-2477. sisfokomtek.org

Anisa, B. M. N., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jampangkulon. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3(3), 1665-1687. ikadi.or.id

Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., & Nirawana, I. W. S. (2023). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat. Easta Journal of Innovative Community Services, 1(03), 156-170. eastasouth-institute.com

Jurnal, C. A. R. E., Firmansyah, A., Pasila, N. S., & Djabbar, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Madu Sari Alam Di Desa Tanah Datar, Muara Badak, Kutai Kartanegara. Jurnal Resolusi Konflik, CSR dan Pemberdayaan (CARE), 7(1), 121-130. ipb.ac.id

Sulistiyaningsih, N., Majid, A. V. A., Hidayah, P. M. N., Priwegga, L. A., & Kusumo, M. D. M. B. (2024). Prospek penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat sebagai upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 10(1), 222-234. iaifa.ac.id

Ramdhan, T. W. (2025). TEKNOLOGI PENDIDIKAN ISLAM. Press STAI Darul Hikmah Bangkalan. staidhi.com

Maulida, F. H. (2024). Dukun Adat sebagai Benteng Pendidikan Karakter Pemuda Desa Adat Tengger, Ngadas, Kabupaten Malang. Academy of Education Journal. ucy.ac.id

Rachmawati, R., Rohmah, A. A., Musthofa, A., Wibisono, H., & Ghiffari, R. A. (2024). Pengembangan Ekosistem Digital Wilayah Kepulauan: Eksplorasi Tojo Una-Una. UGM PRESS. [HTML]

Ismail, A. M. I. & Nurlia, N. (2024). Inovasi Teknologi Pertanian Berkelanjutan: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Petani dan Peternak "Bintang Sejahtera" dengan Pompa Air Tenaga Surya untuk …. Journal Of Human And Education (JAHE). jahe.or.id

Amiyah, W. (2024). Peran Kelompok Usaha Dalam Digital Marketing dan Inovasi Produk untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Kanugrahan: Peran Kelompok Usaha Dalam Digital Marketing dan Inovasi Produk untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Kanugrahan. KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi, 2(2), 83-89. unsika.ac.id

Harini, H., Prananosa, A. G., & Terminanto, A. A. (2023). Inovasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan dan pengabdian masyarakat di era digital. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(6), 12891-12897. universitaspahlawan.ac.id

Andini, R. (2023). Inovasi teknologi untuk pariwisata hijau: Solusi berkelanjutan di era modern. Jurnal Kajian Pariwisata dan Perhotelan. ittc.web.id

Jaya, H., Hambali, M., & Fakhrurrozi, F. (2023). Transformasi pendidikan: peran pendidikan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 6(4), 2416-2422. uin-malang.ac.id

Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (sid): meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 73-81. undiknas.ac.id

Fadillah, R., Zulfa, A., Rusiadi, R., Efendi, B., & Nasution, L. N. (2025). Model Green Economy Index dalam Mengukur Transformasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 3(1), 106-125. stisnq.ac.id

Indriyani, N. W., Nurdiarti, R. P., & Nastain, M. (2022). Aksesibilitas dan pemanfaatan aplikasi "jogja smart service" untuk mewujudkan good governance. Jurnal Riset Public Relations, 75-84. unisba.ac.id

Nurhayati, R., & Is, S. S. (2024). PERAN BK DAN PAI DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN BELAJAR ANAK DIDIK DI SEKOLAH. Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, 10(02), 49-65. uiad.ac.id

Abdillah, F. & Vaulina, S. (2023). Menuju pertanian berkelanjutan: akselerasi inovasi dan optimalisasi tata ruang agraria untuk meningkatkan ketahanan pangan. uns.ac.id

Mindarta, E. K., Bintara, R. D., Nyoto, A., Gunawan, F. I. Z., Wulandari, G., & Effendi, M. I. (2024). Teknologi Fryer And Oil Drainer Machine: Inovasi dalam Meningkatkan Produksi Kacang Telur di Desa Srigonco. Journal Of Human And Education (JAHE), 4(5), 1089-1099. jahe.or.id

Dewi, I. G. A. A. Y. & Nyoman, M. S. I. (2024). Kolaborasi Triple Helix Dalam Program Inovasi Desa (Studi Kasus: Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. unpas.ac.id

Pakina, R. & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. Journal of Scientech Research and Development. idm.or.id

Maisaroh, A. A. & Untari, S. (2024). Transformasi pendidikan karakter melalui kebijakan pemerintah di Indonesia menuju generasi emas 2045. Jurnal kebijakan pemerintahan. ipdn.ac.id

Sihombing, A. P., Rahardjo, R. S., & Rachman, I. F. (2024). Peran Guru dan Pendidik dalam Menumbuhkan Literasi Digital dan Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 1(3), 360-370. kampusakademik.co.id

Lubis, P. S. A., & Sinaga, S. S. (2024). Inovasi teknologi dan transformasi ekonomi: Peran kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi daerah. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 3(1), 281-290. unimar-amni.ac.id

Anisa, M. & Aryani, Z. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Modern. Jurnal Insan Cita Pendidikan. iceni.org

PERORANGAN, K. K. I. & INDONESIA, L. K. N. R. (). OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI LAUT GUNA MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL. lib.lemhannas.go.id. lemhannas.go.id

Ulzikri, Ahmad Robi. 2020. "Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis Dalam Kasus Eksploitasi Pasir Di Perairan Krakatau Lampung Selatan)." *Jurnal Public Policy* 6(2):56. doi: 10.35308/jpp.v6i2.1994.

Vol. 4, No. 1, Maret 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Efisiensi "Joint Africa-EU Strategy" untuk Mengatasi Pembajakan Kapal oleh Perompak Somalia di Perairan Afrika Timur

Azila Zahira[1*] , Asmiati A Malik[2]
[1,2]Ilmu Politik, Universitas Bakrie, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia
Email : [a*]azilazahira@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Strategi Keamanan Maritim di Middle East and North Africa dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus Mekanisme Kerja Sama Kelembagaan African Union dan European Union melalui "Joint Africa-EU Strategy" untuk mengatasi Pembajakan Kapal oleh Perompak Somalia di Perairan Afrika Timur khususnya di Perairan Horn of Africa dan Gulf of Aden Periode 2008-2023. Penelitian ini penting untuk diteliti sebab permasalahan pembajakan kapal oleh perompak Somalia termasuk fenomena keamanan non-tradisional yang harus segera diatasi dan berdampak langsung terhambatnya jalur perdagangan dan pelayaran, keamanan manusia, serta perekonomian global. Penelitian ini menggunakan Teori Kelembagaan Baru sebagai Umbrella Theory. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan desain penelitian berlandaskan pada pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kerja sama kelembagaan JAES di bidang perdamaian dan keamanan dapat mengatasi pembajakan kapal secara efisien dengan dibuktikan terjadinya penurunan aktivitas pembajakan kapal di perairan Horn of Africa dan Gulf of Aden

Kata kunci: AU dan EU, Pembajakan Kapal, Kerja Sama, Perairan Afrika Timur, Keamanan Maritim

A B S T R A C T

This research aims to analyze Maritime Security Strategies in the Middle East and North Africa using a Case Study of the Mechanism of Institutional Cooperation between the African Union and the European Union through the "Joint Africa-EU Strategy" in addressing Ship Piracy by Somali Pirates in the Waters of East Africa, specifically in the Horn of Africa and Gulf of Aden period 2008-2023. This research is significant for examination due to the issue of ship piracy by Somali Pirates being a non-traditional security phenomenon that needs immediate attention, directly impacting trade routes and navigation, human security, and the global economy. The study employs New Institutional Theory as an Umbrella Theory. It utilizes Qualitative Research Method with a research design based on a case study approach. The findings indicate that institutional cooperation within JAES in peace and security can efficiently tackle ship piracy, evidenced by the decrease in piracy activities in the waters of the Horn of Africa and Gulf of Aden.

Keywords: *AU and EU, Cooperation, East African Waters, Maritime Security Strategy, Ship Piracy*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
11.03.2025	25.03.2025	29.03.2025	31.03.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Permasalahan pembajakan merupakan tantangan bagi politik internasional, sebab pembajakan merupakan kejahatan transnasional yang terjadi di beberapa negara atau berdampak bagi negara atau aktor non negara seperti perusahaan kapal internasional (Bueger, Edmunds, McCabe, 2020: 230-237). Sejak 1980-an, pembajakan telah muncul sebagai masalah internasional yang menimbulkan kekhawatiran negara-negara, pemilik kapal, dan perusahaan transportasi kapal (Berlusconi, 2012: 3). Pada tahun 2009, International Maritime Organization yang berada di London menerima laporan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal sebanyak 406 laporan, berdasarkan laporan tersebut terjadi peningkatan 106 atau 24,6 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2008 (Laila, 2021: 109). Selain itu, laporan dari IMB melakukan pelacakan serangan pembajakan, melaporkan bahwa di seluruh dunia terdapat hampir 3.000 upaya serangan pembajakan di laut selama periode tahun 2000-2009 (Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual report – 2009, 2010: 2). Pada kuartal pertama 2011, terdapat 97 percobaan serangan (Nelson., Goossens, 2011). Hingga akhirnya sekitaran tahun 2000-an fenomena pembajakan kapal mulai bergejolak (Cordner, 2011: 71-71). Terhitung sejak 2005-2009 telah terjadi 449 percobaan atau insiden perompakan yang berhasil terjadi dilakukan oleh perompak Somalia dengan melintasi seluruh Perairan Arab, Samudera Hindia, sepanjang Teluk Aden, Laut Merah, dan Pantai Oman (Rudloff dan Weber, 2011: 34). Dengan perkembangan lebih lanjut, para perompak melakukan pengembangan taktik baru yang memungkinkan para perompak untuk meningkatkan jangkauan operasional mereka (Hamza & Priotti, 2020: 141-158). Serangan pembajakan bersenjata terhadap kapal-kapal melalui rute lalu lintas pelayaran global berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi sektor ekonomi terutama peningkatan serangan di sekitar jalur perdagangan kawasan Afrika (Felbab-Brown, 2014: 6-8), seperti Pantai Tanduk Afrika, Teluk Aden, Pantai Timur Afrika, Teluk Guinea, dan Pantai Barat Afrika yang langsung berdampak pada logistik maritim, rantai pasokan, arus perdagangan serta mengancam kapal-kapal di seluruh dunia saat melewati rute tersebut (Nwokedi et al., 2022: 133-143).

Lebih lanjut, kapal-kapal berkebangsaan Uni Eropa mengalami pembajakan oleh perompak Somalia yaitu terdapat saru kapal berkebangsaan Ukraina mengalami pembajakan di bulan Mei 2010 yang dilakukan oleh perompak bersenjata menggunakan peluncur granat dan menahan sekitar 25 kapal serta menyandera setidaknya 587 awak kapal milik Jerman (BBC News Indonesia, 2010). Selain itu, pada bulan Desember 2023, sebuah kapal komersial berbendera Malta bernama Ruen, dibajak oleh perompak di lepas pantai Somalia, sehingga membuat pasukan anti pembajakan Somalia di Uni Eropa menerima peringatan mengenai "dugaan kapal yang dibajak oleh perompak" dan mengirim kapal angkatan laut Spanyol, Victoria, ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan mengevaluasi tindakan lebih lanjut, bahwa kapal tersebut dikelola oleh Navigation Maritime Bulgaria, dan awak kapal bernegara Angola, Bulgaria, dan Myanmar (Saul, 2023).

Selanjutnya, tidak hanya biaya kerugian terhadap kapal yang ditimbulkan dari aksi pembajakan (Shortland, 2011: 2-3), tetapi juga berdampak bagi biaya kemanusiaan, dampak fisik, dan psikologis para korban serangan (Anyanova, 2007: 25), diperkirakan dari tahun 1995 hingga 2006 sekitar 510 orang dibunuh, 3.300 pelaut disandera (Spearin, 2014: 98-101), lebih dari 120 orang diculik, hampir 500 orang mengalami luka parah dan ratusan lainnya diancam dengan senjata tajam di wilayah Somalia dan Teluk Aden dengan menyumbang 70 persen serangan dari total dunia di tahun 2007 dan 80 persen di tahun 2008 (The Hague Centre for Strategic Studies, 2008: 5). Lebih lanjut, fenomena pembajakan menimbulkan biaya ekonomi, pada tahun 2008, sebanyak 30 juta dolar uang tebusan digunakan untuk membebaskan kapal beserta awak kapal yang ditangkap oleh perompak Somalia (Scheffler, 2010: 6). Peningkatan serangan bajak laut pada tahun 2008 mengakibatkan hilangnya kesejahteraan lebih dari $1.5 billion dengan pendapatan bajak laut sebesar $120 million (Besley, Fetzer, Mueller, 2012: 3). Dengan demikian, semakin maraknya tindakan pembajakan kapal, tercatat ekonomi global mengalami kerugian sekitar US$24,5 miliar per tahun untuk pembayaran uang tebusan, biaya asuransi, dan operasi militer (Ahmad, 2020: 62). Sementara itu. kerugian yang berdampak pada sektor perikanan, ketahanan pangan, dan pariwisata serta biaya

pengiriman meningkat sebesar 8 hingga 12 persen (Martens, 2017: 9-12), dikarenakan menggunakan rute yang lebih panjang untuk menghindari serangan perompak, apabila diakumulasikan kerugian keseluruhan sebenarnya dapat diperkirakan sekitar US$630 juta per tahun (Pichon & Pietsch, 2019: 10). Pembajakan di lepas pantai Somalia mencapai puncaknya pada tahun 2011, dengan total 736 pelaut disandera di 32 kapal, kasus tersebut hanya bisa distabilkan oleh intervensi militer internasional yang terkonsentrasi di teritorial perairan Somalia (International Crisis Group, 2012). Selain itu, ketidakstabilan politik atau kegagalan negara masih menjadi kondisi menguntungkan bagi pembajakan (Lucas, 2013: 56). Situasi ini juga diindikasi oleh Pemerintah Somalia dengan munculnya eskalasi konflik antar kelompok etnis di tahun 1998 hingga 2008 (Hartati, 2011: 24). Dengan kondisi politik Somalia tersebut, menyebabkan ekonomi nasional semakin buruk, akhirnya mendorong perubahan dalam pekerjaan warga Somalia yang semua sebagai pemancing beralih sebagai pembajak kapal dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan dengan tinggi (Adaye & Nnwobunwene, 2011: 569). Para pembajak kapal Somalia berhasil menghasilkan uang tebusan rata-rata $5 juta dan sebanyak $9.5 juta meningkatkan finansial masyarakat Somalia (Nelson & Goossens, 2011). Lebih lanjut, wilayah dengan berlangsungnya konflik sipil adalah negara-negara di antara Horn of Africa (Kraska, 2011: 20). Konflik sipil di Somalia ini sebagai hasil dari permasalahan sosial dan politik yang tidak berujung pada perbaikan (Sauvageot, 2009: 3-4). Ditambah dengan faktor kemiskinan, berada di jalur perdagangan dan lalu lintas pelayaran serta tidak adanya kekuatan untuk mengontrol perairan menyebabkan pembajakan di Somalia semakin tersebar dengan luas (Johnson, 2014: 4). Selain itu, masalah kekeringan dan banjir secara besar-besaran meningkatkan kerentanan warga Somalia (Chalk, 2009: 5). Sepanjang tahun 2011, untuk pertama kalinya dalam dua dekade, PBB mengumumkan kelaparan di beberapa wilayah Somalia Selatan hingga Tengah dengan menewaskan tak terhitung banyaknya orang dan memaksa puluhan ribuan orang mengungsi ke negara tetangga (Besley, Fetzer, Mueller, 2012: 2-4). Pada awal 2012, lebih dari 2 juta warga Somalia diperkirakan masih membutuhkan bantuan pangan (Alexandre, 2022: 43). Beberapa daerah di Somalia akses akan kebutuhan dasar penduduk, seperti perawatan kesehatan, air, sanitasi, dan pendidikan juga hampir tidak bisa dipenuhi (Hadju, 2021: 15). Selain itu, konflik meningkat antara Transisi Pemerintah Federal dengan Kelompok Islam Militan Al Shabaab, kemudian menjadi target intervensi militer dari Kenya dan Ethiopia (Ehrhart & Petretto, 2012: 5).

Lokasi Penelitian



*Gambar 2. 1 : Lokasi Penelitian (*Google Maps, *2023)*

https://www.google.com/maps/@2.2655324,23.5914664,3z?entry=ttu



Gambar 2. 2: Lokasi Penelitian-Horn of Africa *(Google Maps, 2023)*
https://www.google.com/maps/@7.9594234,31.5881093,5z?entry=ttu



Gambar 2. 3: Lokasi Penelitian-Gulf of Aden *(Google Maps, 2023)*
https://www.google.com/maps/@12.7807534,44.589281,7z?entry=ttu

Sebagaimana terlihat pada maps diatas, alasan kenapa dua lokasi penelitian tersebut menjadi objek lokasi yang peneliti kaji adalah: Pertama, Horn of Africa yang juga dikenal sebagai Semenanjung Somalia adalah sebuah semenanjung luas di Afrika Timur yang terletak di bagian paling timur daratan Afrika dan sebagai semenanjung terbesar keempat di dunia. Terdiri dari Ethiopia, Eritrea, Somalia, Djibouti mencakup juga Kenya, Sudan, Uganda, Burundi, Rwanda, dan Tanzania. Wilayah ini terletak di sepanjang batas selatan Red Sea dan terbentang ratusan kilometer hingga ke Selat Guardafui, Gulf of Aden, dan Samudera Hindia serta berbagai perbatasan laut dengan Semanjung Arab di Asia Barat. Horn of Africa memiliki luas wilayah sekitar 1.883 million km. Pembajak Somalia di Horn of Africa berbeda tindakannya dengan pembajak di Selat Malaka yang lebih berfokus pada kapal-kapal besar dalam melakukan pelayaran internasional. Kelompok besar atau komunitas pembajak Somalia yang terkenal paling kuat dan canggih adalah Marinir

Somalia sebuah faksi militer terorganisir sebagaimana mencerminkan Angkatan laut sungguhan (Globalsecurity.org). Lebih lanjut, terdapat lima kategori kapal yang beraktivitas pada jalur maritim dunia yakni kapal tanker, kapal kontainer, *ferry boats*, *bulk carriers*, kapal cruise, serta *special ships* diantaranya *ice breakers*, *research vessels*, dan *tugs* (Sullivan, 2010: 234). Lebih lanjut, dari jenis kapal tersebut yang paling rentan terkena pembajakan adalah bulk carriers dan tankers. Bulk carriers mengangkut bahan baku padat seperti batu bara dan bijih besi, sedangkan kapal tanker mengangkut bahan baku cair seperti produk minyak bumi yang menyumbang 32 persen bahan kimia dan minyak mentah. Di tahun 2009, sebanyak 68 bulk carriers mengalami serangan di Tanduk Afrika, dan 58 kapal tanker mendapat serangan oleh pembajak Somalia di Tanduk Afrika (Sullivan, 2010: 234). Perhatikan gambar berikut ini:

Table 1 Bulk carriers and tankers attacked in Horn of Africa (2005–2009).

Ship Type	2005	% Total	2006	% Total	2007	% Total	2008	% Total	2009	% Total
Bulk Carrier	81	29%	57	24%	32	12%	48	16%	109	27%
Tanker	70	25%	48	20%	83	32%	91	31%	116	29%
Total	276		239		263		293		406	

ICC International Maritime Bureau (2010) Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report 2009

Gambar 2. 4 ICC *International Maritime Bureau, "Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report"*. 2009

Table 2 Number of people affected by piracy in Horn of Africa compared to world.

	Horn of Africa	Global total	% Global total
Hostage	867	1,052	82%
Threatened	0	14	0%
Assault	0	4	0%
Injured	10	68	15%
Killed	4	8	50%
Missing	1	8	13%
Kidnapped	0	12	0%
Total	882	1,166	76%

ICC International Maritime Bureau (2010) Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report 2009

Gambar 2. 5 ICC *International Maritime Bureau, "Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report"*. 2009

Pada awal tahun 2009, PRC melaporkan dengan total 217 serangan bajak laut terjadi di sekitar Perairan Horn of Africa termasuk diantaranya Samudera Hindia, Laut Merah, dan Teluk Aden (ICC IMB, 2009: 1-15). Di tahun 2011, PRC juga melaporkan terjadi 125 insiden di Perairan Horn of Africa (ICC IMB, 2011: 1-10). Sedangkan di wilayah Teluk Aden di tahun yang sama telah menunjukkan penurunan karena adanya upaya terkoordinasi dari pasukan maritim internasional (Hecker, 2012: 71). Bahwasanya memang benar serangan bajak laut Somalia berdampak serius bagi jalur pelayaran dunia sebab sekitar 20.000 kapal dan 12 persen dari pengiriman minyak dunia melintas setiap tahun di perairan Afrika (Petretto, 2011: 10-17). Pada tahun 2010, the U.S. Energy and Information Administration mengemukakan bahwa jalur pelayaran yang melewati Terusan Suez dan Pantai Afrika Timur sebagai jalur perdagangan maritim terpenting kedua di dunia dan

perdagangan maritim terpenting kedua di dunia (United States Energy Information Administration, 2011).

Kedua, Gulf of Aden terletak di Samudera Hindia dan terletak antara Yaman (terlihat di atas teluk) yakni berada pada Semenanjung Arab di pantai Selatan hingga perairan Somalia (terlihat di bawah teluk pada Maps) di Afrika. Gulf of Aden memiliki panjang sekitar 900 km dan lebar 500 km dikenal sebagai jalur perairan penting untuk mengangkut minyak Teluk Persia bersamaan dengan Red Sea yang terhubung di barat laut membentuk jalur transportasi minyak antara Eropa dan Far East. Gulf of Aden membentang dari arah barat-timur dan Red Sea yang digunakan untuk penangkapan ikan, perdagangan, dan jalur transportasi. Terletak di jalur perdagangan Laut Mediterania-Samudera Hindia, Teluk ini merupakan jalur perairan strategis yang dilalui oleh Portugal, Turki, dan Inggris pada abad ke-16 (European Space Agency, 2006). Karakteristik pembajak di Teluk Aden hingga ke Samudera Hindia tidak hanya terpusat di satu pelabuhan tertentu, melainkan tersebar luas di lautan lepas Teluk Aden dan Samudera Hindia. Dalam hal ini, apabila menggunakan teori pilihan rasional bahwa pelaku pembajak akan berusaha mencari tujuan mereka dengan cara yang paling sederhana dan paling tidak berisiko (Townsley dan Oliveira, 2012, 217-229). Akan tetapi, dengan dilancarkannya operasi militer di perairan Somalia, para pembajak berusaha menargetkan serangan di lepas laut bahwa diperkirakan sejak tahun 2011, para pembajak melakukan serangan dengan mengelilingi Tanjung Harapan untuk menargetkan kapal lain (Giampaolo dan Foster, 2011), dan pada tahun 2012 rata-rata serangan berhasil terjadi pada 746 km di lepas Pantai Somalia (Wright, 2013). Pembajak Somalia melakukan aksinya dengan pengejaran yang cepat dan mengancam kapal ketika berlayar, menaiki kapal kargo dengan alat transportasi utama menggunakan perahu kecil dan kapal induk. Senjata yang digunakan juga lebih canggih, tetapi untuk tindakan kekerasan lebih relative lemah dibandingkan dengan pembajak di afrika barat atau pembajak Nigeria (He, Wang, Gao, Xie, 2023: 14). Adapun senjata yang digunakan berupa pistol, roket, granat berpeluncur roket, senjata ini digunakan untuk memperlambat kapal kargo yang sedang bergerak agar para pembajak bisa menaiki kapal tersebut dan kemudian mengancam serta mengendalikan awak kapal. Aksi yang dilakukan oleh pembajak Somalia memuncak pada akhir tahun 2010 ketika hampir 700 awak kapal diculik dari 30 kapal dagang di lepas Pantai Somalia (He, Wang, Gao, Xie, 2023: 14).

Kemudian, perlu diketahui bahwa European Union memiliki kepentingan kuat dalam menjaga jalur komunikasi laut dan mengamankan keamanan pelayaran global (Belfer, 2009: 22). Pada 2015, sekitar 48 persen ekspor European Union ke negara ketiga dan sekitar 53 persen impor UE dari negara ketiga yang diangkut melalui laut, aktivitas ini terus berkembang selama beberapa dekade terakhir (Mustika, 2019: 314-316). Secara total, sekitar 90 persen transportasi European Union dengan negara ketiga diangkut melalui laut (Larsen & Nissen, 2017). Pemilik kapal European Union mewakili 30 persen kapal pengapalan global, menangani sekitar 35 persen ton pengiriman global atau 55 persen kapal peti kemas dan 35 persen kapal tanker (Johnson, 2014: 2-6). Oleh karena itu, UE mewakili sekitar 42 persen dari nilai perdagangan lintas laut global (Collins, 2012: 112-116). Dengan maraknya pembajak di Kawasan Afrika akan sangat menjadi tantangan bagi negara-negara di dunia akibat ketidakamanan pada rute perdagangan, sehingga dibutuhkan jalur laut aman bagi perdagangan internasional (Pichon dan Pietsch: 2019; Anyanova, 2007: 25-27).

Permasalahan pembajakan mengakibatkan negara-negara anggota European Union turut berpartisipasi dalam menangani isu pembajakan di Perairan Afrika terutama di perairan Horn of Africa dan perairan Gulf of Aden (UNCTAD Conference, 2014). Keterlibatan European Union dalam mengatasi pembajakan ini didasari karena isu pembajakan merupakan isu internasional yang harus dengan segera diatasi, berkaitan dengan norma dan kelembagaan European Union untuk berkontribusi aktif dalam penanganan isu global (Mustika, 2019: 314). Sebagai Lembaga Regional dengan kepemilikan terhadap norma dan nilai untuk membantu terciptanya perdamaian dunia tanpa adanya hambatan dalam sektor pelayaran dan perdagangan internasional (Mustika, 2019: 314), European Union membentuk operasi gabungan untuk membantu penyelesaian masalah pembajakan kapal di Perairan Afrika dan memberantas segala bentuk tindakan pembajak Somalia ketika melakukan aksi kejinya (Orugbani dan Nnwobunwenw, 2010: 567-568). Dengan adanya ancaman tersebut, European Union segera mengembangkan operasi keamanan di Gulf of Aden dengan

menghadirkan EU NAVFOR Atalanta yang dikembangkan pada Desember 2008 (Osei-Tutu, 2011:12). Operasi ini memiliki beberapa mandat bertujuan untuk mengirimkan sejumlah bantuan ke Somalia dan melindungi misi African Union melalui AMISOM yang melintasi Gulf of Aden serta memperkuat keamanan maritim dengan mendukung organisasi internasional lainnya (Prasetyo, 2016: 61).

Maka dari itu, faktor utama atau alasan penting penulis mengkaji mengenai efisiensi mekanisme kerja sama kelembagaan African Union dan European Union untuk mengatasi pembajakan kapal di perairan Afrika khususnya wilayah Horn of Africa dan Gulf of Aden sebab situasi di jalur pelayaran tersebut sangat merugikan perekonomian global, keselamatan nyawa manusia, dan ketidakamanan kawasan (Prasetyo, 2016: 57-66). Perlu dipahamai bahwa African Union sebagai organisasi regional yang terletak di wilayah Horn of Africa dan Gulf of Aden dan Somalia sebagai salah satu negara anggota AU. Artinya, African Union seharusnya dapat memfasilitasi terjadinya sebuah kesepakatan di antara negara-negara Kawasan Afrika dan mengupayakan mekanisme untuk meminimalkan permasalahan pembajakan kapal di wilayah tersebut (Sahin dan Sahin, 2023: 31-56). Sejauh ini yang menjadi fasilitator dan aktif dalam menjaga keamanan di dua wilayah tersebut dan memberikan bantuan kepada Somalia adalah negara-negara barat, terutama European Union. Untuk itu, dengan adanya kajian mengenai penelitian ini penulis berharap dapat memberikan solusi untuk mencegah dan menurunkan tingkat eskalasi pembajakan yang disebabkan oleh perompak Somalia. Penulis berupaya menjelaskan bagaimana mekanisme kerja sama kelembagaan African Union bersama dengan European Union melalui "Joint Africa-EU Strategy" dapat merealisasikan strategi keamanan maritim dan dapat menciptakan regulasi dan resolusi konflik yang efisien dan berkelanjutan.

Literature Review

Berdasarkan ulasan mengenai jurnal penelitian sebelumnya yang dikaji oleh (Gunawan, 2012), (Tobing, 2020), (Karawita, 2019), (Williams, Paul R., Lowry, 2014), (Wallner., Kokoszkiewicz, 2019), (Weitz, 2009), (Chalk, 2010), dan (Nelson., Goossens, 2011), permasalahan maritime piracy merupakan fenomena dan isu yang sangat penting untuk segera diatasi dan menjadi masalah internasional sehingga perlu dibahas melalui studi akademik dan keilmuan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang juga mengangkat tentang permasalahan Maritime Piracy oleh Perompak Somalia di Perairan Afrika, penelitian ini akan mencoba memahami dan berfokus pada sudut pandang tindakan, strategi, peran, penanganan, dan respon oleh aktor utama khususnya aktor inter-regional. Aktor yang dimaksud adalah aktor yang terlibat aktif dalam penanganan Ships Piracy yaitu African Union dan European Union sebagai aktor utama dalam mengatasi permasalahan pembajakan kapal oleh perompak Somalia dengan mekanisme kerja sama kelembagaan. Penelitian ini berfokus pada efisiensi mekanisme kelembagaan yang dilakukan oleh African Union dan European Union melalui "Joint-Africa EU Strategy" untuk mengatasi permasalahan pembajakan kapal di Perairan Afrika Timur khususnya Horn of Africa dan Gulf of Aden sebagai perairan yang ramai dilalui oleh kapal-kapal internasional sehingga dibutuhkan sistem kelembagaan yang efisien dan terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan "efisiensi" untuk melihat efisiensi mekanisme kerja sama kelembagaan antara African Union dan European Union melalui "Joint Africa-EU Strategy" agar mampu meminimalisir dan mengatasi jumlah pembajakan kapal oleh perompak Somalia di Horn of Africa dan Gulf of Aden, bahwasanya efisiensi merupakan sebuah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan sehubungan dengan sarana yang tersedia, sehingga perlu mempertimbangkan tujuan dan cara (Banton, 2023). Efisiensi juga mengacu pada kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan cara meminimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, atau biaya, dan berfokus pada proses serta bagaimana sumber daya dikelola atau digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (Mraovic, 2024). Ketika berbicara mengenai efisiensi maka berkaitan dengan alokasi sumber daya secara efisien yang diperlukan oleh sebuah lembaga, namun keberadaan lembaga tersebut tidak dibuat dan muncul secara spontan, melainkan hasil dari pikiran yang rasional dan hasil dari kualitas serta bentuk institusi politik (Borner, Bodmer, dan Kobler, 2004: 44). Efisiensi juga berkaitan erat dengan efektivitas, namun memiliki perbedaan secara pengertian, sebab efisiensi merupakan faktor penting dalam menentukan biaya paling rendah untuk mencapai hasil yang diinginkan (GeeksforGeeks, 2024). Kemudian, apabila dihubungkan

dengan Teori Kelembagaan, bahwa istilah efisiensi mau pun efektivitas memiliki relevansi yang berbeda tergantung pada konteksnya. Namun, secara umum dalam konteks teori Kelembagaan, istilah yang lebih sering digunakan adalah "efisiensi", sebab teori Kelembagaan cenderung berfokus pada bagaimana struktur, norma, nilai, peraturan, dan praktik organisasi mempengaruhi penggunaan sumber daya secara efisien. Lebih lanjut, efisiensi dalam teori Kelembagaan mencakup konsep alokasi sumber daya yang optimal, pengurangan biaya transaksi, dan peningkatan kinerja organisasi. Dalam kerangka ini, efisiensi sering kali dilihat sebagai tujuan utama dalam merancang dan mengevaluasi lembaga. Sementara itu, efektivitas juga penting dalam konteks teori Kelembagaan, sebab efektivitas berkaitan dengan sejauh mana lembaga mencapai tujuan mereka dan seberapa baik mereka dalam memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini, efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana mekanisme kerja sama kelembagaan antara African Union dan European Union melalui "Joint Africa-EU Strategy" dapat mengatasi pembajakan kapal oleh warga Somalia di Perairan Afrika Timur khususnya Horn of Africa dan Gulf of Aden berupa strategi keamanan maritim yang dapat dilihat pada dialog politik antar pemangku kepentingan dalam bidang maritim, pengerahan personil keamanan dan pembangunan serta bantuan kemanusiaan(Ulzikri 2023). Lebih lanjut, teori turunan yang penulis gunakan diantaranya Teori Pilihan Rasional dan Teori Perilaku, Teori Aktor, Teori Policy Making, dan Teori Kerja Sama dalam Hubungan Internasional sebagai teori mikro. Dan teori rujukan lainnya atau teori pendukung, Security Theory dalam Hubungan Internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif untuk mendapatkan data dan informasi. Menurut Cresswell, (2013: 4), metodologi penelitian kualitatif adalah sebuah instrumen pendekatan yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dan pemahaman akan makna terhadap individu atau kelompok dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Penelitian kualititatif berbicara mengenai: konstruksi realitas sosial, makna budaya; berfokus pada proses interaksi dan peristiwa; faktor kunci terdapat pada keaslian (authenticity); terdapat nilai dan eksplisit; digunakan untuk memisahkan teori dan data; dibatasi oleh situasional; beberapa kasus, subjek, small-n; dan peneliti terlibat (involved) (Neuman, 2014: 17).

Lebih lanjut, penelitian ini berbasis pada penelitian kualitatif melalui pendekatan penelitian induktif (bentuk penelitian yang dilakukan secara spesifik, didahului dengan pengumpulan data, dan diakhiri dengan kesimpulan) dan holistik (penelitian yang dilakukan secara komprehensif), desain penelitian bersifat pada pendekatan studi kasus. Posisi keilmuan dalam penelitian ini berlandaskan pada posisi ontologi konstruksionisme atau konstruktivisme dan posisi epistemologi interpretivisme. Selanjutnya, cara penulis mengumpulkan data berdasarkan penulisan penelitian ini adalah dengan cara secondary data melalui dokumen resmi beberapa lembaga/instansi sesuai topik penelitian, dokumen kesepakatan dan perjanjian, hukum internasional, ebook, ejournal nasional dan internasional, media massa online, gambar atau data visual seperti gambar dan tabel serta artikel lainnya. Adapun proses berlangsungnya penelitian ini dilakukan secara daring/online dan pengambilan data dilakukan melalui secondary data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kelembagaan Baru: Efisiensi mekanisme kerja sama kelembagaan African Union dan European Union melalui 'Joint Africa-EU Strategy' untuk mengatasi permasalahan Pembajakan Kapal di Horn of Africa dan Gulf of Aden oleh Perompak Somalia

Sebagaimana merujuk pada pandangan North (1990: 3-4), institusi adalah rules of game dalam masyarakat bersifat formal dengan tujuan untuk merancang segala aturan secara manusiawi dengan membentuk interaksi antar manusia, dan berdampak pada pergerakan manusia baik politik, sosial,

atau ekonomi yang berevolusi dari waktu ke waktu. Sebagaimana sejarahnya, hubungan antara Afrika dan Eropa merupakan hubungan yang kompleks dan unik. Selama lima puluh tahun terakhir, telah terjadi interaksi yang kuat antara kedua kawasan dengan sejarah mendalam dalam bidang ekonomi, politik, sosial, kelembagaan, budaya, dan hubungan paling utama adalah hubungan antara bekas kekuasaan kolonial dan bekas jajahan (Shiferaw dan Ciommo, 2023). Meskipun hubungan di kedua lembaga ini muncul akibat sejarah masa lalu kolonial, akan tetapi hubungan mereka saat ini didominasi oleh kebijakan dan program bantuan yang saling ketergantungan di bidang keamanan dan migrasi sebab Uni Eropa memiliki kondisi ekonomi dan kemampuan politik serta militer yang unggul dibandingkan Uni Afrika (International Crisis Group, 2017). Dengan keunggulan yang dimiliki oleh Uni Eropa dan kedekatan secara historis dengan Uni Afrika maka terbentuklah sebuah perjanjian kerja sama yaitu Joint Africa-EU Strategy untuk menyeimbangkan kembali hubungan antara Afrika dan Uni Eropa dengan mengadopsi Joint Strategy pada KTT Africa-EU yang diadalan di Lisbon pada bulan Desember 2007 (Biondo, 2020: 1-2). Sehingga kerangka JAES inilah yang menjadi instrumen berlangsungnya kerja sama dan koordinasi antara negara-negara Uni Eropa dan negara-negara Uni Afrika (Council of the European Union, 2007). Pada dasarnya, Afrika dan Eropa terikat oleh sejarah, budaya, geografi, masa depan yang sama, serta nilai komunitas diantaranya: penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, solidaritas, keadilan, supremasi hukum dan demokrasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian internasional yang relevan dan dalam dokumen konstitusi dari masing-masing Unions (Caramerli dan Caselli, 2015: 1). Situasi terbentuknya mekanisme kerja sama JAES ini berhubungan dengan konsep-konsep yang terdapat pada Teori Kelembagaan Baru yaitu: Pertama, Normative Institutionalist, bagaimana norma dan nilai yang terkandung di dalam institusi politik membentuk perilaku individu. Kedua, Rational Choice Institutionalist, berpendapat bahwa institusi politik adalah sebuah sistem aturan yang mana individu berupaya memaksimalkan kegunaan atau utilitasnya terhadap suatu aturan yang dibentuk. Ketiga, historical institutionalists, melihat bagaimana suatu pilihan yang diambil mengenai rancangan sistem dari institusi pemerintah mempengaruhi pengambilan keputusan individu di masa depan (Lowndes dan Roberts, 2013: 31).

Joint Africa-EU Strategy

Selanjutnya, mekanisme kerja sama "Joint Africa-EU Strategy" muncul sebagai transformasi dan kebaruan dari perjanjian-perjanjian sebelumnya antara Afrika dan Uni Eropa bahwa kemitraan dibentuk bukan hanya untuk Afrika semata, tetapi juga diperuntukkan untuk menciptakan strategi bersama antara Afrika dan Uni Eropa (Pirozzi, 2012: 23-25). Maka dari itu, terdapat perubahan kesepakatan politik mengenai perlunya ide dan saran dari aktor serta pemangku kepentingan terkemuka, terutama masyarakat sipil, warga negara, dan serikat pekerja dalam Joint Strategy yang secara resmi diadopsi pada KTT Africa-EU pada bulan Desember 2007 di Lisbon (Haidara, Aubry, Niaudet, dan Sebban, 2008: 1-16), kemudian KTT tersebut menghasilkan masukan setara dari kedua belah pihak dan terbentuknya Joint Africa-EU Strategy (JAES) dengan tujuan untuk mempertemukan hubungan antar negara Afrika dan Uni Eropa ke tingkat yang baru. Lebih lanjut, kemitraan ini memiliki 8 (delapan) bidang strategis secara luas, diantaranya:

> *"First, Africa-EU Partnership on Peace and Security. Second, Africa-EU Partnership on Democratic Governance and Human Rights. Third, Africa-EU Partnership on Trade and Regional Integration. Fourth, Africa-EU Partnership on the Millennium Goals (MDGs). Fifth, Africa-EU Partnership on Energy. Sixth, Africa-EU Partnership on Climate Change. Seventh, Africa-EU Partnership on Migration, Mobility, and Employment. Eighth, Africa-EU Partnership on Science, Information, Society, and Space" (European Parliament Action Plan Agreement 1 dan 2, 2008-2010; 2011-2013).*

Mekanisme kerja sama kelembagaan "Joint Africa-EU Strategy" untuk mengatasi pembajakan kapal di perairan afrika timur khususnya horn of africa dan gulf of aden

Berikut merupakan tabel mekanisme kerja sama *Joint Africa-EU Strategy* mengenai strategi keamanan maritim secara keseluruhan:

Tabel 2. 3 ***Partnership 1: Peace and Security***

Priority Area	***Initiative***	***Concrete Action***
Political Dialogue	*Initiative* 1: penyelesaian dan implementasi kerangka kerja dialog politik dengan membangun hubungan yang sistematis dan struktural hubungan antara EU COPS-AU PSC, Kepala staff EU dan AU, dan antara struktur Uni Eropa yang baru (EEAS), AUC dan RECs *Peace and Security Departments*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan pada tingkat politik dalam meninjau tindakan yang telah dilakukan, dan dalam memberikan panduan politik yang lebih baik untuk masa depan	Adanya *Annual Meetings* antara EU COPS dan AU PSC telah terorganisir sejak 2006.
Political Dialogue	*Initiative* 2: Konsultasi antara *Africa Group* dan EU yang akan dibentuk di New York untuk membahas tantangan global dalam DK PBB dan UNGA (Konflik, terorisme, CBRN *proliferation dan conventional disarmament*). Program ini akan ditetapkan secara tahunan dan ditinjau setiap enam bulan untuk memungkinkan persiapan yang memadai pada pertemuan di tingkat Markas Besar.	PSC Africa dan Eropa juga terlibat dalam dialog di bidang *maritime safety dan security*, serta *transnational security*, terutama di Sahel
Political Dialogue	*Initiative* 3: *Exert coordinated and concerted effort to combat piracy*, termasuk dalam kerangka kerja PBB dan mempertimbangkan penjabaran instrumen hukum yang dianggap tepat untuk meningkatkan kerja sama dalam semua masalah yang berkaitan dengan pembajakan.	Uni Eropa mendukung *African Union Peacekeeping mission di Somalia* (AMISOM). Dan total kontribusi APF untuk AMISOM berjumlah €411.4 juta pada akhir tahun 2012 mencakup biaya tunjangan pasukan, gaji petugas polisi dan staf sipil, serta biaya operasional kantor misi di Nairobi.
Political Dialogue	*Initiative* 4: Dalam menangani krisis dan tantangan *Peace and Security* di Afrika, Eropa dan di wilayah lain, tim tematik *ad hoc Africa*-EU akan dibentuk untuk memastikan koordinasi dan kerja sama, sehingga akan sangat bermanfaat untuk menangani stabilisasi pasca-konflik, rekonstruksi dan pembangunan, serta memperkuat peran perempuan di semua tingkatan, untuk mengkonsolidasikan kemajuan yang telah dicapai dalam menyelesaikan konflik di Afrika dan mengambil keuntungan dari	-

	pengalaman serta kemampuan Eropa. Tim ini akan melibatkan pemangku kepentingan internasional dan pemangku kepentingan masyarakat sebagaimana mestinya dan akan mengoptimalkan tindak lanjut dari kebijakan AU tentang *Post Conflict Reconstruction and Developmen*t (PCRD). Dalam hal ini, Uni Afrika akan menyelesaikan studi tentang pembentukan Pusat Rekonstruksi dan Pembangunan Pasca Konflik.	
Political Dialogue	*Initiative* 5: *Thematic cluster sessions with experts from* AU/RECs/RMs/MS/EU akan dibuat pada tujuan operasional di bidang *climate change and security*, AU *border programme*, termasuk *"exchange of experience, capacity building, cross-border cooperation, development of legal instruments, dan disarmament issues"* termasuk Sisa Bahan Peledak Perang/*Explosing Remnants of War*), atau berfokus pada wilayah geografis.	-
Political Dialogue	*Initiative* 6: *Informal consultation* antara AU, EU, dan UN untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan AU/PBB yang diketuai oleh MR. Romano Prodi dan UN *Secretary General Reports* pada September 2009 yang akan memungkinkan ketiga lembaga tersebut untuk memajukan agenda masing-masing. Selain itu, saran-saran praktis dari para ahli harus membantu membuat kemajuan dalam menyediakan dukungan yang berkelanjutan, fleksibel dan dapat diprediksi untuk operasi-operasi pemeliharaan perdamaian yang diluncurkan dalam kerangka kerja Bab VIII Piagam PBB dan dilakukan oleh AU atau di bawah kewenangannya dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB.	Masih berlangsungnya diskusi di antara kedua belah pihak. AU dan EU juga telah melakukan diskusi dengan *nontraditional donors* seperti China, Turkey, *League of Arab States*.
Political Dialogue	*Initiative* 7: membangun AU *Border Programme* sebagaimana pengalaman dari Uni Eropa, AU dan EU akan menciptakan program yang dilakukan secara bersama, termasuk *exchange experience, capacity building, cross-border cooperation and development of legal instruments*. Inisiatif ini dapat diperluas melalui dukungan negara-negara Anggota UE untuk pertukaran pengalaman tentang delimitasi dan demarkasi perbatasan.	Uni Eropa mendukung inisiatif perbatasan Afrika melalui program-program indikatif nasional dan regional. Hal ini terbuka untuk dipertimbangkan untuk memberikan dukungan kepada rencana strategis AUBP
Political Dialogue	*Initiative* 8: dalam upaya penguatan kebijakan Pencegahan, Perdamaian, Pembangunan Perdamaian dan Pasca Konflik serta langkah-langkah APSA di tingkat benua dan regional, *plans of action* akan disusun dan diimplementasikan untuk menangani isu-isu tematik seperti: Program SSR, DDR, AU *Border Programmes*, *Early Warnings Systems*, *Women Peace and Security*, *Mediation-Negotiation capacity* dan *Counter-terrorism*.	Kerangka kerja kebijakan AU tentang SSR dikembangkan, sebuah rencana tindakan AU untuk AU Border Programmes telah dikembangkan dan didiskusikan pada pertemuan RECs yang

		diselenggarakan oleh ECOWAS pada bulan Oktober 2013.
***Operationalisation of* APSA**	*Initiative* 4: mengembangkan dan mendukung konsep, doktrin, dan prosedur yang terkait dengan ASF secara umum termasuk kemampuan pengerahan cepat, logistik, dan komponen maritim. Sedangkan APSA mengenai hubungan fungsional antara *Early Warning* dan *Planning Elements* di tingkat regional dan continental level serta pengambilan keputusan, pelatihan, mediasi dan yang berkaitan pada masalah keamanan lainnya (SSR, DDR, SALW, Counter-terroris).	*African Training Centre* untuk Perdamaian dan Keamanan telah dialokasikan dana sebesar €11.4 juta dimulai pada bulan Februari 2012 dan akan berlangsung hingga 31 Januari 2014. Program ini membahas masalah pelatihan di tiga tingkat yang berbeda: *continental* (AU), *regional* (REC) dan pusat-pusat pelatihan. Proses ini merupakan langkah pertama menuju implementasi kebijakan pelatihan AU yang berkelanjutan.
Predictable funding of Peace-Security Operations (PS0s)	*Initiative* 1) masalah pendanaan dapat diprediksi untuk PSO sebagaimana dipimpin oleh Afrika dan akan diintegrasikan dalam inisiatif-inisiatif relevan dalam bidang prioritas pertama dan kedua dari *Action Plan*	Masih belum ada informasi

Sumber dari *European Parliament-Directorat Generak for External Policies of the Union, Annex 3: Partnership 1: Peace and Security, "The Implementation of the Joint Africa Europe Strategy: Rebuilding Confidence and Commitments"*, 2014: 47-53.

Berdasarkan mekanisme kerja sama *Joint Africa-EU Strategy* tersebut, yang membahas terkait strategi keamanan maritim untuk mengatasi pembajakan kapal di Perairan Afrika Timur terdapat pada Prioritas Rencana Kerja JAES pada *Partnership Peace and Security.* Berikut implementasi *Joint Africa-EU Strategy on Peace and Security*: Pertama, *Enhancing Political Dialogue*, perdamaian dan keamanan tetap menjadi prioritas utama dari kerja sama *African Union* dan *European Union* dengan tujuan untuk menjamin terciptanya lingkungan damai dan aman bagi seluruh manusia, mengurangi konflik, dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan pemerintahan demokratis dengan berkontribusi terhadap stabilitas politik. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memastikan tujuan tersebut tercapai meliputi kebutuhan untuk memperkuat dialog politik di antara pemimpin Afrika, pendanaan APSA agar tetap beroperasi dan meningkatkan kolaborasi serta koordinasi dengan *Regional Economic Communities* dan *United Nations*. Walaupun kerangka JAES dalam *Peace and Security* ditujukan untuk mencapai posisi dan kepentingan bersama demi menyelesaikan masalah perdamaian dan keamanan di benua Afrika, tetapi tujuan baik tersebut masih menjadi tantangan seperti dialog berbasis kebijakan mengenai masalah keamanan baik di tingkat teknis dan politik masih belum ditingkatkan meskipun terdapat AU PSC dan EU PSC sejak tahun 2008 (*African Union Co-Chair*, 2016). Kedua, *Operationalisation of the* APSA, alat kemitraan AU dan EU untuk melaksanakan

perdamaian dan keamanan adalah Fasilitas perdamaian Afrika yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mendukung mekanisme regional dengan nama APF terdiri dari *African Peace Support Operations*, *Operationalisation of the African Peace and Security Architecture* dan *Operations of the* ERM. Bahwasanya sebagian besar dana APF dialokasikan untuk Peace Support operations sebesar 89,5% dari total EUR 1,76 miliar antara tahun 2004 dan 2016 8,31 % atau EUR 164 juta digunakan untuk peningkatan kapasitas sedangkan 1,32% atau EUR 30 juta digunakan untuk ERM (*AU Peace Fund*, 2016: 1-10). Selain itu, prioritas kerja sama AU dan EU di bidang perdamaian dan keamanan dengan memberikan dukungan kepada *African Standby Force*. Untuk mencapai tujuan tersebut, APSA harus dioperasionalkan walaupun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan. Lebih lanjut, APF masih memiliki elemen lemah dalam pengembangan kapasitas bahwa hampir seluruh anggaran didanai oleh EU. Sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan dan kapasitas pengambilan keputusan. Ketiga, *strengthening the relationship between the AU, EU, RECs and the UN*, adanya pengkoordinasian dan penguatan di antara pihak -pihak seperti AU, EU, RECs, dan UN sebagai proses penerapan menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di tingkat benua dalam hal tanggung jawab kepemimpinan dan pendanaan (Pirozzi, 2012: 260).

Selanjutnya, berdasarkan *Council of the European Union* mengenai *"Council conclusion on the Horn of Africa"* sebagaimana *Council meeting* diselenggarakan di Brussels, 14 November 2011, dengan adanya keterlibatan Uni Eropa di wilayah *Horn of Africa* berfokus pada Somalia, konflik dimensi regional, dan pembajakan dapat mendukung implementasi *Strategic Framework*. Kemudian, komitmen jangka panjang Uni Afrika terhadap *Horn of Africa* berakar pada kondisi geostrategis kawasan tersebut, membantu wilayah tersebut dari kemiskinan menuju pertumbuhan ekonomi mandiri, ketidakstabilan wilayah menimbulkan tantangan yang semakin besar tidak hanya terhadap keamanan masyarakat, tetapi keamanan seluruh dunia. Keterlibatan Uni Eropa berkelanjutan ini akan mendukung upaya-upaya regional termasuk *Intergovernmental Authority for Development* (IGAD), *African Union* (AU), dan upaya nasional untuk mencapai perdamaian abadi, keamanan, dan keadilan, *good governance* berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, *Strategic Framework* ini juga mengakui perlunya melindungi warga negara Eropa dari ancaman-ancaman yang berasal dari wilayah *Horn of Africa* termasuk terorisme, pembajakan, tantangan perubahan iklim, dan migrasi. Selain itu, Uni Eropa sangat prihatin dengan krisis kemanusiaan yang menimpa beberapa negara di *Horn of Africa*, bahwa berdasarkan dukungan hingga saat ini lebih dari 760 juta euro dan Uni Eropa akan terus memberikan bantuan kemanusiaan secara netral, tidak memihak, dan independen, begitu pun Dewan Uni Eropa menyerukan semua pihak untuk memastikan akses secara aman dan tanpa hambatan bagi para aktor kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Kemudian, Dewan Uni Eropa juga menggarisbawahi perlunya mengatasi penyebab mendasar dari krisis kemanusiaan, khususnya kerawanan pangan struktural, kekeringan berulang, dan konflik. Uni Eropa akan terus mendukung negara-negara di kawasan dalam memperkuat kapasitas nasional negara-negara di *Horn of Africa* melalui strategi pengurangan risiko bencana dan program kerja sama pembangunan jangka panjang di bidang kesiapsiagaan kekeringan, pertanian, pembangunan pedesaan, dan ketahanan pangan. Namun, efektivitas dukungan tersebut bergantung pada kepemilikan lokal dan komitmen politik negara-negara di kawasan untuk menerapkan kebijakan struktural guna mendukung produksi peternakan berkelanjutan, termasuk pergerakan lintas batas, pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya air serta perdagangan dan integrasi regional. Kemudian, permasalahan pembajakan di lepas pantai Somalia terus memberikan dampak negatif terhadap keamanan maritim internasional serta kegiatan ekonomi regional dan internasional. Dewan tetap berkomitmen terhadap terhadap kerja dari EU *naval counter-piracy operation*, EU NAVFOR Atalanta yang memberikan perlindungan terhadap *World Food Programme* dan AMISOM *Shipping* serta berkontribusi untuk mencegah pembajakan dan melindungi jalur pelayaran yang rentan. Uni Eropa akan terus memajukan upaya untuk meningkatkan kapasitas Somalia dan wilayah *Horn of Africa* secara lebih luas dalam memerangi pembajakan termasuk melalui penguatan kapasitas maritim lebih lanjut dan kapasitas penuntutan serta penahanan. Begitu pun Uni Eropa akan terus berupaya melacak aliran keuangan dari pembajakan. Sebagaimana halnya EUSR untuk wilayah *Horn of Africa* akan berkontribusi dalam

mengembangkan dan menerapkan pendekatan Uni Eropa secara koheren, efektif, dan seimbang terhadap pembajakan (*Council of the European Union*, 2011: 1-12).

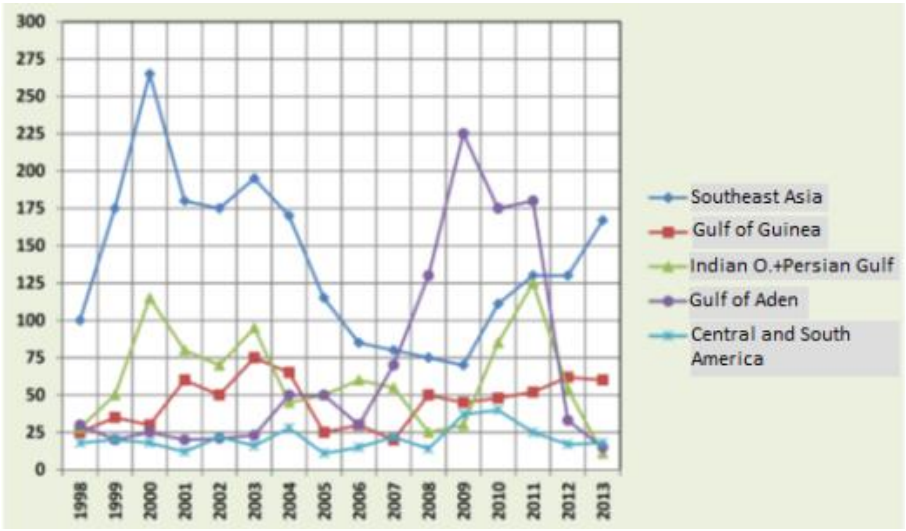
Selanjutnya, sebagaimana halnya kerja sama *Joint Africa-EU Strategy* yang diadopsi pada tahun 2007, untuk memperkuat dan memajukan perdamaian, keamanan, pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia bahwa Uni Eropa menyediakan dana sebesar 1 miliar euro sebagai implementasi *African Peace and Security Structure* (Ehrhart dan Petretto, 2012: 11-19). Dalam hal ini, Uni Eropa membantu Afrika pada misi penjaga perdamaian khusus di Afrika yaitu AMISOM pada tahun 2007 yang sebelumnya sudah terbentuk misi perdamaian dipimpin oleh IGAD, namun misi tersebut memiliki kepentingan berlawanan dari negara-negara anggotanya, sehingga AMISOM turut berkontribusi dalam misi perdamaian di Somalia yang keterlibatannya dirancang dalam jangka pendek kemudian digantikan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB (*African Union: Reports of the Chairperson Commission in Somalia*, 2011). Lebih lanjut, mandat AMISOM juga diperpanjang beberapa kali dan memiliki kekuatan militer resmi sebanyak 12.000 tentara yang saat ini sekitar 10.000 dikerahkan. Kemudian, AMISOM diberi mandat untuk menstabilkan situasi negara Somalia berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Selain itu, AMISOM juga dikerahkan di kota Mogadishu, tempat operasi mengamankan instalasi utama seperti pelabuhan, bandara, dan gedung TFI, serta pertemuran Al Shabaab dalam upaya melawan pemberontakan. Dengan keberhasilan AMISOM ini, Uni Afrika mempertimbangkan dan memperluas operasi AMISOM di luar Mogadishu hingga ke Somalia Selata dan Somalia Tengah. Adapun tujuan perluasan operasi ini digunakan untuk membantu operasi penjaga perdamaian PBB dan membantu rekonstruksi serta stabilitas jangka panjang Somalia (*African Union: Reports of the Chairperson Commission in Somalia*, 2011).

Selain itu, strategi Uni Eropa di wilayah Afrika khususnya untuk mengatasi pembajakan kapal di *Horn of Africa* dan *Gulf of Aden* adalah bahwa pada tahun 2008, Uni Eropa menginisiasi untuk membentuk operasi guna memerangi pembajakan yaitu diberi nama EUNAVFOR Somalia atau Operasi Atalanta, bahwa operasi dirancang dengan mandat satu tahun dan dana sebesar 8.3 juta euro (*EU Naval Force Operation Atalanta*, 2024). Adapun operasi ini meliputi wilayah di bagian *Red Sea*, *Gulf of Aden*, *Somali Basin*, dan sebagian Samudera Hindia termasuk Seychelles (*European Union*, 2020). Kemudian, EUNAVFOR ini juga dirancang sebagai misi kemanusiaan dan respon terhadap perlunya menjaga jalur pelayaran tersibuk di dunia agar tetap lancar, serta perlindungan perdagangan internasional, perikanan, dan industri penjaminan asuransi Eropa (*EU Naval Force Operation Atalanta*, 2024). Selain itu, strategi Uni Eropa di Afrika banyak menggabungkan pendekatan berbasis laut dan darat terhadap masalah pembajakan, kemudian bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya seperti NATO, PBB, dan *Contact Group on Piracy* di lepas pantai Somalia (Lewis dan Winn, 2017: 1-15). Dengan adanya Operasi ini dapat mendukung peningkatan keamanan maritim dalam memerangi terorisme, kejahatan terorganisir dan pembajakan (*EU Naval Force Operation Atalanta*, 2024).

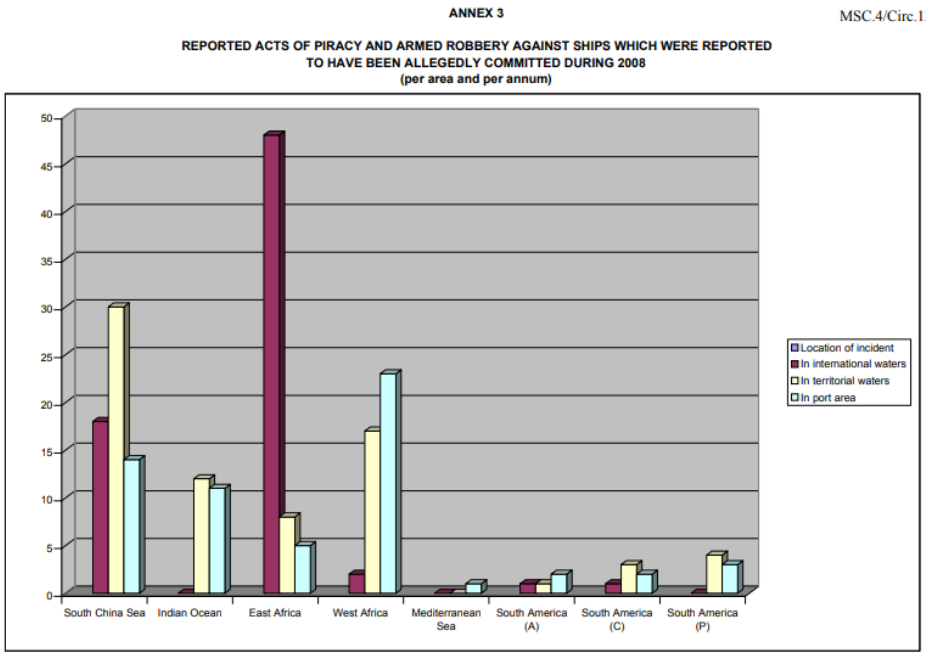
Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sebagaimana mekanisme kerja sama kelembagaan AU-EU melalui *"Joint Africa-EU Strategy"* untuk mengatasi pembajakan kapal di Perairan Afrika Timur, khususnya di perairan *Horn of Africa* dan *Gulf of Aden*, sehingga efisiensi kerja sama kelembagaan ini dapat ditemukan pada norma, nilai, kebijakan, dan keberhasilan dari Afrika dan Eropa yang terikat secara bersama pada sejarah, budaya, geografi, kesamaan akan tujuan masa depan, dan kesamaan akan nilai-nilai bersama seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, solidaritas, keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sebagaimana yang tertuang pada perjanjian internasional dan di dalam dokumen konstitutif antara AU dan EU. Penelitian ini menunjukkan temuan dari efisiensi mekanisme kerja sama kelembagaan AU-EU melalui JAES untuk mengatasi pembajakan kapal di perairan *Horn of Africa* dan *Gulf of Aden* oleh Perompak Somalia apabila menggunakan Teori-teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian adalah: Pertama, kelembagaan *Joint Africa-EU Strategy*. Kedua, proses pengambilan keputusan *Joint Africa-EU Strategy*. Ketiga, partisipasi dan keterlibatan *Stakeholder*. Keempat, koordinasi dan pengelolaan sumber daya kerja sama *Joint Africa-EU Strategy*. Kelima, tantangan dan evaluasi kerja sama *Joint Africa-EU Strategy*.

Penelitian ini menemukan bahwa dengan teori Kelembagaan Baru sebagai *Umbrella Theory* dan *Grand Theory* berguna untuk membantu menganalisis penelitian dan sebagai kerangka utama untuk menganalisis kerja sama kelembahaan antara *African Union* dan *European Union* melalui *"Joint Africa-EU Strategy"* dalam mengatasi pembajakan kapal oleh Perompak Somalia di Perairan Afrika Timur Khususnya *Horn of Africa* dan *Gulf of Aden*, bahwa terdapat nilai atau norma tekad untuk memberikan perhatian baru dan jangka panjang terhadap Afrika melalui penguatan kemitraan berdasarkan identitas baru para mitra, hal ini diwujudkan dalam pertemuan dialog politik intensif untuk membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dan tantangan seperti perdamaian dan keamanan serta berfokus pada prinsip kesetaraan, kemitraan, solidaritas, dan dialog budaya.

Berikut data statistik pembajakan yang terjadi Kawasan Afrika mengalami penurunan signifikan:



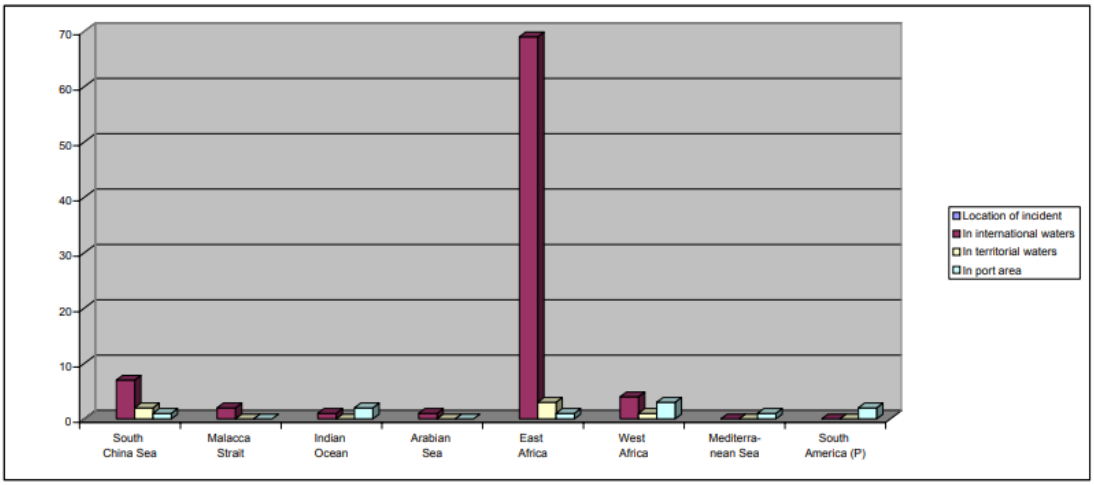
Gambar 3. 11 Perkembangan kasus pembajakan di Perairan Afrika dari tahun 1993 hingga 2013 (https://www.researchgate.net/publication/283420631_Considering_anti-piracy_ship_security_Citadel_design_and_use)



Gambar 3. 12. *International Maritime Organization, "Reported Acts of piracy and Armed Robbery Ships-Annual Report",* 2008

MSC.4/Circ.133
ANNEX 3
Page 2

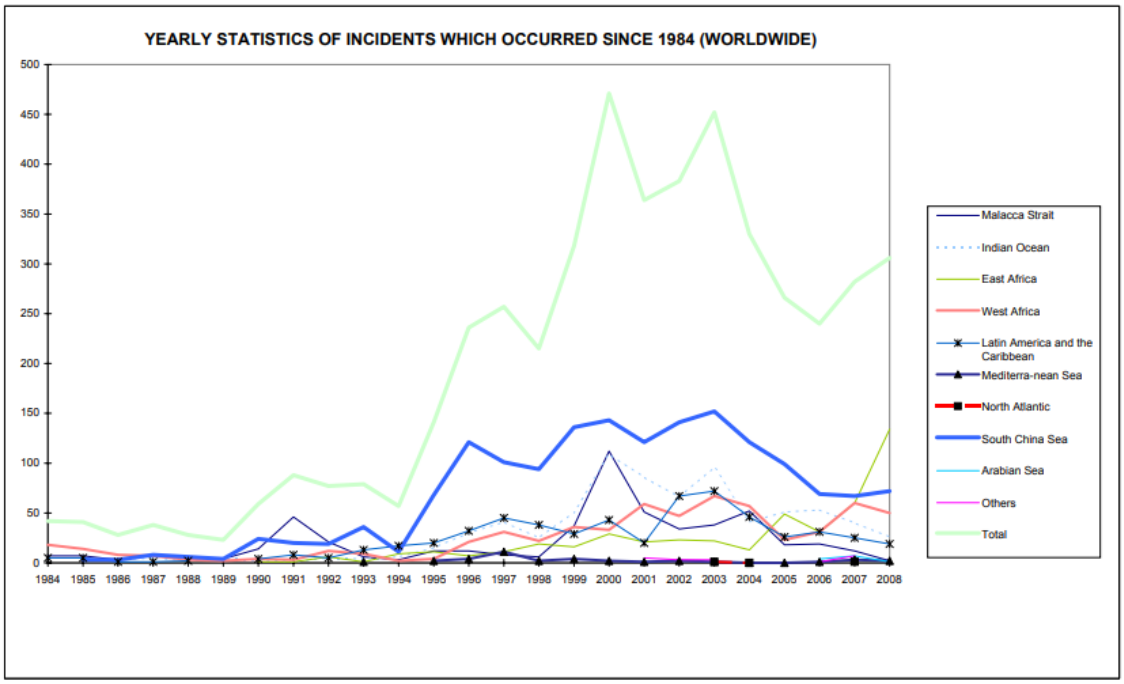
REPORTED ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS WHICH WERE REPORTED TO HAVE BEEN ALLEGEDLY ATTEMPTED DURING 2008



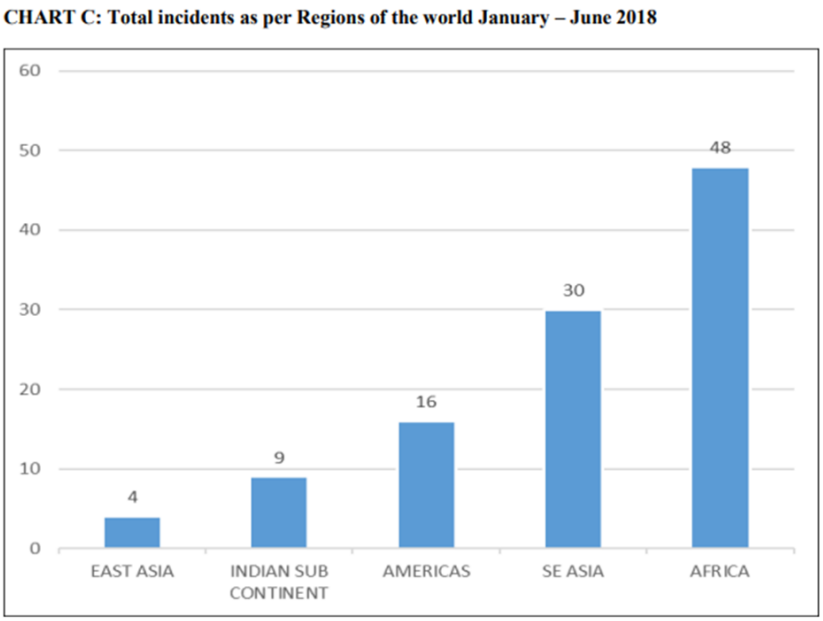
Gambar 3. 13 *International Maritime Organizations, "Reported Act of Piracy and Armed Robbery Against Ships",* 2008.

ANNEX 4

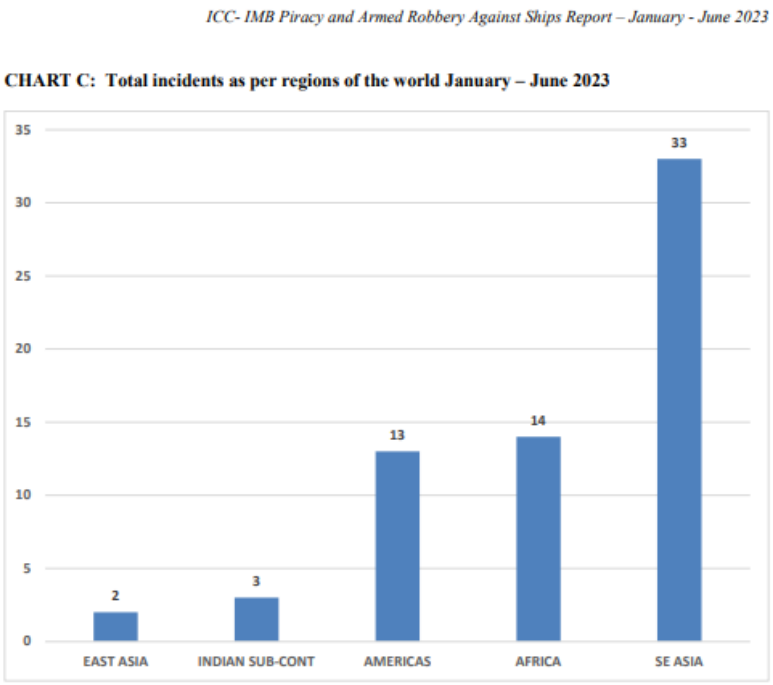
YEARLY STATISTICS OF INCIDENTS WHICH OCCURRED SINCE 1984 (WORLDWIDE)



Gambar 3. 14. *International Maritime Organizations,* "Data statistik per tahun aktivitas pembajakan kapal di beberapa kawasan di dunia", 2008



Gambar 3. 15 ICC-IMB Laporan kasus Pembajakan dan Perampokan Bersenjata ditujukan terhadap Kapal, 2018. (ICC IMB (2018: 8))



Gambar 3. 16 *ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report, January – June 2023. (ICC International Maritime Bureau* (2023: 8)

Berdasarkan data aktivitas pembajakan kapal tersebut dapat dilihat terjadi penurunan signifikan di perairan Afrika yang awalnya di tahun 2018 terjadi aktivitas pembajakan kapal sebanyak 48, dan mengalami penurunan di tahun 2023 dengan jumlah pembajakan sebanyak 14. Kemudian, rentangan tahun 1998-2013 aktivitas pembajakan kapal di wilayah *horn of africa* dan *gulf of aden* mengalami penurunan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengangkat isu mengenai peran African Union dan European Union akibat isu pembajakan kapal yang dilakukan oleh perompak Somalia di Horn of Africa dan Gulf of Aden yang mengakibatkan terhambatnya rute pelayaran dan perdagangan global. Akibat pembajakan kapal ini juga mengakibatkan ekonomi global mengalami penurunan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa pembajakan kapal menjadi tantangan bagi politik internasional. Untuk itu, diperlukan tiga hal dari politik internasional. Pertama, masing-masing yurisdiksi nasional perlu menerapkan undang-undang melawan pembajakan dengan melihat bahwa isu ini merupakan kejahatan transnasional. Kedua, negara dengan jalur pelayaran tersebut harus diberi dukungan demi mengamankan perairan teritorial apabila negara-negara tersebut tidak mampu mengamankan perairannya serta meningkatkan kapasitas negara mereka untuk mengadili perompak melalui struktur pengadilan sendiri. Ketiga, apabila tidak memungkinkan negara-negara mengadili kasus pembajakan tersebut, komunitas internasional harus melakukan langkah-langkah perbaikan bahwa infrastruktur maritim yang sangat besar dan jangkauan global menjadi sangat penting yang dapat dilakukan dengan mekanisme kelembagaan antara African Union dengan European Union melalui "Joint Africa-EU Strategy" yang berfokus pada keamanan maritim untuk mengatasi pembajakan kapal di Perairan Afrika Timur.

Kemudian, berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data mengenai penelitian "analisis efisiensi kerja sama kelembagaan African Union dan European Union melalui "Joint Africa-EU Strategy" untuk mengatasi pembajakan kapal di Perairan Afrika khususnya wilayah Horn of Africa dan Gulf of Aden oleh Perompak Somalia, bahwa strategi kerja sama antara Uni Afrika dan Uni Eropa melalui JAES dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas, ekonomi, pembangunan, politik, dan keamanan di Horn of Africa dan Gulf of Aden serta pemerintahan Somalia. Aktivitas pembajakan kapal dalam kurun waktu 2008-2023 memperlihatkan penurunan yang cukup signifikan. Strategi bersama yang dilakukan oleh kedua lembaga berupa dialog politik, operasi militer, dan pendanaan telah mampu mengurangi risiko pembajakan kapal. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi sinergi yang signifikan antara negara-negara Uni Afrika dan Uni Eropa dalam meningkatkan kapasitas keamanan maritim di Horn of Africa dan Gulf of Aden dengan melibatkan patroli bersama, pelatihan keamanan, dan peningkatan teknologi pemantauan laut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerja sama dalam kerangka Joint Africa-EU Strategy memiliki potensi untuk memberikan solusi yang efisien dan berkelanjutan dalam menanggulangi pembajakan kapal di Horn of Africa dan Gulf of Aden.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Miss Asmiati A Malik, PhD selaku Dosen Pembimbing Penulis atas bimbingan dan dukungan yang diberikan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada rekan-rekan atas diskusi dan masukan yang berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Ebook

Borner, S., Bodmer, F., & Kobler, M. (2004). *Institutional Efficiency and its Determinants: The Role of Political Factors in Economic Growth* (Issue January 2004). OECD Publications

Cresswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications Inc.

Kraska, J. (2011). *Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea* (First). Praeger.

Lowndes, V., & Roberts, M. (2013). Why Institutions Matter: The New Institutionalism in Political Science. In *Palgrave Macmillan* (First). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.5860/choice.51-4080

Neuman, L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Qualitative Approach*. Pearson Education Ltd.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.

Petretto, K. (2011). Piracy as a Problem of International Politics. In S. Mair (Ed.), *Piracy and Maritime Security: Regional Characteristics and Political, Military, Legal, and Economic Implications* (p. 13). Stiftung Wissenschaft und Politik.

Pirozzi, N. (2012). Strengthening the Africa-EU Partnership on Peace and Security-How to Engage African Regional Organizations. In *Istituto Affari Internazionali* (Issue October). Edizioni Nuova Cultura.

Rudloff, B., & Weber, A. (2011). Somalia and the Gulf of Aden. In S. Mair (Ed.), *Piracy and Maritime Security: Regional Characteristics and Political, Military, Legal, and Economic Implications* (p. 34). Stiftung Wissenschaft und Politik.

Journal

Adaye, O., & Nnwobunwene, S. (2011). Piracy in Somalia and Operation Atalanta: The Need for a Diplomatic Option. *African Research Review*, *4*(4), 561–572. https://doi.org/10.4314/afrrev.v4i4.69252

African Union Co-Chair. (2016). *Co-Chair Conclusions of the Joint African Union Peace and Security Council (AU PSC)/European Union Political and Security Committee (EU PSC) Retreat* (Issue October 2015, p. 1). African Union.

African Union Peace Fund. (2016). *Securing Predictable and Sustainable Financing for Peace in Africa* (Issue August, pp. 1–10). https://archives.au.int/handle/123456789/2774

Ahmad, M. (2020). Maritime Piracy Operations: Some Legal Issues. *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping*, *4*(3), 62–69. https://doi.org/10.1080/25725084.2020.1788200

Alexandre, A. G. (2022). An analysis of the issue of piracy in the Horn of Africa through the lens of the Securitization Theory of the Copenhagen School. *JANUS NET E-Journal of International Relation*, *13*(2), 35–47. https://doi.org/10.26619/1647-7251.13.2.2

Anyanova, E. (2007). The EC and enhancing ship and port facility security. Journal of International Commercial Law and Technology, 2(1), 25–31.

Belfer, M. A. (2009). Central European Journal of International & Security Studies. *Metropolitan University Prague*, *3*(1), 1–200.

Berlusconi, G. (2012). Piracy: History. *ResearchGate*, *1*(January), 1–4. https://www.researchgate.net/publication/295086441_History_of_piracy

Besley, T., Fetzer, T., & Mueller, H. (2012). One Kind of Lawlessness : Estimating the Welfare Cost of Somali Piracy. In One Kind of Lawlessness Estimating the Welfare Cost of Somali Piracy (S-6013-SOM-1; April, Vol. 1, Issue 1).

Bueger, C., Edmunds, T., & McCabe, R. (2020). Into the sea: capacity-building innovations and the maritime security challenge. *Third World Quarterly*, *41*(2), 228–246. https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1660632

Caramerli, A., & Caselli, Z. (2015). The EU Comprehensive Approach on Somali Piracy. *Audri*, *8*(1), 78–87.

Chalk, P. (2009). Maritime Piracy: Reasons, Dangers, and Solutions. Before the Committee on Transportation and Infrastructure Subcommittee on Coast Guard and Maritime Transportation United States House of Representatives. In *RAND Corporation*. https://doi.org/10.7249/mg697

Chalk, P. (2010). Piracy Off the Horn of Africa: Scope, Dimensions, Causes and Responses. *The Brown Journal of World Affairs*, *16*(2), 89–108. https://www.jstor.org/stable/24590911

Cordner, L. (2011). Progressing Maritime Security Cooperation in the Indian Ocean. *Naval War College Review*, *64*(4), 68–88. https://www.jstor.org/stable/26397244

Council of the European Union. (2007). Lisbon Declaration - EU Africa Summit (Lisbon, 8-9 December, 2007). *European Union*, *07*(December), 1–2.

Del Biondo, K. (2020). Moving beyond a donor-recipient relationship? Assessing the principle of partnership in the joint Africa–EU strategy. *Journal of Contemporary African Studies*, *38*(2), 1–20. https://doi.org/10.1080/02589001.2018.1541503

Ehrhart, H.-G., & Petretto, K. (2012). The EU and Somalia: Counter-Piracy and the Question of a Comprehensive Approach. *Options*, *1*(February), 1–50.

Felbab-brown, V. (2014). The Not-So-Jolly Roger: Dealing With Piracy Off the Coast of Somalia and in the Gulf of Guinea. *The Brookings Institution*, *1*(1), 5–8.

Gunawan, Y. (2012). Penegakan Hukum TerHadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, *19*(1), 73–86. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1978

Hadju, Z. A. A. (2021). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal SASI*, *27*(1), 12–23. https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8687

Haidara, S., Aubry, A., Niaudet, G., & Sebban, F. (2008). Africa-EU joint strategy Lisbon + 1: What headway has the Africa-Europe partnership made? *Coordination SUD- Solidarite Urgence Development*, *1*(December), 1–16.

Hamza, F. R., & Priotti, J.-P. (2020). Maritime trade and piracy in the Gulf of Aden and the Indian Ocean (1994–2017). *Journal of Transportation Security*, *13*(3–4), 141–158. https://doi.org/10.1007/s12198-018-0190-4

Hartati, A. Y. (2011). Konflik Internal SomalIa dalam Konteks Perang Sipil. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, *8*(1), 1–34.

He, Z., Wang, C., Gao, J., & Xie, Y. (2023). Assessment of Global Shipping Risk Caused by Maritime Piracy. *Heliyon*, *9*(10), 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20988

Hecker, B.-T. (2012). Combating Piracy Around the Horn of Africa. *Konrad Adenauer Stiftung*, *1*(1), 71–92. http://www.jstor.com/stable/resrep09946

Johnson, L. N. M. (2014). The Consequences of Somali Piracy on International Trade. *Pepperdine University*, *8*(5), 1–15. https://digitalcommons.pepperdine.edu/globaltides/vol8/iss1/5

Karawita, A. K. (2019). Piracy in Somalia: An Analysis of the Challenges Faced by the International Community. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *23*(2), 102–119. https://doi.org/10.22146/jsp.37855

Laila, A., & Lon, N. J. (2021). The Dynamics of Maritime Security along the South We estern Coast of Cameroon 1981-2017: Manifestations and Chall allenges. *International Journal on Integrated Education*, *4*(9), 109–122.

Lucas, E. R. (2013). Somalia's "Pirate Cycle": The Three Phases of Somali Piracy. *Journal of Strategic Security*, *6*(1), 55–63. https://doi.org/10.5038/1944-0472.6.1.5

Mustika, M. M. (2019). Peran Uni Eropa Melalui Patroli EU NAVFOR dalam Menangani Aktivitas Perompak Somalia di Teluk Aden Periode Tahun 2008-2012. *Journal of International Relations*, *5*(2), 312–322.

Nelson, R. O., & Goossens, S. (2011). Counter-Piracy in the Arabian Sea: Challenges and

Opportunities for GCC Action. *Center For Strategic & International Studies*, *1*(1), 1–8. https://www.csis.org/analysis/counter-piracy-arabian-sea

Nwokedi, T. C., Anyanwu, J., Eko-Rapheaels, M., Obasi, C., Akpufu, I. D., & Ogola, D. B. (2022). Probability Theory Analysis of Maritime Piracy and the Implications for Maritime Security Governance. *Journal of Eta Maritime Science*, *10*(2), 133–143. https://doi.org/10.4274/jems.2022.37132

Orugbani, A., & S.C. F, N. (2010). Piracy in Somalia and Operation Atlanta: The Need for a Diplomatic Option. *African Research Review*, *4*(4), 561–572.

Osei-Tutu, J. A. (2011). The Root Causes of the Somali Piracy. *KAIPTC Occaisonal Paper*, *March*(31), 1–24.

Pichon, E., & Pietsch, M. (2019). Piracy and Armed Robbery off the Coast of Africa: EU and Global Impact. *European Parliamentary Research Service*, *1*(March), 1–23. https://doi.org/10.2861/78273

Prasetyo, H. D. (2016). Operasi Atalanta Oleh Uni Eropa di Teluk Aden Dalam Menangani Perompak Somalia Periode Tahun 2009-2013. *Journal of International Relations*, *2*(1), 57–66. https://www.semanticscholar.org/paper/OPERASI-ATALANTA-OLEH-UNI- EROPA-DI-TELUK-ADEN-DALAM-Prasetyo-Utomo/0826447e74c1d68e2471dc12959b6347e98d5a11

Sahin, S., & Sahin, M. O. (2023). African Missions of the European Union in the Context of Security Strategy. *Journal of Emerging Economies and Policy*, *8*(2), 31–56.

Sauvageot, E. (2009). Piracy off Somalia and its Challenges to Maritime Security: Problems and Solutions. *UNISCI Discussion Paper*, *19*(January), 1–18.

Scheffler, A. (2010). Piracy-threat or nuisance? *NATO Defence College Research Division*, *56*(Februari), 1–12. https://www.jstor.org/stable/resrep10422

Shortland, A. (2011). "Robin Hook": The Developmental Effects of Somali Piracy. In Economics of Security Working Paper Series (54; Issue 54). http://hdl.handle.net/10419/119380

Spearin, C. (2014). Promising Privateers?: Understanding the Constraints of Contemporary Private Security at Sea. *U.S Naval War College Press*, *67*(2), 97–116. https://www.jstor.org/stable/26397759

Sullivan, A. K. (2010). Piracy in the Horn of Africa and its effects on the global supply chain. *Journal Transportation Security*, *3*(1), 231–243. https://doi.org/10.1007/s12198-010-0049-9

The Hague Centre for Strategic Studies. (2008). Future Issue: Maritime Piracy. *Hague Centre for Strategic Studies*, *2*(Februari), 1–12. https://www.jstor.org/stable/resrep12588

Tobing, G. G. L. (2020). Keterlibatan Uni Eropa Dalam Mengatasi Perompakan di Somalia Tahun 2008-2015. *Journal of International Relations*, *6*(4), 422–430.

Townsley, M., & Oliveira, A. (2015). Space-time Dynamics of Maritime Piracy. *Security Journal*, *28*(3), 217–229. https://doi.org/10.1057/sj.2012.45

Ulzikri, Ahmad Robi. 2023. "Politik Dan Bencana : Kajian Rekognisi Hak Masyarakat Di Pulau Terisolir Di Masa Krisis." *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSTER)* 2(1):28–39.

Wallner, M., & Kokoszkiewicz, A. (2019). Maritime Piracy and Limitations of the International Law of the Sea. *Historia i Polityka*, *35*(28), 25–35. https://doi.org/10.12775/HiP.2019.012

Weitz, R. (2009). Countering the Somali Pirates: Harmonizing the International. *Journal of Strategic Security*, *2*(3), 1–12. https://doi.org/10.5038/1944-0472.2.3.1

Williams, P. R., & Lowry, P. (2014). Maritime Piracy: A Sustainable Global Solution Case Western Reserve Journal of International Law A Sustainable Global Solution. *Case Western Reserve Journal of International Law*, *46*(1–2), 178–214. https://digitalcommons.wcl.american.edu/facsch_lawrev/1266

Wright, J. (2013). Transnational organised crime in eastern Africa: a threat assessment. In *UNODC*. UNODC

International Law

Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual report – 2009, 1 (2010).

Convention for the Supression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation: Concluded at Rome on 10 March 1988, Pub. L. No. 29004, United Nations 221 (1992). https://doi.org/10.18356/9789210015257c017

Working Papers

Besley, T., Fetzer, T., & Mueller, H. (2012). One Kind of Lawlessness : Estimating the Welfare Cost of Somali Piracy. In *One Kind of Lawlessness Estimating the Welfare Cost of Somali Piracy* (S-6013-SOM-1; April, Vol. 1, Issue 1). https://www.researchgate.net/publication/254391687_One_Kind_of_Lawlessness_Estimating_the_Welfare_Cost_of_Somali_Piracy

Shortland, A. (2011). "Robin Hook": The Developmental Effects of Somali Piracy. In *Economics of Security Working Paper Series* (54; Issue 54). http://hdl.handle.net/10419/119380

Report and Conference

Africa-EU Commission. (2008). *Africa-EU Ministerial Troika, Addis Ababa (20-21 November 2008) Joint Progress Report on the implementation of the Africa-EU Joint Strategy and its first Action Plan (2008-2010)* (Issue November 2008).

African Union. (2011). Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in Somalia. In *Peace and Security Council Meeting: Vol. PSC/PR/2(C* (Issue September).

African Union. (2012). *2050 Africa's Integrated Maritime Strategy (2050 AIM Strategy): Vol. 1.0*. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11151/2050_aims_srategy.pdf Atlantic

Chalk, P. (2009). Maritime Piracy: Reasons, Dangers, and Solutions. Before the Committee on Transportation and Infrastructure Subcommittee on Coast Guard and Maritime Transportation United States House of Representatives. In *RAND Corporation*. https://doi.org/10.7249/mg697

Commission of the European Communities. (2005). Communication from the Commission to the Council-the European Parliament and the European Economic and Social Committee-EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa's Development. In *Commission of the European Communities*.

Consilium European Union. (2008). *Report on the Implementation of the European Security Strategy - Providing Security in a Changing World* (Issue December).

Council of the European Union. (2008). *The Africa-EU Strtaegic Partnership: A Joint Africa- EU Strategy* (Issue December 2007).

Council of the European Union. (2011). *Council Conclusions On the Horn of Africa* (Vol. 32, Issue November).

Feierstein, G. M. (2020). The Impact of Middle East Regional Competition on Security and Stability in the Horn of Africa. In *Middle East Institute* (Issue August 2020). https://www.mei.edu/sites/default/files/2020-08/The Impact of Middle East Regional Competition on Security and Stability in the Horn of Africa.pdf

Giampaolo, A., & Foster, E. (2011). *Changes in Maritime Practice as a Result of Piracy in the Gulf of Aden*.

ICC International Maritime Bureau. (2009). *Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report*.

ICC International Maritime Bureau. (2011). *Piracy and Armed Robbery Against Ships*. ICC

International Maritime Bureau. (2018). ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery Against Ships. *ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery Against Ships Report for the Period of 1 January – 30 June 2018*, *July*, 1–46.

ICC International Maritime Bureau. (2022). ICC International Maritime Bureau: Piracy and Armed Robbery Against Ships Report for the Period 1 January-31 December 2022. *ICC- IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report – January - December 2022 ICC*, 1–50.

African Union. (2012). *2050 Africa's Integrated Maritime Strategy (2050 AIM Strategy): Vol. 1.0*. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11151/2050_aims_srategy.pdf Atlantic

Chalk, P. (2009). Maritime Piracy: Reasons, Dangers, and Solutions. Before the Committee on Transportation and Infrastructure Subcommittee on Coast Guard and Maritime Transportation United States House of Representatives. In *RAND Corporation*. https://doi.org/10.7249/mg697

Commission of the European Communities. (2005). Communication from the Commission to the Council-the European Parliament and the European Economic and Social Committee-EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa's Development. In *Commission of the European Communities*.

Consilium European Union. (2008). *Report on the Implementation of the European Security Strategy - Providing Security in a Changing World* (Issue December).

Council of the European Union. (2008). *The Africa-EU Strtaegic Partnership: A Joint Africa- EU Strategy* (Issue December 2007).

Council of the European Union. (2011). *Council Conclusions On the Horn of Africa* (Vol. 32, Issue November).

Feierstein, G. M. (2020). The Impact of Middle East Regional Competition on Security and Stability in the Horn of Africa. In *Middle East Institute* (Issue August 2020). https://www.mei.edu/sites/default/files/2020-08/The Impact of Middle East Regional Competition on Security and Stability in the Horn of Africa.pdf

Giampaolo, A., & Foster, E. (2011). *Changes in Maritime Practice as a Result of Piracy in the Gulf of Aden*.

Hersi, A., & Sharamo, R. D. (2020). *How an IGAD Regional Maritime Council can boost trade*. https://issafrica.org/research/policy-brief/how-an-igad-regional-maritime-council- can-boost-trade

ICC International Maritime Bureau. (2009). *Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report*.

ICC International Maritime Bureau. (2011). *Piracy and Armed Robbery Against Ships*. ICC

International Maritime Bureau. (2018). ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery Against Ships. *ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery Against Ships Report for the Period of 1 January – 30 June 2018*, *July*, 1–46.

ICC International Maritime Bureau. (2022). ICC International Maritime Bureau: Piracy and Armed Robbery Against Ships Report for the Period 1 January-31 December 2022. *ICC- IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report – January - December 2022 ICC*, 1–50.

ICC International Maritime Bureau. (2023). ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery Against Ships Report. *ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery Against Ships Report for the Periode 1 January-30 June 2023*, *July*, 1– 38.

International Crisis Group. (2012). *The Gulf of Guinea: The New Danger Zone* (Issue December). https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/guinea/gulf-guinea-new- danger-zone

International Maritime Organization. (2008). Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships-Annual Report-2008. In *International Maritime Organization* (Vols. T2- MSS/2.1, Issue March).

International Maritime Organization. (2010). Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships. *Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships Issued Monthly-Acts Reported during March 2010*, 1–2.

Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual report – 2009, 1 (2010).

Martens, M. (2017). *Food and Water Security in the Middle East and North Africa* (Issue October). www.nato-pa.int

The Council of the European Union. (2007). *The Africa-EU Strategic Partnership: A Joint Africa-EU Strategy* (Vol. 07, Issue December).

Web Page

Banton, C. (2023). *Efficiency: What It Means in Economics, the Formula To Measure It*. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/e/efficiency.asp

BBC News Indonesia. (2010). *Perompak Somalia dapat $5,5 juta*. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/12/101228_somalia_piracy

EU Naval Force Operation Atalanta. (2024). *EUNAVFOR*. EUNAVFOR European Union. https://eunavfor.eu/mission

European Commission. (2000). *Africa-Europe Summit under the Aegis of the OAU and the EU Cairo, 3-4 April 2000*. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/PRES_00_901

European Commission. (2007a). *A Joint Africa-EU Strategy*. European Commission. https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/joint-africa-eu-strategy_en

European Commission. (2010). *Africa-EU Relations-Key Facts and Figures*. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_10_234

European Commission. (2018). *EU Sopport for Somalia*. European Commission.

European Commission. (2019). *A Joint Africa-EU Strategy*. European Commission. https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/joint-africa-eu-strategy_en

European Commission. (2020a). *About the Africa-EU Partnership*. European Commission. https://international-partnerships.ec.europa.eu/orphan-pages/intpa-landing-pages/about- africa-eu-partnership_en

European Commission. (2022a). *Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions-2022 Communication on EU Enlargement Policy*. European Commission.

European Commission. (2022b). *Policy document-Developing a multiannual strategic policy for European integrated border management in accordance with Article 8(4) of Regulation (EU) 2019/1896*. European Commission.

European Commission. (2024). *What the European Commission does in law*. European Commission.

European Parliament. (2024a). *How the European Union Works*. European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/chapter/209/how-the-european-union- works

European Parliament. (2024b). *The Treaty of Lisbon*. European Union.

European Space Agency. (2006). *Earth from Space: The Gulf of Aden-the gateway to Persian oil*. European Space Agency. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Earth_from_Space_The_Gulf_of _Aden_the_gateway_to_Persian_oil

European Union. (2008). *From a strategy for Africa to an EU-Africa Strategic Partnership*. European Union.

European Union. (2020). *European Union Naval Force Somalia Military Operation Atalanta*. EEAS European Union. https://www.eeas.europa.eu/eu-navfor-somalia/european-union- naval-force-somalia-military-operation-atalanta_und_en

European Union. (2023). *Delegation of the European Union to the African Union*. European Union. https://www.eeas.europa.eu/african-union/who-we-are_en?s=43

European Union. (2024a). *Aims and values European Union*. European Union.

European Union. (2024b). *History of the European Union 1945-1959*. European Union. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59_en

European Union External Action. (2019). *EU-Somalia Relations. Factsheet*. European Union External Action.

European Union External Action. (2021a). *Operation Atalanta, The European Union Naval Force for Somalia Takes Stock After 13 Years Operating*. European Union External Action. https://www.eeas.europa.eu/eeas/operation-atalanta-european-union-naval- force-somalia-takes-stock-after-13-years-operating_und_en

European Union External Action. (2021b). *Operation Atalanta, The European Union Naval Force for Somalia Takes Stock After 13 Years Operating*. European Union External Action. https://www.eeas.europa.eu/eeas/operation-atalanta-european-union-naval- force-somalia-takes-stock-after-13-years-operating_und_en

European Union External Action. (2021c). *The Common Security and Defence Policy-CSDP Structure, Instruments, and Agencies*. European Union External Action. https://www.eeas.europa.eu/eeas/csdp-structure-instruments-and-agencies_en

European Union External Action. (2021d). *The EU High Representative for Foreign Affairs Shapes the Standing of the European Union on the Global Stage*. European Union External Action.

https://www.eeas.europa.eu/eeas/high-representative-vice-president_en
GeeksforGeeks. (2024). Difference between Efficiency and Effectiveness. GeeksforGeeks. https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-efficiency-and-effectiveness/
Globalsecurity.org. (2010). Pirates. GlobalSecurity.Org. https://www.globalsecurity.org/military/world/para/pirates.htm
International Crisis Group. (2017). *Time to Reset African Union-European Union Relations*. International Crisis Group. https://www.crisisgroup.org/africa/255-time-reset-african- union-european-union-relations
Mraovic, J. (2024). *Productivity vs efficiency: what is the difference and why it matters*. Clockify.Me. https://clockify.me/blog/managing-tasks/productivity-vs-efficiency/
Saul, J. (2023). *Warship rushes in to investigate suspected pirate attack off Somalia*. Reuters.Com. https://www.reuters.com/world/spanish-warship-headed-vessel-that-may-be-hijacked-by-pirates-eu-somali-force-2023-12-15/
Shiferaw, L. T., & Ciommo, M. Di. (2023). *Trouble in Paradise: The EU-Africa Partnership in a Geopolitical Context*. Ecdpm.Org. https://ecdpm.org/work/trouble-paradise-eu- africa-partnership-geopolitical-context